



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA)**

LAPORAN AKHIR



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN (SSK) TAHUN 2022-2026
KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenan-Nya, sehingga Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026 pada tahun ini dapat terselesaikan.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan selama 5 tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, sebagai dasar/acuan penyusunan strategi serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, penyusunan program jangka menengah dan tahunan, dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi sebagai layanan dasar yang wajib disediakan untuk seluruh masyarakat

Terima kasih diucapkan kepada Tim Pokja PKP Kabupaten Grobogan, serta pihak-pihak lainnya yang telah bekerja sama dalam penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026. Kami berharap informasi yang terkandung dalam buku ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sanitasi untuk mencapai Target SDGs dan RJP MN 2020-2024.

Purwodadi, ... November 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Metodologi Penyusunan	1-3
1.3 Dasar Hukum	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-6
BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI	2-1
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Grobogan	2-1
2.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	2-1
2.1.2 Penggunaan lahan	2-2
2.1.3 Kependudukan	2-1
2.1.4 Kondisi Perekonomian	2-3
2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah	2-6
2.2 Profil Sanitasi Saat Ini	2-13
2.2.1 Air Limbah Domestik	2-15
2.2.2 Pengelolaan Sampah	2-38
2.2.3 Drainase Lingkungan	2-65
2.3 Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi	2-73
BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	3-1
3.1 Visi dan Misi Sanitasi	3-1
3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi	3-2
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	3-2
3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi	3-5
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi	3-10
BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	4-1
4.1 Air Limbah Domestik	4-1
4.2 Pengelolaan Persampahan	4-1
Bab 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	5-1
5.1 Ringkasan	5-1
5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah	5-3
5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah	5-3

	BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	6-1
6.1	Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi	6-1
6.2	Pengumpulan Dan Penyajian / Pelaporan Data	6-3
6.2.1	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi	6-4
6.2.2	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi	6-4
6.3	Jadwal Monitoring Dan Evaluasi	6-5
	Lampiran 1 Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA	
	Lampiran 2 Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah	
	Lampiran 4 Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK	
	Lampiran 5 - Matrik Program dan Kegiatan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan Tahun 2020	2-2
Tabel 2 2	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan	2-1
Tabel 2 3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	2-1
Tabel 2 4	Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Grobogan	2-2
Tabel 2 5	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	2-3
Tabel 2 6	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rp)	2-4
Tabel 2 7	Pertumbuhan Sektor PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	2-5
Tabel 2 8	Matrik Sandingan SSK Sub Sektor Air Limbah Domestik	2-15
Tabel 2 9	Capaian Akses Air Limbah Domestik	2-17
Tabel 2 10	Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	2-18
Tabel 2 11	Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)	2-20
Tabel 2 12	Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat	2-23
Tabel 2 13	Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024	2-24
Tabel 2 14	Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting:	2-25
Tabel 2 15	Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	2-27
Tabel 2 16	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	2-29
Tabel 2 17	Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah	2-30
Tabel 2 18	Target Advokasi dan Komunikasi : Pokja, Kepala OPD, Kepala Daerah	2-32
Tabel 2 19	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	2-34
Tabel 2 20	Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi	2-36
Tabel 2 21	Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah	2-36
Tabel 2 22	Matrik Sandingan SSK Sub Sektor Pengelolaan Persampahan	2-38
Tabel 2 23	Sistem dan infrastruktur	2-39
Tabel 2 24	Pengumpulan Sampah	2-41
Tabel 2 25	Penampungan Sementara dan Pengangkutan	2-42
Tabel 2 26	TPS3R	2-43
Tabel 2 27	TPS/Landasan Countainer	2-44
Tabel 2 28	Bank Sampah	2-45
Tabel 2 29	Pemrosesan Akhir	2-51
Tabel 2 30	Analisis GAP Terhadap Target Sub Sektor: Persampahan Perkotaan	2-54
Tabel 2 31	Rantai Layanan Sampah	2-56
Tabel 2 32	Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat	2-58
Tabel 2 33	Target Advokasi dan Komunikasi: Pokja, Kepala OPD, Kepala Daerah	2-59
Tabel 2 34	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan	2-62
Tabel 2 35	Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Pengelolaan Persampahan	2-64
Tabel 2 36	Panjang Drainase Perkotaan Wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Grobogan	2-65

Tabel 2 37	Saluran Drainase Utama Yang Ada di Kota Purwodadi	2-67
Tabel 2 38	Kapasitas Bank Full Kb 15 Kota Gubug	2-69
Tabel 2 39	Data Genangan di Kabupaten Grobogan	2-71
Tabel 2 40	Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik	2-74
Tabel 2 41	Permasalahan Mendesak Persampahan	2-76
Tabel 2 42	Permasalahan Mendesak Drainsae Lingkungan	2-77
Tabel 2 43	Tingkat Area Beresiko Sanitasi	2-78
Tabel 3 1	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan	3-2
Tabel 3 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik	3-3
Tabel 3 3	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Persampahan	3-5
Tabel 3 4	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	3-8
Tabel 3 5	Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan	3-10
Tabel 3 6	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Sanitasi	3-10
Tabel 3 7	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	3-11
Tabel 3 8	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	3-11
Tabel 3 9	Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun	3-12
Tabel 3 10	Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Grobogan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	3-12
Tabel 4-1	Analisis SWOT Air Limbah	4-1
Tabel 4-2	Strategi SWOT Air Limbah Domestik	4-6
Tabel 4-3	Strategi Penanganan Air Limbah	4-6
Tabel 4-7	Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah	4-1
Tabel 4-4	Analisis SWOT Persampahan	4-1
Tabel 4-5	Strategi SWOT Pengelolaan Persampahan	4-6
Tabel 4-6	Strategi Penanganan Persampahan	4-7
Tabel 4-8	Matrik Kerangka Kerja Logis Persampahan	4-9
Tabel 5 1	Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun	5-2
Tabel 5 2	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran	5-2
Tabel 5 3	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten	5-3
Tabel 5 4	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	5-3
Tabel 5 5	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	5-3
Tabel 5 6	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	5-3
Tabel 5 7	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	5-4
Tabel 5 8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	5-4
Tabel 6-1	Pelaporan Monev Implementasi SSK	6-5
Tabel 6-2	Jadwal Monitoring Dan Evaluasi	6-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1	Peta Administrasi Kabupaten Grobogan	2-1
Gambar 2 2	Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Grobogan	2-7
Gambar 2 3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan	2-9
Gambar 2 4	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan	2-13
Gambar 2 5	Sarana Pengangkutan Yang Dimiliki	2-20
Gambar 2 6	Sarana Pengolahan IPLT	2-22
Gambar 2 7	Sebaran Lokasi IPLT dan IPAL Komunal	2-24
Gambar 2 8	Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	2-26
Gambar 2 9	Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	2-28
Gambar 2 10	Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2-28
Gambar 2 11	Komposisi Sampah Kabupaten Grobogan	2-40
Gambar 2 12	Jumlah Timbulan Sampah	2-40
Gambar 2 13	sarana pengumpulan yang dimiliki	2-42
Gambar 2 14	sarana pengangkutan yang dimiliki:	2-43
Gambar 2 15	TPS 3R Mekar Sari	2-43
Gambar 2 16	Sebaran TPS	2-45
Gambar 2 17	Sebaran Bank Sampah	2-51
Gambar 2 18	Peta Sebaran TPA dan TPS	2-54
Gambar 2 19	Rantai Layanan Sampah	2-55
Gambar 2 20	Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	2-57
Gambar 2 21	Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis TPA Kabupaten Grobogan	2-58
Gambar 2 23	Peta Jaringan Drainase Kabupaten Grobogan	2-70
Gambar 2 24	Peta Beresiko Air Limbah Domestik	2-85
Gambar 2 25	Peta Area Beresiko Pengelolaan Persampahan	2-85
Gambar 2 26	Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan	2-86
Gambar 3 1	Zona Sistem Air Limbah	3-7
Gambar 3 2	Peta Zonasi Persampahan	3-9
Gambar 4-1	Kuadran SWOT Air Limbah Domestik	4-5
Gambar 4-2	Kuadran SWOT Pengelolaan Persampahan	4-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Penyebab buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra Kabupaten/ Kota, hingga menurunnya perekonomian Kabupaten/ Kota.

Pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan RJPMN 2020-2024, dimana pembangunan infrastruktur akan berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan salah satunya yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti akses air minum dan sanitasi di perkotaan dirasakan masih lemah, sehingga capaian akses air bersih dan sanitasi layak belum optimal. Disisi lain, buruknya kondisi sanitasi bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk pada sarana sanitasi yang layak, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi.

Dokumen SSK merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat Kabupaten yang meliputi sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase dan higiene. SSK disusun oleh pemerintah Kabupaten, dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan. Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan

ini dengan dokumen perencanaan Kabupaten lainnya antara lain dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciaptakaryaan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026 serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dokumen SSK tidak boleh lepas dari amanat Perda RTRW yang telah disusun untuk perencanaan jangka panjang 20 tahun. Dokumen SSK ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi.

Dokumen SSK berisi pemetaan kondisi terkini capaian pembangunan sanitasi tingkat kabupaten, area prioritas penanganan, strategi pengembangan sanitasi serta indikasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Strategi Sanitasi Kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 – 2026 merupakan pembaharuan dari dokumen SSK Grobogan yang telah disusun tahun 2016. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
- Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.
- Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi SSK
- Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Grobogan membutuhkan perencanaan yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah. Dokumen perencanaan tersebut yaitu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sudah disepakati secara nasional sebagai dokumen perencanaan strategis bidang sanitasi yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi. Dokumen SSK Kabupaten

Grobogan merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan khususnya sektor sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2 Metodologi Penyusunan

Pada sub bab ini dapat dijelaskan metodologi saat pengumpulan data primer; salah satunya adalah dengan studi EHRA; metodologi analisa data yaitu dengan memanfaatkan Instrumen SSK; dan metodologi penyusunan SSK melalui partisipasi anggota Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dibantu oleh fasilitator.

Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten diawali dengan penyusunan kajian EHRA (*Environmental Health Risk Assesment*) atau Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan. Penyusunan kajian EHRA ini diperlukan untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan. Penyusunan kajian EHRA dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kajian EHRA yang diterbitkan oleh PIU-Advokasi dan Pemberdayaan (PIU-AE) Kementerian Kesehatan sebagai acuan pelaksanaannya.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan perencanaan strategis sanitasi jangka menengah (5 tahun) untuk memberikan arah bagi pengembangan sanitasi sekaligus sebagai upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari sektor sanitasi. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini memuat antara lain :

1. Pemetaan kondisi terkini capaian pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten;
2. Area prioritas penanganan;
3. Strategi pengembangan sanitasi; serta
4. Indikasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini disusun oleh Pokja PKP secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Grobogan dibantu Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama-sama dengan tim Pokja Sanitasi Kabupaten melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan.

Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut :

1. Melakukan pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi kabupaten saat ini. Termasuk didalamnya adalah pengumpulan dokumen perencanaan dan data teknis terkini, penetapan profil sanitasi, identifikasi permasalahan dan penetapan area berisiko sanitasi. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan penggalian data primer melalui kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
2. Melakukan studi EHRA 2021 (*Environmental Health Risk Assessment*) atau Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yaitu studi untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku – perilaku yang memiliki risiko pada kesehatan warga. Hasil ini dikaitkan dengan perkembangan kondisi saat ini.
3. Menetapkan Skenario Pembangunan Sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, penetapan zona dan sistem sanitasi serta tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.
4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sistem sanitasi kabupaten.
5. Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi melalui upaya; eksternalisasi kepada Pokja PKP Provinsi, Satker, Kementerian dan Lembaga dan sumber pendanaan lainnya. Internalisasi keseluruhan SKPD terkait sanitasi di tingkat Kabupaten dan pemasaran sanitasi kepada *Corporate Social Responsibility*(CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan 2022-2026 adalah:

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 -2024

7. Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
8. Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. PermenKes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
10. Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
11. Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
12. Permen PU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
13. Permen PU Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2019 Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4 Sistematika Penulisan

Seusai dengan pedoman pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan penjabaran mengenai gambaran wilayah Kabupaten Grobogan, kemajuan pelaksanaan SSK terkini, profil sanitasi saat ini yang up to date, area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi berdasarkan hasil analisa data dari instrumen profil dan peta area berisiko sanitasi.

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan penjabaran mengenai visi dan misi sanitasi Kabupaten Grobogan, pentahapan pengembangan sanitasi yang mencakup Tahapan pengembangan sanitasi, Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi serta skenario pencapaian sasaran, sekaligus kemampuan pendanaan sanitasi daerah Kabupaten Grobogan.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan penjabaran mengenai strategi pengembangan sanitasi sektor air limbah domestik dan pengelolaan persampahan.

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Menyajikan tentang ringkasan program dan kegiatan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK.

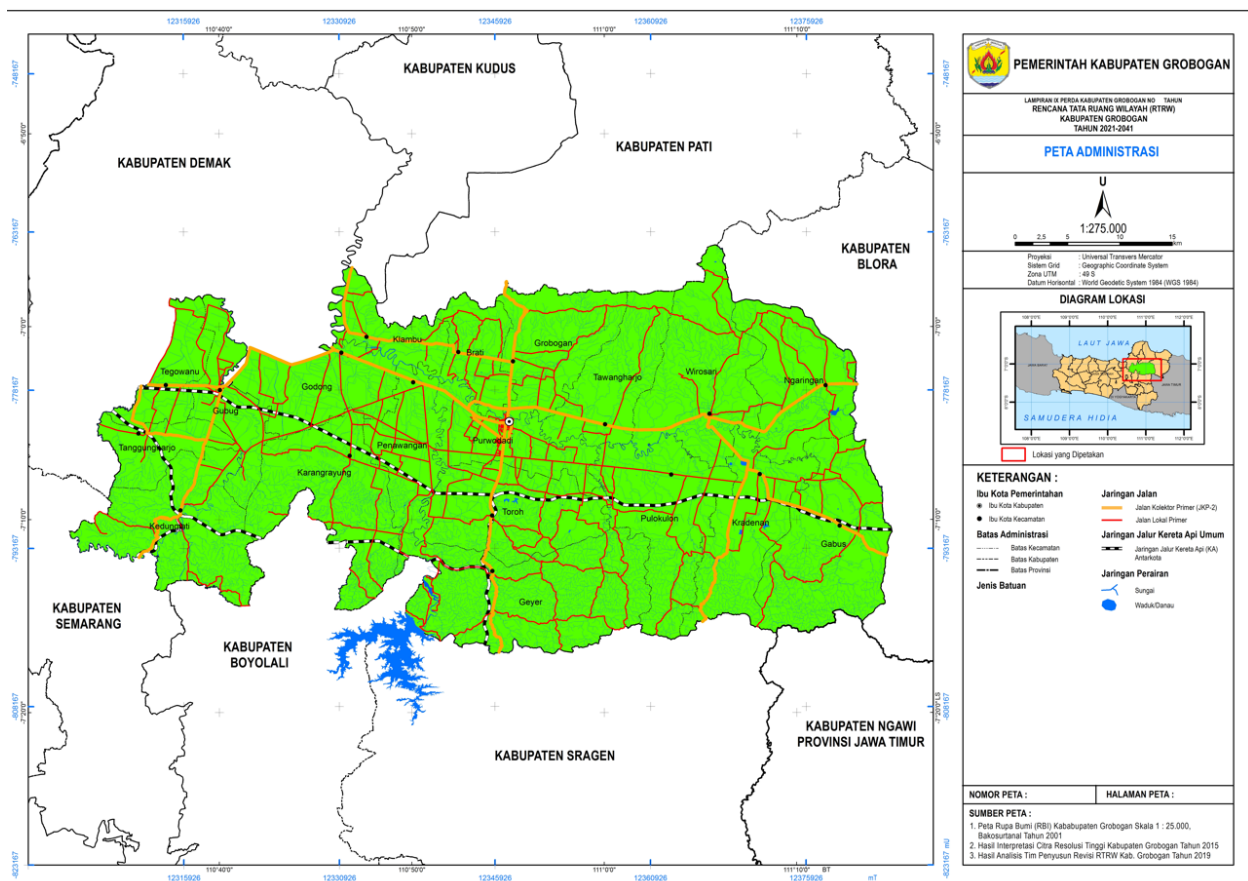
BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Grobogan

2.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km². Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 196,19 km², sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 46,56 km². Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2-1 Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,29
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,27
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,23
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,72
5	Geyer	0	13	102	507	101	205,14
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	136,95
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,66
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,93
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,15
10	Wirosari	2	12	86	509	94	151,03
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,07
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,36
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,18
14	Brati	0	9	51	279	57	53,69
15	Klambu	0	9	44	185	47	52,35
16	Godong	0	28	86	511	103	92,93
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,52
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,26
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	50,13
	Kabupaten Grobogan	7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110° 32' - 111° 15' Bujur Timur dan 6° 55' - 7° 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

2.1.2 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 71.549 ha, permukiman seluas 31.855 Ha, sedangkan sisanya untuk peruntukan lainnya. Analisis penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan lahan existing di Tahun 2019 dan mengacu standar tutupan lahan sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial. Adapun rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-2 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)																Total
		Bangunan Industri	Danau/Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/Tambak	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegalan	Lain-Lain	
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggunharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
	Total	1,50	1,56	0,30	362,07	87,97	1,05	0,01	0,44	318,55	715,49	81,39	133,57	10,06	0,03	309,87	0,00	2023,85

Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan

2.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 1.480.338 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 141.405 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.111 jiwa.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 733 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.808,71 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 309,13 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2-3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	44.913	309,13
2	Karangrayung	144,27	102.421	709,93
3	Penawangan	75,23	66.236	880,45
4	Toroh	126,72	119.168	940,40
5	Geyer	205,14	67.074	326,97
6	Pulokulon	136,95	110.585	807,48
7	Kradenan	111,66	84.159	753,71
8	Gabus	163,93	75.205	458,76
9	Ngaringan	119,15	70.975	595,68
10	Wirosari	151,03	94.671	626,84
11	Tawangharjo	93,07	58.483	628,38
12	Grobogan	104,36	79.165	758,58
13	Purwodadi	78,18	141.405	1.808,71
14	Brati	53,69	51.478	958,80
15	Klambu	52,35	39.111	747,11
16	Godong	92,93	88.750	955,02
17	Gubug	65,52	85.718	1.308,27
18	Tegowanu	54,26	58.123	1.071,19
19	Tanggunharjo	50,13	42.698	851,75
	JUMLAH	2.023,86	1.480.338	731,44

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2-4 Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Grobogan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
Kedungjati	8	4	1.063,93	25.119	19.794	8.394	6.678	42
Karangrayung	13	6	2.247,76	61.740	40.681	20.835	13.561	46
Penawangan	13	7	1.424,44	41.399	24.837	13.263	7.961	46
Toroh	6	10	2.891,51	41.551	77.617	13.305	26.724	41
Geyer	11	2	2.385,57	55.159	11.915	19.990	4.099	28
Pulokulon	5	8	2.540,91	38.781	71.804	14.158	26.462	44
Kradenan	8	6	2.067,43	49.318	34.841	15.810	13.386	41
Gabus	10	4	1.761,11	51.798	23.407	16.292	6.454	43
Ngaringan	11	1	1.550,10	67.689	3.286	22.592	1.191	46
Wirosari	8	6	1.943,80	52.413	42.258	17.756	13.931	49
Tawangharjo	7	3	1.241,68	37.120	21.363	11.442	6.387	47
Grobogan	5	7	1.479,97	28.625	50.540	8.749	14.902	53
Purwodadi	4	13	2.448,18	20.774	120.631	7.311	41.218	58
Brati	5	4	1.001,64	23.062	28.416	8.090	9.458	51
Klambu	4	5	695,73	16.380	22.731	5.345	7.953	56
Godong	15	13	1.814,91	42.713	46.037	13.896	15.066	49
Gubug	4	17	1.450,16	13.900	71.818	3.665	20.279	59
Tegowanu	11	7	1.103,43	31.733	26.390	8.500	6.672	53
Tanggunharjo	5	4	742,43	24.129	18.569	7.031	5.640	58
Kabupaten Grobogan	153	127	31.855	723.403	756.935	236.424	248.022	46

Sumber : Instrumen SSK, 2021

2.1.4 Kondisi Perekonomian

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan, tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku sebesar 27.264.642,82 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-5 PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.924.435,70	7.197.969,74	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94
2	Pertambangan dan Penggalian	272.319,52	292.558,63	320.270,65	358.185,54	369.166,13
3	Industri Pengolahan	2.592.911,62	2.868.784,18	3.270.867,21	3.632.925,31	3.734.211,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.425,63	20.901,66	22.744,91	24.298,54	25.266,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.788,56	10.434,91	11.044,71	11.973,13	12.534,75
6	Konstruksi	1.211.650,02	1.314.658,71	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.186.952,09	4.562.213,97	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13
8	Transportasi dan Pergudangan	992.492,96	1.078.185,31	1.165.022,32	1.312.081,20	966.544,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	984.266,58	1.071.413,07	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49
10	Informasi dan Komunikasi	450.255,95	543.471,56	629.542,51	708.722,88	834.197,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	908.281,21	1.015.734,38	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00
12	Real Estate	459.717,05	496.373,34	532.275,61	576.910,89	579.572,84
13	Jasa Perusahaan	55.698,74	61.402,18	68.455,76	77.562,70	74.338,62

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	784.646,45	827.877,05	856.591,26	903.533,33	904.892,49
15	Jasa Pendidikan	1.107.669,68	1.211.128,52	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.133,61	236.832,21	265.598,24	290.244,58	309.404,19
17	Jasa lainnya	591.271,91	653.603,83	720.374,24	794.204,84	782.189,38
	Jumlah	21.764.917,28	23.463.543,25	25.407.053,22	27.278.521,82	27.264.642,82

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.379.683,67 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2-6 PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.945.935,34	5.092.068,97	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52
2	Pertambangan dan Penggalian	181.847,14	189.656,52	201.622,38	220.236,50	223.576,41
3	Industri Pengolahan	1.893.484,71	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.111,62	17.919,28	18.870,21	19.965,72	21.093,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.700,87	8.139,35	8.521,84	9.059,32	9.233,59
6	Konstruksi	934.380,36	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.533.658,09	3.767.444,62	4.015.289,06	4.292.117,11	4.205.503,15
8	Transportasi dan Pergudangan	874.144,68	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34	786.284,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	742.451,16	798.783,54	867.601,69	956.007,73	940.730,51

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10	Informasi dan Komunikasi	481.149,03	552.421,98	640.224,89	713.196,71	832.856,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	665.973,46	715.919,54	744.740,83	773.097,11	808.592,04
12	Real Estate	402.061,56	423.395,13	445.455,19	474.781,54	474.227,15
13	Jasa Perusahaan	42.444,56	45.486,68	49.657,39	54.716,60	51.284,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.846,43	585.332,49	598.876,61	621.795,77	616.278,75
15	Jasa Pendidikan	753.687,48	795.963,89	853.470,60	915.566,12	903.281,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.404,70	174.701,11	191.232,91	204.689,96	213.517,52
17	Jasa lainnya	475.348,51	517.456,42	563.940,55	617.357,28	594.295,76
	Jumlah	16.682.629,70	17.659.254,29	18.688.571,17	19.692.631,32	19.379.683,67

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2016 -2019 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,59 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-9 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional. Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2016 sampai dengan 2020 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2-7 Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,57	2,95	1,21	-1,52	2,28
2	Pertambangan dan penggalian	2,35	4,29	6,31	9,23	1,52
3	Industri pengolahan	5,37	8,42	11,56	8,93	0,39
4	Pengadaan listrik gas	5,16	4,72	5,31	5,81	5,65
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,78	5,69	4,70	6,31	1,92
6	Konstruksi	5,59	5,56	4,88	5,65	-8,23
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,45	6,62	6,78	8,06	-3,26
8	Transportasi dan pergudangan	7,51	7,00	7,24	9,82	-28,62
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,52	7,59	8,62	10,19	-1,60
10	Informasi dan komunikasi	6,93	14,81	15,89	11,40	16,78
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,78	7,50	4,03	3,81	4,59

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Real estate	6,04	5,31	5,21	6,58	-0,12
13	Jasa perusahaan	6,80	7,17	9,17	10,19	-6,27
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,91	2,54	2,31	3,83	-0,89
15	Jasa pendidikan	5,83	5,61	7,22	7,28	-1,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,97	8,91	9,46	7,04	4,31
17	Jasa lainnya	6,60	8,86	8,98	9,47	-3,74
	PDRB	4,51	5,85	5,83	5,37	-1,59

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

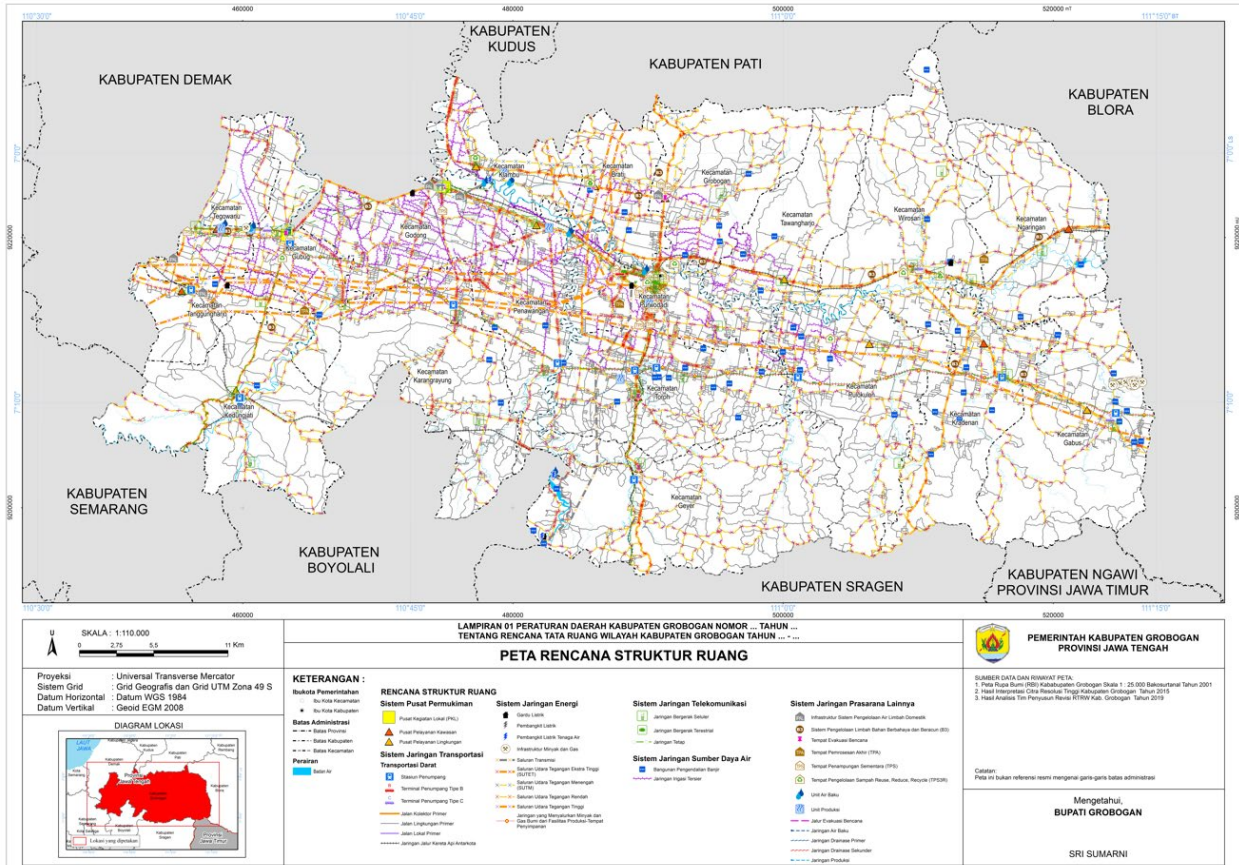
Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya ; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; dan Kawasan Rawan Bencana Alam. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi Hutan Produksi; Hutan Rakyat; Kawasan Pertanian; Kawasan Peternakan; Kawasan Pertambangan; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; dan Kawasan Permukiman. Luas kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.

Adapun untuk rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya dalam wilayah kabupaten. Selain itu juga sebagai sistem peletakan jaringan prasarana wilayah serta

memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau perkotaan yang ada.

Kabupaten Grobogan telah menentukan sistem pusat pelayanan yang direncanakan melalui rencana struktur ruang dalam Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031. Pengembangan sistem pusat pelayanan terbagi menjadi dua, yakni rencana pengembangan sistem perkotaan, dan rencana pengembangan sistem perdesaan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan
Gambar 2-2 Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Grobogan

Rencana pengembangan sistem perkotaan terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana fungsi pusat kegiatan. Yang termasuk dalam rencana sistem pusat kegiatan meliputi:

1. Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur;
2. PKL, yang meliputi perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong
3. PKLp, meliputi perkotaan Wirosari dan Kradenan;
4. PPK, meliputi ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, selain yang termasuk dalam kategori PKL dan PKLp.

Sedangkan rencana fungsi kegiatan dalam sistem ini adalah kawasan yang termasuk dalam PKL akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industry, perekonomian skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Untuk kawasan PKLp, dikembangkan untuk pengembangan skala local. Sedangkan untuk PPK dikembangkan untuk pusat pelayanan skala kecamatan.

Pengembangan sistem perdesaan adalah pengembangan PPL, dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman pedesaan. Desa-desa yang berperan sebagai pusat pengembangan sistem perdesaan adalah Desa Karangasem Kecamatan Wirosari, Desa Boloh Kecamatan Toroh, Desa Jeketro Kecamatan Gubug, Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, Desa Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan, Desa Simo Kecamatan Kradenan, Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo, Desa Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Telawah Kecamatan Karangrayung, Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati, dan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon.

Selain pengembangan perkotaan dan perdesaan, struktur ruang yang dimuat dalam RTRW juga termasuk pengembangan sistem prasarana wilayah. Yang termasuk dalam sistem prasarana wilayah ada dua, yakni rencana pengembangan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

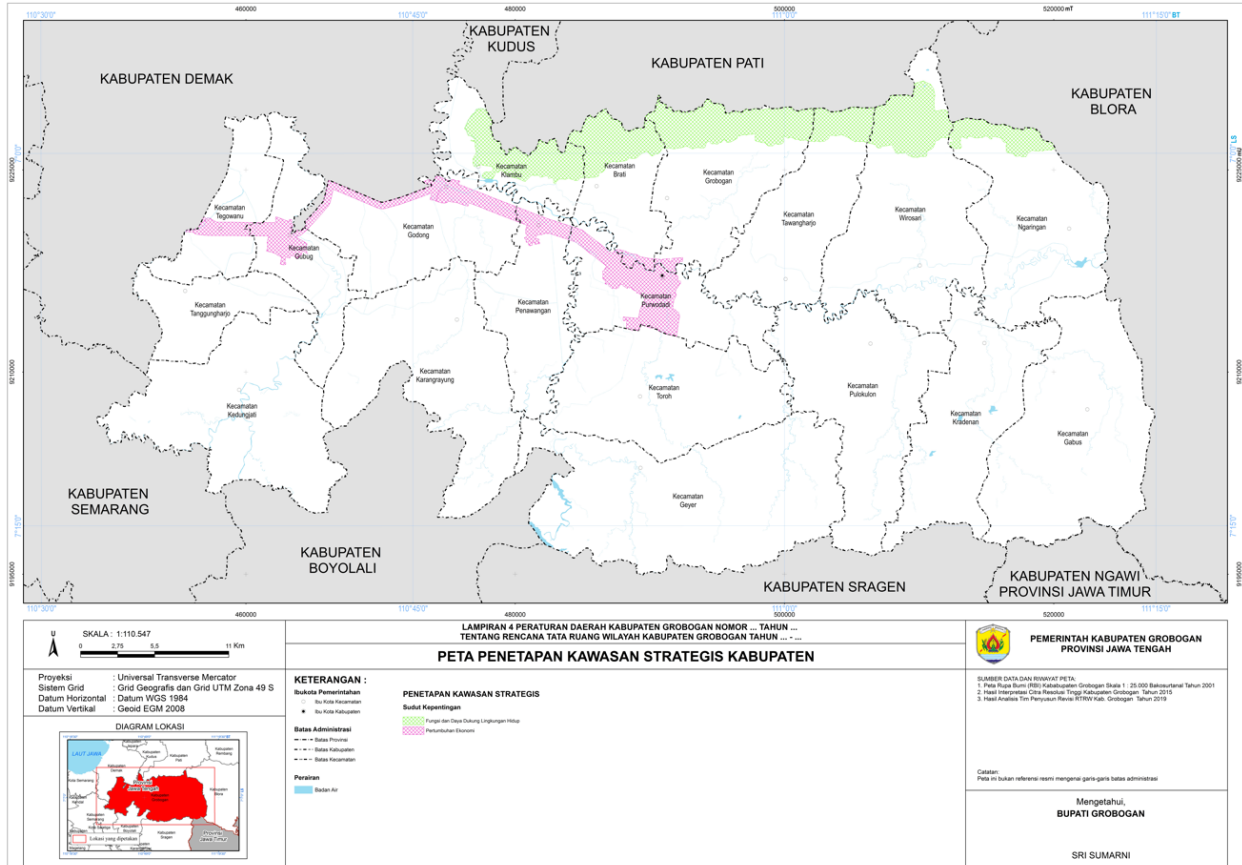
Pengembangan sistem prasarana utama meliputi rencana sistem jaringan transportasi, meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan kereta api. Jaringan transportasi darat yang dimaksud adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan jaringan kereta api meliputi, pengembangan jalur kereta api regional, kereta api komuter, stasiun kereta api, dan pelayanan kereta api.

Adapun rencana pengembangan sistem prasarana lainnya meliputi rencana pengembangan sistem jaringan energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana wilayah lainnya. Adapun rencana struktur ruang Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari peta rencana struktur ruang wilayah di bawah ini.

Sedangkan berdasarkan Perpres 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Selain itu mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan perkotaan Kedungsepur juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang sebagai :

1. ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah;
2. pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus;

3. perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta
4. perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan
 Gambar 2-3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

Wilayah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam kawasan Kedungsepur seluas ± 101.827 ha, meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Toroh. Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 2 (dua) Kawasan Perkotaan yaitu **perkotaan Purwodadi, dan Gubug** yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya.

2.1.5.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 70.142,60 ha. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.059,93 ha. Sedangkan Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 67.082,67 ha.

2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat berada tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luasnya kurang lebih 9.884 ha. Namun di dalam Revisi RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat ini masuk dalam Kawasan Perkebunan Rakyat.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian;

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan terdiri dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan tersebar hamper di seluruh wilayah kecamatan.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan;

Kawasan untuk perikanan di Kabupaten Grobogan arahnya adalah perikanan budidaya. Adapun komoditas perikanan yang ada yaitu mujahir, nila, tawes, gurame, dan lele. Kawasan peruntukan perikanan ini meliputi budidaya kolam, sungai, dan waduk yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan;

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Hasil pertambangan mineral bukan logam yang dihasilkan terdiri dari pasor kuarsa, fosfat, bentonit, gypsum, batu gamping, marmer, dan lempung. Adapaun yang masuk kategori batuan yaitu tanah liat, tanah urug, sirtu, dan pasir kali. Kawasan ini tersebar di cukup banyak kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Kawasan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus. Adapun pertambangan gas bumi ada di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus.

6. Kawasan Peruntukan Industri;

Pengembangan kawasan industri terdiri atas industri besar; industri sedang/menengah; industri kecil/rumah tangga; dan kawasan industri. Kawasan industri besar, sedang/menengah berada di Kecamatan Tegowanu; Kecamatan Gubug; Kecamatan Tanggunharjo; Kecamatan Godong; Kecamatan Penawangan; Kecamatan Karangrayung; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Toroh; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Wirosari; dan Kecamatan Pulokulon.

Kawasan untuk industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Adapun untuk kawasan industri diarahkan ke Kecamatan Tanggunharjo.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata difokuskan kepada pariwisata budaya; dan pariwisata alam. Kawasan pariwisata budaya meliputi Bledug Kuwu; Api Abadi Mrapen; Gua Urang; Gua Lawa dan Macan; Makam Ki Ageng Selo; Makam Ki Ageng Tarub; dan Makam Ki Ageng Getas Pendowo. Kawasan pariwisata alam meliputi Hutan Wisata Cindelaras; Waduk Simo; Waduk Kedung Ombo; Mata Air Coyo; dan Mata Air Jatipohon.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan terletak di Kecamatan Purwodadi dan ibukota kecamatan lainnya. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh kecamatan.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya ;

Kawasan peruntukan lainnya diarahkan untuk pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) dan Kepolisian Resor (Polres) yang terletak di Kecamatan Purwodadi. Dan juga Komando Rayon Militer (Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Grobogan.

2.1.5.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Grobogan terdiri atas:

1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya terdiri dari kawasan lindung yang dikelola masyarakat, dan kawasan resapan air.

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat terdapat di Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer.

Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus.

2. Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk atau embung dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan (sungai bertanggung dan sungai tidak bertanggung); sempadan sungai di luar kawasan perkotaan; sempadan sungai di luar permukiman; dan sempadan sungai di dalam permukiman. Sempadan sungai ini tersebar di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 7.265 hektar berada di sepanjang kanan dan kiri Sungai Jragung, Sungai Tuntang, Sungai Serang, Sungai Lusi, Sungai Juwana, dan sungai kecil lainnya.

Kawasan sekitar waduk/embung diatur dengan sempadan sepanjang 50 – 100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang ke arah darat, seluas kurang lebih 149 hektar terdapat di Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh; Waduk Simo di Kecamatan Kradenan; Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh; Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan; Waduk Butak di Kecamatan Kradenan; dan Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.

Kawasan sekitar mata air di Kabupaten Grobogan memiliki luas kurang lebih 1.382 hektar. Kawasan ini tersebar di wilayah-wilayah yang memiliki mata air.

3. Ruang terbuka hijau (RTH)

Terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik meliputi lapangan olahraga (27 hektar); taman dan hutan kota (32 hektar) tempat pemakaman umum (34 hektar); dan jalur hijau (432 hektar). Adapun RTH privat memiliki luas kurang lebih 330 hektar meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran;

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya;

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Grobogan adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Memiliki luas kurang lebih 234 hektar meliputi Kawasan Bledug Kuwu, Kawasan Api Abadi Mrapen, Kawasan Gua Urang, Kawasan Gua Lawa dan Macan, Kawasan Makam Ki Ageng Selo, dan Kawasan Makam Ki Ageng Tarub.

5. Kawasan Lindung Geologi;

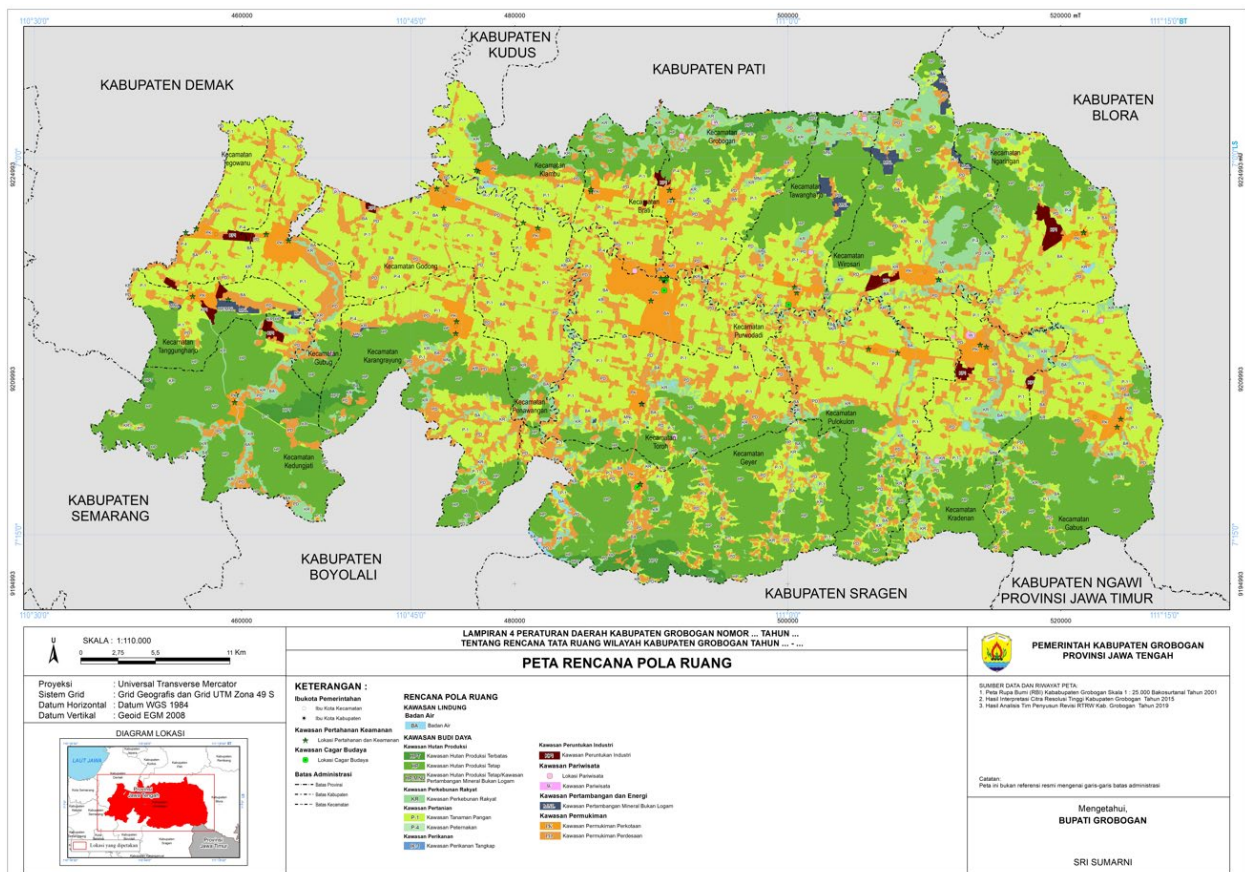
Kawasan ini meliputi kawasan lindung karst, dan kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air di Kabupaten Grobogan adalah berupa cekungan air tanah Semarang-Demak. Sedangkan kawasan lindung karst merupakan bentangan alam karst Sukolilo yang terdapat di Kecamatan Brati dan Kecamatan Grobogan.

6. Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan rawan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Adapun bencana yang teridentifikasi berdasarkan Perda RTRW yaitu kawasan rawan banjir; kawasan rawan tanah longsor; dan kawasan rawan kekeringan.

7. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Grobogan berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan ini memiliki luas 2.424 hektar meliputi Kecamatan Gabus; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Geyer; Kecamatan Toroh; Kecamatan Kradenan; Kecamatan Pulokulon; Kecamatan Kedungjati; dan Kecamatan Karangrayung.



Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan

Gambar 2-4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Grobogan pada dasarnya berupa Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank ke pengolahan akhir. Pada saat ini Kabupaten Grobogan telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Ngembak di Kecamatan Purwodadi, Kondisi saat ini fungsi tidak berjalan dengan baik (Kondisi Bangunan Baik).

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah Kabupaten Grobogan didasarkan pada data yang ada dimana hampir 98% penduduk Kabupaten Grobogan menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat (*SPALD -S*). Limbah manusia ditampung dalam tangki septik atau cubluk dimana penguraian terjadi secara alamiah dan cairannya dibuang ke bidang tanah atau sumur resapan. Sedangkan untuk limbah mandi dan cuci (*grey water*) penanganannya langsung dibuang ke saluran drainase. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kabupaten Grobogan masih dilaksanakan secara individual oleh masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan.

Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman.

Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Grobogan lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Grobogan difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan pencegahan kontaminasi terhadap air tanah oleh limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau pusat-pusat kegiatan masyarakat serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi masyarakat.

Seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase, sungai-sungai dan pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya ikut memperburuk kondisi sanitasi di Kabupaten Grobogan. Dari semua persoalan sanitasi di Kabupaten Grobogan, penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi yang berakibat kepada kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi dalam kehidupan

2.2.1 Air Limbah Domestik

Tabel berikut menjelaskan kemajuan pelaksanaan SSK Kabupaten Grobogan pada tahun sebelumnya dengan membandingkan capaian akses air limbah domestik tahun ini.

Tabel 2-8 Matrik Sandingan SSK Sub Sektor Air Limbah Domestik

SSK Kab. Grobogan 2017-2021			SSK Kab. Grobogan 2022 - 2026
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
Mengoptimalkan pengelolaan air limbah di perkotaan dan perdesaan yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan untuk perbaikan kesehatan masyarakat	Optimalisasi dan efektifitas pelayanan penyedotan lumpur tinja ke IPLT Ngembak dengan menambah cakupan pelayanan dari 30% menjadi 45% pada Tahun 2021.	Kondisi eksisting 11,4% RT yang melakukan penyedotan tinja tetapi yang dikirim ke IPLT hanya 2%. Selebihnya diindikasikan dibuang di pekarangan/sungai). Indikator sasaran menambah cakupan pelayan menjadi 45 % RT melakukan penyedotan tangki septic maksimal 5 tahun sekali pada tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. • Perilaku penduduk yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) berdasarkan studi EHRA tahun 2021 sebanyak 10,03% • Penduduk yang menggunakan cubluk/tangki septic individual tidak layak di tahun 2021 sebanyak 19,36% • Cakupan kepemilikan tangki septic individual layak pakai pada tahun 2021 sebanyak 71,77% • Jumlah IPAL Komunal di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebanyak 80 unit. • Cakupan pelayanan SPALD-T di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mencapai 3,00%. • IPLT di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 terdapat 1 IPLT yaitu IPLT Ngembak dengan kapasitas 21 m³/hari. • Truk tinja milik pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebanyak 3 unit.
	Hilangnya BABS (ODF) di wilayah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021	Data BABS di Kab Grobogan sudah 0% (ODF) pada tahun 2016	
	Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septic dari 68% menjadi 80% pada akhir tahun 2021.	80% masyarakat Grobogan memiliki jamban pribadi dengan septic tank	
	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 20 unit menjadi 100 unit di wilayah padat kumuh miskin di akhir tahun 2021	20 unit IPAL Komunal Kawasan Kumuh/padat penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016.	
Pengembangan perangkat peraturan perundangan dan perencanaan	Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala	tersusunnya dokumen masterplan dan DED Pengelolaan Air Limbah skala Kota	

SSK Kab. Grobogan 2017-2021			SSK Kab. Grobogan 2022 - 2026
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	perkotaan pada akhir tahun 2021		
Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.	Meningkatkan anggaran Anggaran APBD/APBD-Desa untuk air limbah sebesar 3% pada tiap tahunnya	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.	
	Meningkatkan jumlah dana sektor swasta baik dengan dana CSR maupun penanaman modal investasi	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.	
meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan Jumlah Jamban yang dibangun secara swadaya/non-subsidi oleh masyarakat sebesar 10 Milyar selama lima tahun sampai Tahun 2017	Jumlah dana swadaya dalam penyediaan jamban keluarga.	

2.2.1.1 Sistem dan infrastruktur

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu tolak ukur dari kualitas pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selalu di upayakan ke arah perbaikan sehingga akan memberikan kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, namun peran serta swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas.

Secara umum air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu *grey water* (air bekas mandi dan cuci) serta *black water* (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok, baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal. Secara umum limbah tinja di Kabupaten Grobogan belum dikelola dengan baik, banyak masyarakat yang masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase, perkebunan, ladang maupun tempat lain yang dirasa memungkinkan. Masyarakat bahkan masih ada yang melakukan BABS di sungai secara langsung. Beberapa kelurahan sudah telayani dengan sistem IPAL komunal, MCK, septik tank individu maupun jamban

bersama, namun demikian sarana dan prasarana pengelolaan masih terbatas pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kabupaten Grobogan hal ini dikarenakan keterbatasan lahan. Sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja, Kabupaten Grobogan sudah memiliki IPLT yaitu di Ngembak. Secara umum pengelolaan air limbah di Kabupaten Grobogan tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2-9 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Wilayah Perkotaan	
A	Akses Aman	7,33%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	31,70%
	Akses Layak Bersama	4,70%
C	Akses Belum Layak*	7,70%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,00%
	Wilayah Perdesaan	
A	Akses Aman	6,06%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	26,90%
	Akses Layak Bersama	4,60%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,70%
C	Belum Layak	10,80%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0%
	Total	100%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sanitasi diartikan sebagai air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Berdasarkan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berikut tangga atau ladder akses air minum dan sanitasi:

1. Akses Aman

Pengguna fasilitas sanitasi di rumah sendiri dengan bangunan kloset atas standar leher angsa, dan bangunan bawah tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun atau sambungan rumah yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)

2. Akses Layak Sendiri

Penggunaan fasilitas sanitasi di rumah sendiri baik di perkotaan dan perdesaan, dengan kloset leher angsa, bawahnya tangki septik tapi tidak disedot, atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan

3. Akses Layak - Bersama

Pengguna fasilitas sanitasi bersama rumah tangga baik di perkotaan atau perdesaan, dengan kloset atas menggunakan leher angsa, dan bangunan bawah tangki septik, tersambung dengan IPALD, atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan

4. Akses Belum Layak

Pengguna fasilitas sanitasi, baik sendiri atau bersama, dimana bangunan atas kloset menggunakan leher angsa tapi bangunan bawahnya lubang tanah; atau fasilitas sanitasi non-leher angsa di bagian atas serta plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk cemplung, dan bagian bawah tangki septik, terhubung dengan IPALD atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan

5. BABS Tertutup

Pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau pantai/tanah lapang/ kebun dan lainnya

6. BABS di tempat terbuka

Pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan

Tabel 2-10 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Daerah		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng (pilih salah satu)	Unit	3 unit
2	Kondisi	Rusak/ Beroperasional	Beroperasional
3	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	2,5
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	15
5	Jumlah truk tinja /motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	12
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	2
	Swasta		
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	5
	Kondisi	Rusak/Beroperasional	Beroperasional
2	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	4

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	4
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	2
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	2

Sumber: DLH, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara umum sarana prasana pengelolaan air limbah yang sudah dibangun di Kabupaten Grobogan telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun demikian pelayanannya masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Untuk IPLT sudah ada dan truk tinja masih terbatas yaitu 8 unit (5 Swasta dan 3 Pemerintah) dimana lumpur tinjanya dibuang di IPLT Ngembak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana yang paling dominan dipergunakan adalah IPAL komunal. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan kegiatan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga melalui program/proyek layanan yang berbasis masyarakat.

Sebagian besar pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan dalam pengolahannya menggunakan septic tank dengan akhir pengelolaannya diresapkan ke dalam tanah dan sebagian kecil dilakukan penyedotan tinja oleh mobil penyedot tinja baik milik pemerintah maupun swasta yang kemudian dilakukan pengolahan lumpur tinja di IPLT Ngembak. Secara umum cakupan kepemilikan jamban keluarga yang memenuhi syarat (tangki septik) baru mencapai 71,77%. Hanya sebagian kecil saja yang sesuai standar (kedap) sisanya dicurigai merupakan cubluk karena tidak pernah dikuras (tidak kedap). Cubluk menurut spesifikasi teknik adalah jamban dengan 'tangki septik' yang terbuka pada bagian bawahnya.





Gambar 2-5 Sarana Pengangkutan Yang Dimiliki

Kondisi cakupan pelayanan Air Limbah (penyedotan tinja) untuk Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sangat minimal, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan tanki septic sesuai standar kesehatan, maka diperkirakan sedikit dari jumlah total penduduk Kabupaten Grobogan yang mampu dilayani. Untuk pelayanan pengangkutan tinja, sementara ini hanya dilayani oleh 2 mobil tinja, yaitu 1 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dan 1 mobil tinja swasta.

Tabel 2-11 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
(1)	(2)	(3)	(4)
	SPALD-S		
1	Sebutkan Nama IPLT	IPLT Ngembak	IPLT Ngembak
2	Status aset (pilih)		Serah Terima Oprasional
3	Kapasitas IPLT	M3/hari	21
4	Tahun pembangunan	tahun	2016
5	Tahun rehabilitasi	tahun	2017
	Wilayah Cakupan Pelayanan		Kabupaten Grobogan
6	Wilayah layanan terdekat	km	1
7	Wilayah layanan terjauh	km	43
	Deskripsi IPLT	Keterangan	
8	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
9	Kondisi IPLT	Kondisi baik, beroperasi tidak optimal	
10	Kualitas efluen (7 indikator)	Lihat standar	-Belum dilakukan uji kualitas efluen

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
12	Kondisi jalan akses	Akses IPLT (Aspal/Beton)	Kondisi jalan di IPLT (Perkerasan atau Tanah)

Sumber: DLH, 2021

Kabupaten Grobogan sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPLT ini bangun pada tahun 2016 di area TPA Ngembak. Jumlah personel yang bertugas dalam operasional IPLT berjumlah 2 (dua) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. IPLT Ngembak didesain mampu mengolah limbah lumpur tinja sebanyak 21 m³/hari. Jumlah ini hanya mampu melayani sekitar 15% dari jumlah penduduk Kabupaten Grobogan. Sistem Pengolahan lumpur tinja di IPLT Grobogan menggunakan rangkaian pengolahan fisik-biologis, dengan unit pengolahan tangki imhoff, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan bak pengering lumpur. Kondisi pelayanan di IPLT Ngembak belum optimal, dimana masih dijumpai kerusakan/retak bangunan pada beberapa bagian.





Gambar 2-6 Sarana Pengolahan IPLT

Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik

SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan dengan pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat (*decentralized wastewater treatment systems* -DEWATS) secara nasional melalui program SANIMAS ini. Sebagai program berbasis masyarakat, Sanimas mengusung prinsip-prinsip seperti: pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, air merupakan benda sosial dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya.

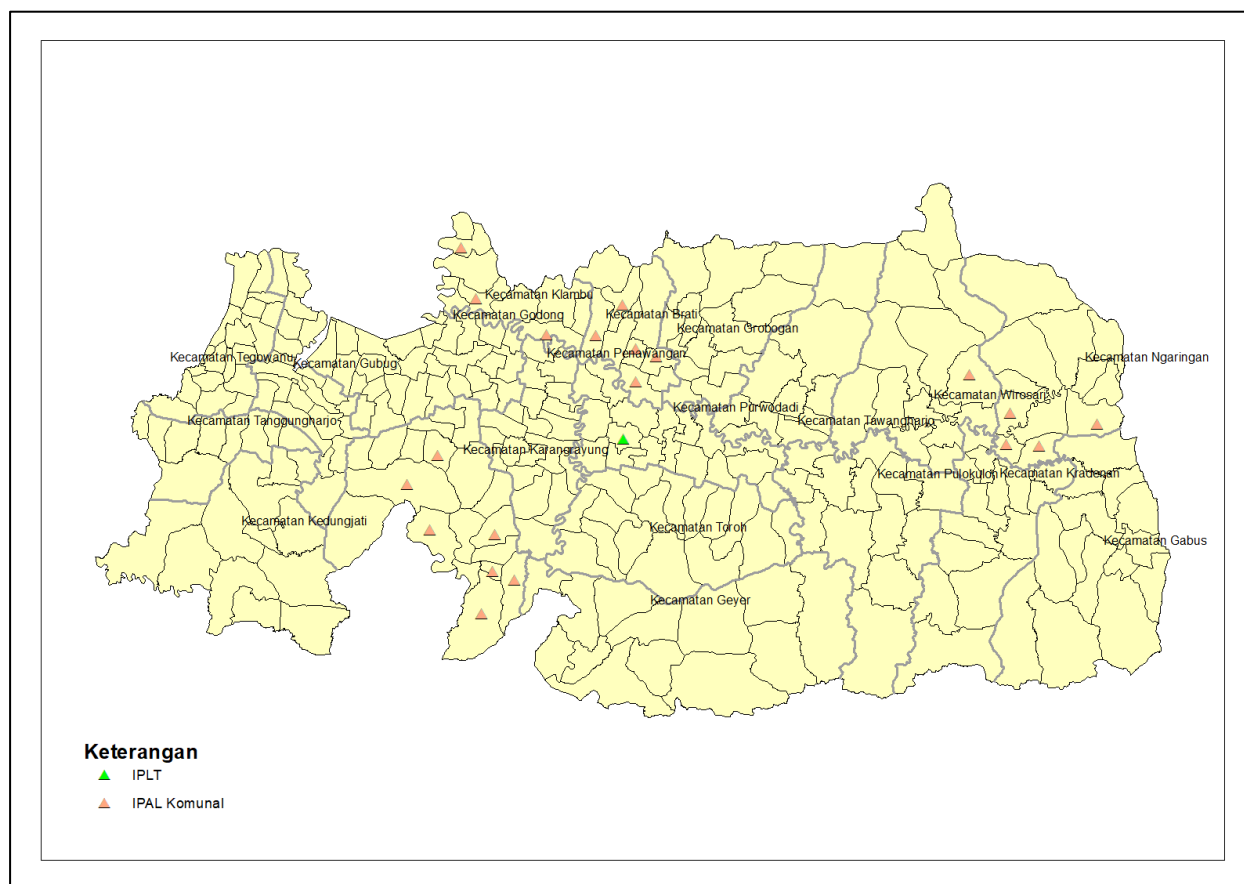
Tabel berikut menjelaskan sebaran IPAL Komunal dari Program Sanimas di Kabupaten Grobogan

Tabel 2-12 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Karangrayung	Ketro	Beroperasi
2	Karangrayung	Nampu	Beroperasi
3	Karangrayung	Dempel	Beroperasi
4	Karangrayung	Putatnganten	Beroperasi
5	Pulokulon	Mangunrejo	Beroperasi
6	Kradenan	Crewek	Beroperasi
7	Kradenan	Sambongbangi	Beroperasi
8	Kradenan	Sengonwetan	Beroperasi
9	Kradenan	Banjardowo	Beroperasi
10	Kradenan	Tanjungsari	Beroperasi
11	Gabus	Kalipang	Beroperasi
12	Gabus	Banjarejo	Beroperasi
13	Ngaringan	Sendangrejo	Beroperasi
14	Ngaringan	Sumberagung	Beroperasi
15	Wirosari	Kunden	Beroperasi
16	Wirosari	Wirosari	Beroperasi
17	Tawangharjo	Selo	Beroperasi
18	Grobogan	Getasrejo	Beroperasi
19	Grobogan	Grobogan	Beroperasi
20	Purwodadi	Danyang	Beroperasi
21	Purwodadi	Kalongan	Beroperasi
22	Purwodadi	Karanganyar	Beroperasi
23	Purwodadi	Purwodadi	Beroperasi
24	Purwodadi	Kuripan	Beroperasi
25	Brati	Temon	Beroperasi
26	Brati	Lemahputih	Beroperasi
27	Brati	Kronggen	Beroperasi
28	Klambu	Kandangrejo	Beroperasi
29	Klambu	Klambu	Tidak Beroperasi
30	Klambu	Jenengan	Beroperasi
31	Godong	Werdoyo	Beroperasi
32	Godong	Bringin	Beroperasi
33	Godong	Klampok	Beroperasi
34	Godong	Bugel	Beroperasi
35	Godong	Ketitang	Beroperasi
36	Godong	Harjowinangun	Beroperasi
37	Godong	Manggarmas	Beroperasi
38	Gubug	Kemiri	Beroperasi
39	Gubug	Kuwaron	Beroperasi
40	Tanggungharjo	Sugihmanik	Beroperasi

Sumber: Disperakim, 2021

Gambar berikut menginformasikan sebaran Lokasi IPLT dan IPAL Komunal di Kabupaten Grobogan



Gambar 2-7 Sebaran Lokasi IPLT dan IPAL Komunal

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

Capaian Akses Aman Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 13,4%, Akses Layak 82,0%, Belum Layak sebesar 18,5% dan BABS di Tempat Terbuka sudah tidak ada di Kabupaten Grobogan.. untuk mencapai target yang ingin dicapai sampai tahun 2024 ada beberapa gap yang harus dicapai berdasarkan target RPJMN 2020-2024 informasi Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah pada tabel berikut:

Tabel 2-13 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan			
1	Akses Aman	15%	20,0%	14,6%	14,1%	13,4%	1,2%	0,71%
2	Akses Layak	90%	95,0%	95,0%	90,0%	82,0%	13,0%	8,01%

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan			
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	65,9%	62,9%	58,6%	7,3%	4,26%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	11,5%	10,9%	9,3%	2,2%	1,64%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	3,0%	2,1%	0,7%	2,3%	1,40%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	9,5%	18,5%	-18,5%	-8,96%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,00%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

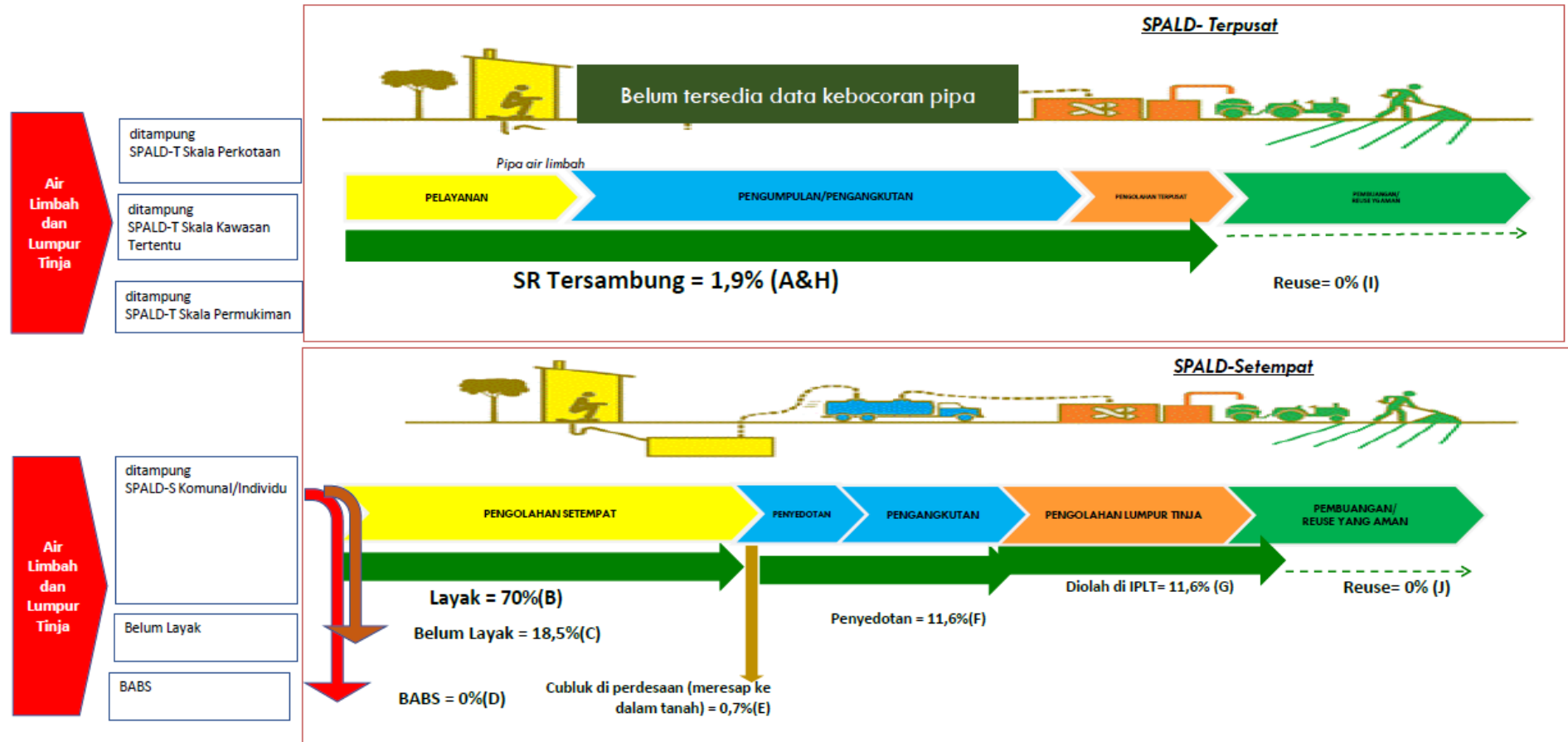
Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting:

Bagian ini memuat informasi tentang kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang telah dimiliki kabupaten Grobogan: Kapasitas Penggunaan IPLT sebesar 26,67%; Kapasitas penggunaan truk sebesar 26,67%; Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain) sebesar 50,00%; Kapasitas Truk tinja terhadap total RT sebesar 0,67%; Kapasitas IPLT terhadap total RT sebesar 0,34% dan Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman sebesar 100%.

Tabel 2-14 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting:

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	26,67%
Kapasitas penggunaan truk	26,67%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	50,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0,67%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0,34%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	

Sumber: Instrumen SSK, 2021



Sumber: Instrumen SSK, 2021

Gambar 2-8 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 2-15 Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan

Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	1,90%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	1,90%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0,00%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	70,00%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	18,50%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0,70%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	11,60%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	11,60%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0,00%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	0,00%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan layanan akses sistem air limbah domestik kabupaten Grobogan untuk Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat yaitu sebesar 1,90%; Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0) yaitu sebesar 1,90%; Persentase effluent terproses baik di IPAL yaitu sebesar 0,00%; Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak yaitu sebesar 70,00%; Persentase penduduk memiliki akses belum layak yaitu sebesar 18,50%; Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan yaitu sebesar 0,70%; Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut yaitu sebesar 11,60%; Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT yaitu sebesar 11,60%; Persentase effluent terproses baik di IPLT yaitu sebesar 0,00%; Persentase BABS (di tempat terbuka) yaitu sebesar 0,00%; Hal ini menunjukkan bahwa cakupan layanan sanitasi masih sangat rendah, sehingga perlu adanya peningkatan akses sanitasi berupa SPALD Terpusat dalam rangka pencapaian Akses Aman sanitasi

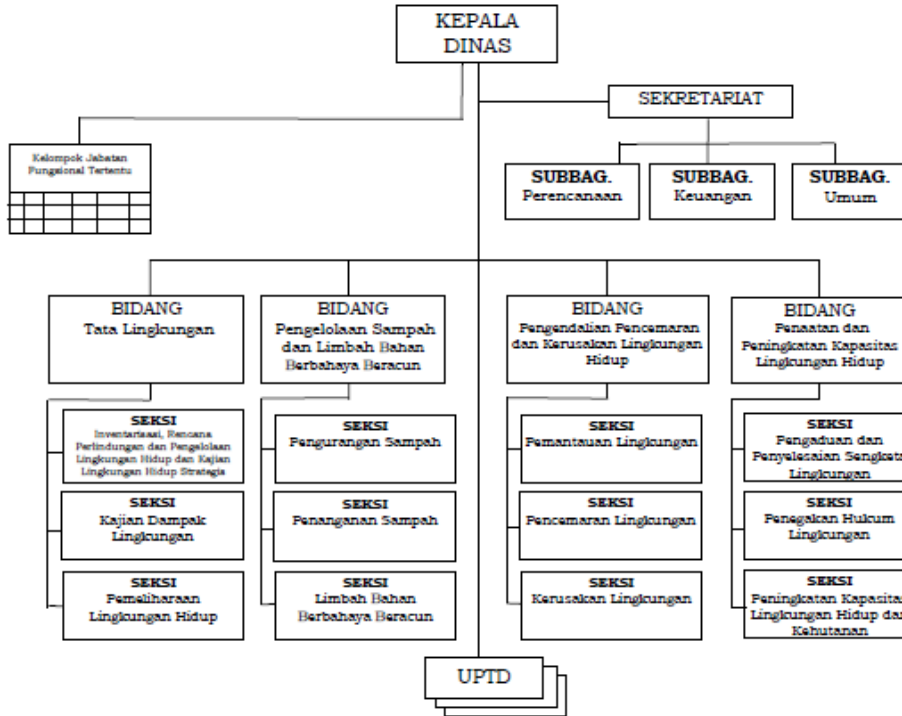
2.2.1.2 Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Lembaga atau dinas yang mengelola limbah cair di Kabupaten Grobogan adalah Dinas Lingkungan Hidup (IPLT) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (SPALD Setempat dan Terpusat). Dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang pengelolaan sanitasi khususnya limbah domestik. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor : 58 Tahun 2016
 Tanggal : 23 November 2016

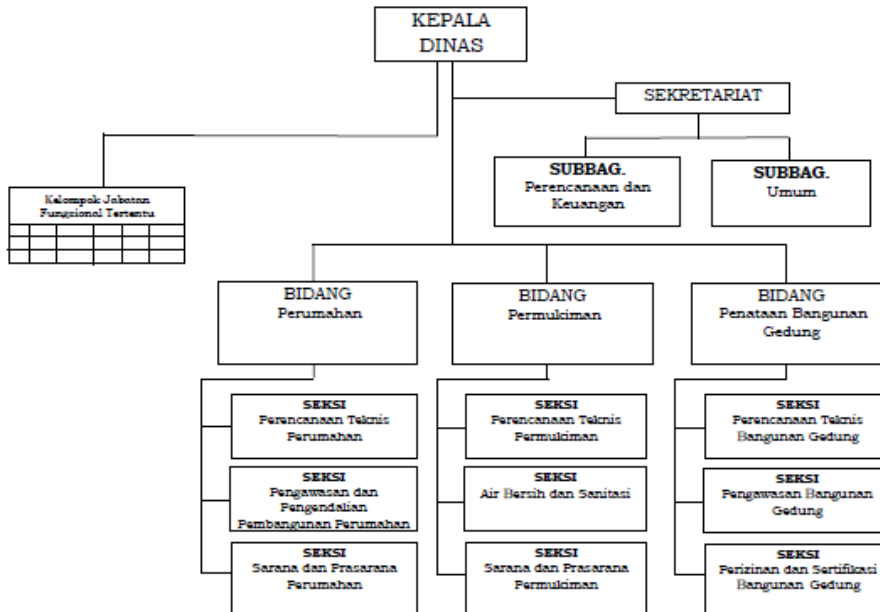
BAGAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 2-9 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor : 54 Tahun 2016
 Tanggal : 23 November 2016

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 2-10 Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2-16 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/ Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten	✓		
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	✓		
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	✓		
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic		✓	✓
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)		✓	✓
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	✓		
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	✓		
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	✓		
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	✓	✓	
Mengelola IPLT dan atau IPAL	✓	✓	✓
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	✓	✓	
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic	✓		
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	✓		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	✓		
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	✓		
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	✓		
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten	✓		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	✓		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	✓		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	✓		

Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah telah dibentuk KSM di masing masing desa/ kelurahan. Adapun jumlah KSM sejumlah 40 KSM yang tersebar di 40 lokasi yaitu sebagai berikut

Tabel 2-17 Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jumlah	Penerima Manfaat	Bidang	Sumber Dana Operasional	Status
1	Karangrayung	Ketro	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
2	Karangrayung	Nampu	5 Unit	50	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
3	Karangrayung	Dempel	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
4	Karangrayung	Putatnganten	4 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	3 Beroperasi, 1 Tidak Beroperasi
5	Pulokulon	Mangunrejo	1 Unit	70	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
6	Kradenan	Crewek	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
7	Kradenan	Sambongbangi	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
8	Kradenan	Sengonwetan	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
9	Kradenan	Banjardowo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
10	Kradenan	Tanjungsari	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
11	Gabus	Kalipang	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
12	Gabus	Banjarejo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
13	Ngaringan	Sendangrejo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
14	Ngaringan	Sumberagung	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
15	Wirosari	Kunden	2 Unit	171	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
16	Wirosari	Kelurahan Wirosari	1 Unit	80	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
17	Tawangharjo	Selo	5 Unit	35	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
18	Grobogan	Getasrejo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
19	Grobogan	Kelurahan Grobogan	2 Unit	75	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
20	Purwodadi	Danyang	1 Unit	87	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
21	Purwodadi	Kalongan	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jumlah	Penerima Manfaat	Bidang	Sumber Dana Operasional	Status
22	Purwodadi	Karanganyar	2 Unit	163	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
23	Purwodadi	Kelurahan Purwodadi	1 Unit	74	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
24	Purwodadi	Kelurahan Kuripan	1 Unit	85	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
25	Brati	Temon	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
26	Brati	Lemahputih	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
27	Brati	Kronggen	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
28	Klambu	Kandangrejo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
29	Klambu	Klambu	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Tidak Beroperasi
30	Klambu	Jenengan	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
31	Godong	Werdoyo	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
32	Godong	Bringin	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
33	Godong	Klampok	1 Unit	75	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
34	Godong	Bugel	1 Unit	119	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
35	Godong	Ketitang	6 Unit	44	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
36	Godong	Harjowinangun	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
37	Godong	Manggarmas	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
38	Gubug	Kemiri	6 Unit	48	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
39	Gubug	Kuwaron	3 Unit	75	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi
40	Tanggungharjo	Sugihmanik	1 Unit	100	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Iuran Warga	Beroperasi

Sumber: Disperakim, 2021

Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Identifikasi peran dan pengaruh pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) penjelasan ringkas mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik seperti swasta, BUMD/BUMN.

- Kepentingan: tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi

- Kekuatan/Sumberdaya: tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

Tabel 2-18 Target Advokasi dan Komunikasi : Pokja, Kepala OPD, Kepala Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER 	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes:	Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi desa dalam pembangunan sanitasi	Memaksimalkan potensi desa
Organisasi Massa (Ormas):	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF	Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist
Tokoh Masyarakat:	Pranata sosial (sistem, nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sanitasi dalam kehidupan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulan dalam penanganan permasalahan sanitasi - Potensi / sumber penanganan masalah sanitasi

Selanjutnya matriks di atas diperinci lebih lanjut ke dalam matriks “Kontribusi, Legitimasi, Kesiadaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan” berikut:

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesiadaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah 	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Pengusaha / Swasta:	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
BUMDes	Pembinaan dan pengawasan sehingga bahwa urusan pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi tetap terkendali ditingkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa. 	Sedang	Sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas): Baznas	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): Forum Dai Sanitasi	Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Tinggi	Sedang	Ya
Tokoh Masyarakat:	Pranata sosial (sistem, nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sanitasi dalam kehidupan masyarakat)		Sedang	Sedang	Ya

- Kontribusi (nilai): Apa yang sudah dilakukan dalam mendukung kegiatan terkait sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) kondisi eksisting.
- Legitimasi: Seberapa sahkah para pemangku kepentingan untuk mendapatkan keterlibatan? Tuliskan dasar aturan dan atau ketentuan yang mengaturnya
- Kesiediaan untuk terlibat: seberapa besar keinginan para pemangku kepentingan untuk terlibat? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat kesediaannya dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH
- Pengaruh: seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat pengaruhnya terhadap kesuksesan program dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH
- Perlunya keterlibatan: apakah merupakan seseorang/lembaga yang dapat menggagalkan atau mendelegitimasi proses jika mereka tidak termasuk dalam pengelolaan program?

Regulasi

Bagian di bawah ini berisi tabel yang memberikan penjelasan ringkas mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik yang telah ada di Kabupaten Grobogan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tabel 2-19 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Bupati Grobogan Nomor	

		16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T		
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi		
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan		
d	Substansi pembinaan dan pengawasan		
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	
6	Sebutkan semua turunan tentang Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1.	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	

2.2.1.3 Komunikasi dan Media

Studi media merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PKP Kabupaten Grobogan dalam rangka melengkapi data untuk buku putih. Studi media dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya
2. Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemda dan peluang-peluang kerjasama dengan media massa
3. Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya
4. Mendapatkan informasi mengenai konsumsi dan preferensi media dan kegiatan- kegiatan kemasyarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi.

Tabel 2-20 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Mulai Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci
1	Sosialisasi SLBM untuk desa-desa yang mendapat DAK Sanitasi	2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan	Mengetahui kebutuhan masyarakat bidang DAK Sanitasi	Masyarakat	Buang Air Besar pada tempatnya. Perencanaan dan pelaksanaan fisik oleh masyarakat
2	Penyuluhan Langsung dan menggunakan media cetak elektronik dan Lomba PHBS Tingkat Kabupaten	2020	Dinas Kesehatan Kab. Grobogan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Masyarakat	Sanitasi dasar dalam rumah tangga
3	Pemicuan STBM dan Pemasaran Sanitasi	2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Grobogan	Sosialisasi program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Masyarakat Lokasi Sasaran	Stop BABS dan CTPS
4	Sosialisasi perubahan perilaku BABS, CTPS dan PHBS	2020	Dispermasdes Kab. Grobogan	Merubah prilaku masyarakat terkait dengan BABS, CTPS dan PHBS	Masyarakat pedesaan	Keikutsertaan masyarakat dalam program BABS, CTPS dan PHBS
5	Sosialisasi Grobogan Peduli Sanitasi	2020	Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Grobogan	Meningkatkan pemahaman akan pentingnya sanitasi di masyarakat dan pemangku kepentingan	Masyarakat Kabupaten Grobogan	Program BABS, CTPS dan PHBS

Tabel 2-21 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No	Nama Media	Jenis Acara	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Pendapat Media
1	jatengprov.go.id	Grobogan Raih Dua Penghargaan STBM Nasional	Pertama, penghargaan STBM berkelanjutan sebagai kabupaten ODF atau Open Defecation Free (Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan) tingkat nasional. Kemudian, penghargaan Sanitarian Berprestasi tingkat nasional yang diraih Arif Rahman dari Puskesmas Gubug I.	Grobogan mampu mencapai kabupaten STBM utama yang menjalankan lima pilar STBM	verifikasi STBM ini menjadi upaya untuk memastikan perubahan perilaku masyarakat seperti tidak buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga untuk memutus rantai penularan penyakit menular.

No	Nama Media	Jenis Acara	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Pendapat Media
2	bappeda.grobogan.go.id	Ujicoba Atasi Stunting	percepatan penurunan angka prevalensi angka stunting di kabupaten grobogan	ketersediaan database yang akurat dan kecepatan akses informasi menjadi kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi	Aplikasi Terintegrasi Penanganan Stunting yang di singkat ATASI STUNTING
3	jatengprov.go.id	Bantuan Jamban	memberikan bantuan jamban kepada warga yang membutuhkan	mengedukasi masyarakat untuk tidak BAB sembarangan. "Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) golnya perubahan perilaku masyarakat dari BABS menjadi stop buang air besar sembarangan. Sehingga lingkungan lebih bersih lebih sehat,	Urusan BAB bisa terselesaikan di jamban baru
4	dinkes.grobogan.go.id/	Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan terus menargetkan peningkatan kualitas jamban	peningkatan kualitas jamban penting dilakukan. Sebab masih banyak masyarakat yang memakai jamban semi permanen maupun sharing, yakni numpang ke tetangga	merubah perilaku masyarakat dalam peningkatan akses sanitasi layak ini. Terpenting bisa berubah mindset agar tak kembali BABS ke bantaran sungai. Serta menggunakan akses semi permanen karena dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat	suksesnya Bebas BABS utamanya harus didukung dengan perubahan perilaku dari masyarakat sendiri. Utamanya melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2.2.2 Pengelolaan Sampah

Sampah di Kabupaten Grobogan berasal dari 1) perumahan 2) kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya (non patogen), gedung umum lainnya 3) pasar, pertokoan, restoran 4) pabrik/industri yang sejenisnya dengan sampah permukiman (tidak berbahaya dan beracun), 5) penyapuan jalan, taman, lapangan 6) pemotongan hewan, kandang hewan, 7) bongkaran bangunan 8) instalasi pengolahan sampah. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk / hancur) secara alami. Sebaliknya sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain tidak dapat terdegradasi secara alami. Sampah terbanyak dihasilkan dari permukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar khusus seperti sayur mayur dan buah-buahan, jenisnya relatif seragam, sebagian besar berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari permukiman umumnya sangat beragam dan terjadi pencampuran antara sampah organik dan anorganik, walaupun secara umum paling banyak sampah organik.

Tabel 2-22 Matrik Sandingan SSK Sub Sektor Pengelolaan Persampahan

SSK Kab. Grobogan 2017-2021			SSK Kab. Grobogan 2022 - 2026
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Peningkatan sampah wilayah perkotaan yang dapat terangkut/ dikelola di TPA menjadi 80% di tahun 2021	Jumlah penduduk yang dilayani pengelolaan persampahan di Perkotaan dari 57% menjadi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pelayanan persampahan sebesar 18,4% • Jumlah TPS di Kabupaten Grobogan sebanyak 23 TPS • TPS3R di Kabupaten Grobogan sebanyak 8 Unit • Bank Sampah di Kabupaten Grobogan Sebanyak 218 Bank Sampah • Sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan terdiri dari 98 gerobak, 18 unit motor roda tiga, 4 Dump Truck, 6 Arm Roll Truck, 1 Bulldozer, 1 Excavator dan 1 TPA.
	Penyediaan sarana prasarana TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) di 6 (enam) ibu kota kecamatan pada tahun 2021	Jumlah TPST di Kabupaten Grobogan	
Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan	Penetapan Perda dan Perbup yang mengatur pedoman teknis tentang pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana persampahan pada Tahun 2021.	Tersusunnya Perda	
	Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola dalam penerapan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat	Jumlah personil yang terampil dalam pengelolaan persampahan.	

SSK Kab. Grobogan 2017-2021			SSK Kab. Grobogan 2022 - 2026
Tujuan	Sasaran	Data Dasar	Status Saat Ini
Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga dari 1,7 % menjadi 5% pada tahun 2021	masyarakat melakukan pengolahan sampah menjadi 5%.	<ul style="list-style-type: none"> Sampah yang masuk ke TPS3R sebesar 9.040 kg dari jumlah timbulan sampah total sebesar 306.547,32 ton/tahun pada tahun 2020.
	Terbentuknya dan terbinanya kelompok pengelola sarana prasarana persampahan di lingkungan permukiman dan sekolah.	19 kelompok pengelola persampahan di 19 Ibu Kota Kecamatan (IKK).	
Pengembangan alternatif sumber pendanaan	Meningkatnya jumlah dana dari APBD Propinsi dan APBN sebesar 10 Milyar dalam peningkatan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2021.	Jumlah Dana dari APBD-Propinsi/APBN	
	Meningkatnya dana CSR dan investasi sektor swasta dalam pengelolaan persampahan	Jumlah dana baik in cash/in kind dalam pengelolaan persampahan.	

2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

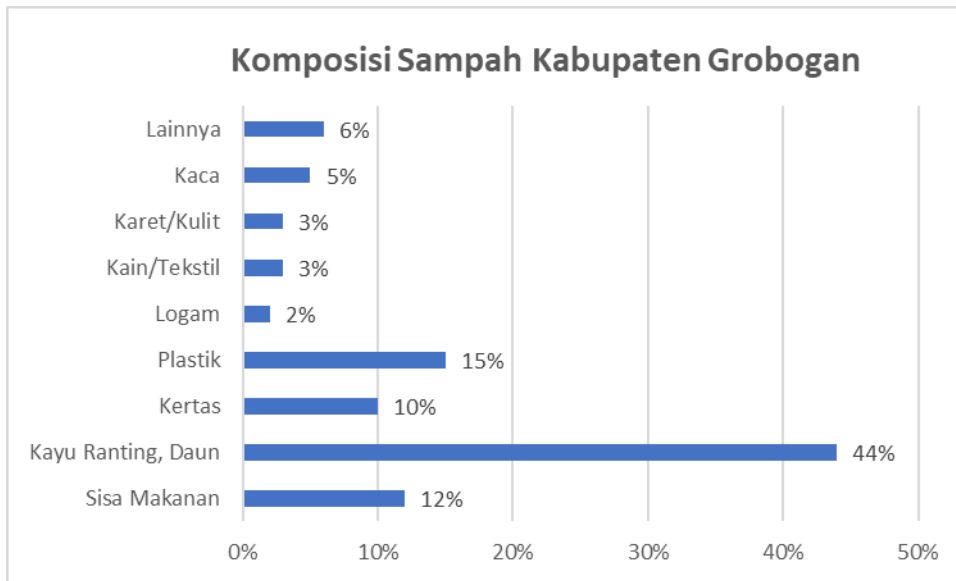
Komposisi timbulan sampah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-23 Sistem dan infrastruktur

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Wilayah Perkotaan	
1	Pengurangan Sampah	7,0%
2	Penanganan Sampah	9,4%
3	Sampah Tidak Terkelola	34,8%
	Wilayah Perdesaan	
1	Pengurangan Sampah	2,7%
2	Penanganan Sampah	9,9%
3	Sampah Tidak Terkelola	36,3%
	T O T A L	100,0%

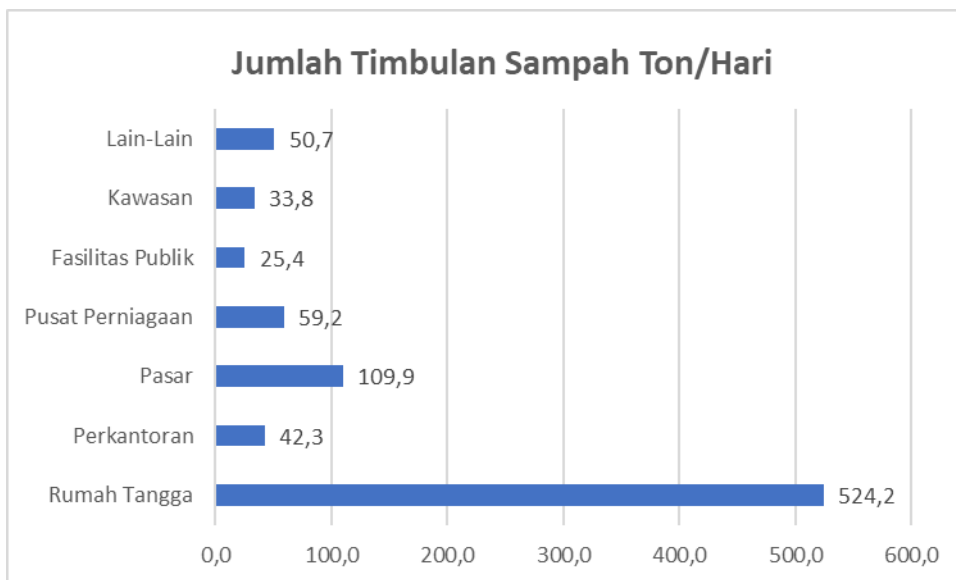
Sumber: Instrumen SSK, 2021

Cakupan layanan eksisting (%) untuk Wilayah Perkotaan untuk Pengurangan Sampah sebesar 7,0%; Penanganan Sampah sebesar 9,4% dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 34,8%. Pelayanan Wilayah Perdesaan untuk Pengurangan Sampah sebesar 2,7%; Penanganan Sampah sebesar 9,9% dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 36,3%



Sumber: DLH, 2021

Gambar 2-11 Kompoisasi Sampah Kabupaten Grobogan



Sumber: DLH, 2021

Gambar 2-12 Jumlah Timbulan Sampah

Pengumpulan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah timbulan sampah paling besar yaitu di Rumah tangga yaitu sebanyak 524,4 Ton/hari. Pola pengumpulan sampah di Kabupaten Grobogan sebagian besar dilakukan di TPS. TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah

buangan dari masyarakat. Sampah dari TPS berasal dari sampah hasil pengangkutan gerobak yang kemudian diangkut menuju TPA. Pada beberapa daerah yang padat penduduknya TPS sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terangkut, dan bila terdekomposisi akan menimbulkan bau dan akan mengundang lalat.

TPS yang tersedia di Kabupaten Grobogan berjumlah 23 unit, umumnya kondisinya memerlukan perbaikan fisik dan peningkatan operasional berupa pengaturan jadwal pembuangan dan pengangkutan, sehingga jangka waktu penumpukan sampahnya tertentu. Hampir seluruh TPS , sehingga saat hujan sampah tercampur dengan air, yang dapat menimbulkan bau dan terjadi kontaminasi air hujan oleh sampah, yang mengalir di sepanjang jalan. Sedangkan jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST sistem 3R) di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 8 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Keberadaanya cukup efektif untuk mereduksi sampah sampai ke TPA. Disamping itu masyarakat juga terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampahnya sendiri, sehingga sampah organik dan anorganik dapat diolah dengan baik dan bernilai ekonomis. Pengumpulan persampahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Tabel 2-24 Pengumpulan Sampah

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Jumlah gerobak/ motor/becak	Unit	Gerobak: 98 Motor roda tiga:18
2	Kapasitas angkut (total)	M3/unit	Gerobak: 0,4 Motor roda tiga:0,7
3	Ritase	Rit/hari	Gerobak: 2 kali Motor roda tiga: 2 kali

Sumber: DLH, 2021





Gambar 2-13 sarana pengumpulan yang dimiliki

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Tabel 2-25 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Jumlah TPS (bak biasa, container, yang lainnya ...)	Unit	Transfer depo: TPS: Kontainer: Tong sampah pejalan kaki:
2	Kapasitas TPS	M3/unit	TPS: Kontainer:
3	Jumlah dump truck, arm roll, compactor	Unit	Dumptruck: 4 Armroll truck: 6 Compactor truck: -
4	Kapasitas dump truck, arm roll, compactor	M3/unit	Dumptruck: 8 Armroll truck: 6 Compactor truck: -
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	Dumptruck: 4 Armroll truck: 6

Sumber: DLH, 2021





Gambar 2-14 sarana pengangkutan yang dimiliki:

Pengolahan



Gambar 2-15 TPS 3R Mekar Sari

Tabel 2-26 TPS3R

No	Nama TPS 3R	Alamat Lengkap	Luas Bangunan TPS 3R (m2)	Jumlah Layanan	Tahun Pembangunan	Instansi yang Membangun	Sumber Anggaran	Pengelola **)
1	Mekar sari	Kel. Danyang Kec. Purwodadi	200	854 KK	2015	Satket PLP Jateng	APBD I	KSM
2	Belik Sari	Ds. Klambu Kec. Klambu	200	600 KK	2016	Satket PLP Jateng	APBD I	KSM
3	Mugi Lancar	Ds. Getasrejo Kec. Grobogan	120	583 KK	2017	DLH Kab Grob	APBD	KSM
4	Ngudi Resik	Ds. Sulursari Kec. Gabus	120	175 KK	2018	DLH Kab Grob	APBD	KSM
5	Ngudi Peni	Ds. Kunden Kec. Wirosari	120	220 KK	2018	DLH Kab Grob	APBD	KSM
6	Alam Sejahtera	Ds. Kronggen Kec. Brati		200KK	2021	DLH Kab Grob	APBD	KSM
7	Kuariron Jaya	Ds. Kuwaron Kec. Gubug		200KK	2021	DLH Kab Grob	APBD	KSM
8	Pulokulon Maju	Ds. Pulokulon Kec. Pulokulon		44KK	2021	Satket PLP Jateng	APBD 1	KSM

No	Nama TPS 3R	Alamat Lengkap	Luas Bangunan TPS 3R (m2)	Jumlah Layanan	Tahun Pembangunan	Instansi yang Membangun	Sumber Anggaran	Pengelola (**)
	JUMLAH			2.432				

Sumber: DLH, 2021

Tabel 2-27 TPS/Landasan Countainer

No	TPS/Landasan Countainer	Pemilik	Lokasi	Titik koordinat	luas (m2)	timbunan sampah ton/hari
1	Pasar Danyang	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Danyang	7.113937, 110.911247	63	3,9
2	Pasar Hortikultura	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Purwodadi	7.092378, 110.904564	63	4,2
3	Pasar Nglejok	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Kuripan	7.077392, 110.888938	72	3,5
4	Pasar Purwodadi	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Purwodadi	7.082026, 110.911032	63	4
5	RSUD dr Soedjati	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Purwodadi	7.082711, 110.921014	63	1,5
6	KSM Bendo	Pemkab. Grob (DLH)	Desa Getas Rejo	7.072992, 110.927702	400	1,6
7	Pasar Grobogan	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Grobogan	7.021897, 110.922913	63	1,2
8	Perum pondok Asri grobogan	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. grobogan	7.019989, 110.917901	63	1
9	Pasar Godong	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Godong	7.021900, 110.769741	63	3,4
10	Karanganyar Godong	Pemkab. Grob (DLH)	Desa karangnyar, Godong	7.038207, 110.771809	63	1,5
11	Pasar Gubug	Pemkab. Grob (DLH)	Desa Gubug	7.055218, 110.670090	63	2
12	Daplang gubug	BBWS Jateng	Daplang, Gubug	7.050700, 110.640744	400	4
13	Terminal Induk Pwdd	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. purwodadi	7.080834, 110.890807	63	1
14	Pasar Wirosari	Pemkab. Grob (DLH)	Wirosari	7.077573, 111.091487	63	3,4
15	Pasar hortikultua sebelah timur	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. purwodadi	7.092170, 110.903762	63	1,7
16	Pasar Kuwu	Pemkab. Grob (DLH)	Desa kuwu	7.122908, 111.129357	63	3,2
17	Danyang 3R	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. danyang	7.113937, 110.911247	400	2,1
18	Kunden Wirosari	Pemkab. Grob (DLH)	Kunden, Wirosari	7.076729, 111.081654	63	0,9

No	TPS/Landasan Countainer	Pemilik	Lokasi	Titik koordinat	luas (m2)	timbunan sampah ton/hari
19	RSI	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Kalongan	7.095074, 110.917162	63	0,8
20	Pasar Tegowanu	Pemkab. Grob (DLH)	Tegowanu	7.049147, 110.599144	63	1
21	TPS Plendungan	Pemkab. Grob (DLH)	Kel. Purwodadi	7.086207, 110.909114	400	15
22	TPS Klambu	Pemkab. Grob (DLH)	desa Klambu	7.002822, 110.793861	400	0,4
23	TPS Wirosari	Pemkab. Grob (DLH)	Wirosari	7.082089, 111.106021	400	3,8

Sumber: DLH, 2021



Gambar 2-16 Sebaran TPS

Tabel 2-28 Bank Sampah

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
1	Induk Bersemi	Jl.Paramedis Simpang Lima	Purwodadi	2018

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
2	Kepodang	Jl.Kepodang	Purwodadi	2018
3	Buncis	Jl.Paramedis Simpang Lima	Purwodadi	2018
4	Rizqi	Jl.USuropatiPwd	Purwodadi	2018
5	Sejahtera Mandiri	RW.01 Jajar	Purwodad	2018
6	Bougenfil	Perum RSH	Purwodadi	2018
7	Mapan Indah	Perum RSS	Purwodadi	2018
8	Mekarsari	Danyang	Purwodadi	2018
9	Karya Sejahtera	Ngembak	Purwodadi	2018
10	Tanjung Bersinar	Dsn.Tanjungan	Purwodadi	2018
11	Sumber Rizki	Nglobar	Purwodadi	2018
12	Noor Cahaya	Candisari	Purwodadi	2018
14	Srikandi	Cingkrong	Purwodadi	2018
15	Bina Sejahtera	Genuksuran	Purwodadi	2018
16	Gumilar	Ds.Pulorejo	Purwodadi	2018
18	Mukti Raharjo	Nambuhan	Purwodadi	2018
19	Bahagia	Menjanganan	Purwodadi	2018
20	Bahagia	Ngraji	Purwodadi	2018
21	Sumber Rejeki	Dsn.Pancan	Purwodadi	2018
22	Sindu Bersih	Sindurejo	Toroh	2018
23	Sumber Rejeki	Sindurejo	Toroh	2018
24	Tulus Sejati	Sindurejo	Toroh	2018
27	Berkah Indah	Tambirejo	Toroh	2018
28	Bina Lingkungan	Boloh	Toroh	2018
29	Wijaya Kusuma	Sugihan	Toroh	2018
30	Mekarsari	Dsn.Ketanggan	Toroh	2018
31	Lestari	Dsn.Ngloram	Toroh	2018
32	Berkah	Pilang payung	Toroh	2018
33	Sampah Barokah	Krangganharjo	Toroh	2018
34	Srikandi Pandekan	Ds.Dimoro	Toroh	2018
35	Sejahtera	Kalangbancar	Geyer	2018
36	Berkah Jaya	Ds Sobo	Geyer	2018
37	Pucang Berdaya	Grobogan	Grobogan	2018
38	Anggrek	Metuk RT.02	Brati	2018
39	Mawar	Lemah putih	Brati	2018
40	Melati	Lemah putih	Brati	2018
41	Anggrek	Mlakas	Brati	2018
42	Dahlia	Kepuhrubuh	Brati	2018
43	Lestari	RT.07/03	Brati	2018
44	Lestari 2	RT.09/04	Brati	2018
45	Mitra Sejahtera	Kronggen	Brati	2018
46	Sumber Rezeki	Dsn Limberejo	Brati	2018
47	Mekar Asri	Ds. Karang Sari	Brati	2018
48	Mentari	Ds.Temon	Brati	2018

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
49	Makmur	Kepuh Rubuh	Brati	2018
50	Sekar Wangi	Klambu	Klambu	2018
51	Arto Moro	Ds. Selojari	Klambu	2018
52	Menawan Hati 1	Menawan	Klambu	2018
53	Menawan Hati 2	Pesantren	Klambu	2018
54	Menawan Hati 3	Sambung	Klambu	2018
55	Menawan Hati 4	Kayumas	Klambu	2018
56	Melati	Terkesi Selatan	Klambu	2018
57	Dahlia	Terkesi Utara	Klambu	2018
58	Kenanga	Beran	Klambu	2018
59	Naga	Klampok	Godong	2018
60	Manggis	Klampok	Godong	2018
61	Jambu	Klampok	Godong	2018
62	Durian	Klampok	Godong	2018
63	Mangga	Klampok	Godong	2018
64	Melati	Rw1 Sumber	Godong	2018
65	Anggrek	Karanganyar	Godong	2018
66	Tunas Muda	Ds Ketitang	Godong	2018
67	Sumber Rezeki	Gundi	Godong	2018
68	Aji Sampah	Ds.Ketitang	Godong	2018
69	Sekar Asri	Ds.Harjowinangn	Godong	2018
70	Sri Rezeki	Ds.Bringin	Godong	2018
71	SMPN 1 Godong	Ds. Godong	Godong	2018
72	Mawar	Rw 3 Jetis	Godong	2018
73	Arum Sari 3	Dsn.Larangan	Karangrayung	2018
74	Sido Maju	Limberejo	Karangrayung	2018
75	Teratai Indah	Termas	Karangrayung	2018
76	Makmur Sejahtera	Temurejo	Karangrayung	2018
77	Al Barokah	Putatnganten	Karangrayung	2018
78	Maju Makmur	Dempel	Karangrayung	2018
79	Barokah	Penawangan	Penawangan	2018
80	Ben Makmur	Ds.Kuwaron	Gubug	2018
81	Barokah	Kuwaron	Gubug	2018
82	Nusa Indah	Kuwaron	Gubug	2018
83	Tunas Muda	Ds. Gelapan	Gubug	2018
84	Sejahtera	Ds. Mlilir	Gubug	2018
85	Manfaat	Baturagung	Gubug	2018
86	Anggrek	Tambakan	Gubug	2018
87	SMA Futuhiyah	Ketro	Gubug	2018
88	PlosoBersih	Ploso	Gubug	2018
89	TembelanganBersih	Tembelangan	Gubug	2018
90	KuniranBersih	Kuniran	Gubug	2018
91	Kartini	Gebangan	Tegowanu	2018

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
92	Gilar gilar	Sukorejo	Tegowanu	2018
93	Sehat Sejahtera	Ds.Kejawan	Tegowanu	2018
94	Srikandi	Ds.Tanggirejo	Tegowanu	2018
95	KridaManik	Sugihmanik	Tanggunharjo	2018
96	Padang Jingrang	Ds. Padang	Tanggunharjo	2018
97	Berkah	Ds.Wates	Kedungjati	2018
98	Barokah	Ds.Panimbo	Kedungjati	2018
99	Sampah Barokah	PP Mathollul A.	Tawangharjo	2018
100	An Nandhofatu	PP Al Hidayah	Tawangharjo	2018
101	Al Misykah	PP Misykah	Tawangharjo	2018
102	Flamboyan	Dsn Jangkung	Tawangharjo	2018
103	Dahlia	Dsn Sobo	Tawangharjo	2018
104	Anggrek	Dsn Pucang	Tawangharjo	2018
105	Mawar	Dsn Bolu	Tawangharjo	2018
106	Sania	Dsn Karangpung	Tawangharjo	2018
107	Asri	Dsn Kayen	Tawangharjo	2018
108	Eva Jaya	Dsn Ngasinan	Tawangharjo	2018
109	Anggrek	Dsn Pojok	Tawangharjo	2018
110	Berkah	Dsn Sedah	Tawangharjo	2018
111	Mawar	Dsn Karanggetas	Tawangharjo	2018
112	Ayom Ayam	Dsn Godan Brt	Tawangharjo	2018
113	Bunga Matahari	Dsn Godan Tmr	Tawangharjo	2018
114	Mawar Melati	Dsn Nanjungan	Tawangharjo	2018
115	Melati	Dsn Karangasem	Tawangharjo	2018
116	Melati	Dsn Srongong	Tawangharjo	2018
117	Arimbi	Dsn Trisik	Tawangharjo	2018
118	Sri Rejeki	Dsn Tarub	Tawangharjo	2018
119	Maju Jaya	Dsn Barahan	Tawangharjo	2018
120	Barokah	Ds.Belor	Ngaringan	2018
121	Dokoro Bersemi	Ds Dokoro	Wirosari	2018
122	Pertiwi bersih	Dsn Ngaronan	Wirosari	2018
123	Santoso Sehat	Dsn beku	Wirosari	2018
124	Buncis	Dsn Fateh	wirosari	2018
125	Lestari	Dsn Krajan	Wirosari	2018
126	Basuki	Dsn Angkatan	Wirosari	2018
127	Margi Widodo	Dsn Tambak	Wirosari	2018
128	Jurang Perahu	KrajanRT 7 RW 2	Wirosari	2018
129	Sarif Indah	Dsn Sarif	Wirosari	2018
130	Margi Rahayu	Dsn Geng-Geng	Wirosari	2018
131	Mekar Jaya	Ds Tegalrejo	Wirosari	2018
132	Berkah Mandiri	Ds Tegalrejo	Wirosari	2018
133	Lestari	Tambak Rejo	Wirosari	2018
134	Ngudi Peni	Kunden	Wirosari	2018

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
135	Mugi Berkah	Kunden	Wirosari	2018
136	Melati	Dapurno	Wirosari	2018
137	Berkah	Dsn Pojok	Wirosari	2018
138	Rapi	Ds.Kropak	Wirosari	2018
139	Sampah Berkah	Welahan 02/08	Wirosari	2018
140	Karya Jadi	Krajan	Wirosari	2018
141	Karya Sampah	Ragem	Wirosari	2018
142	Tumpak Jaya Baru	Tambak Selo	Wirosari	2018
143	Sido rukun	Dsn Kenteng	Wirosari	2018
144	Sido Mulyo	Dsn Wonorejo	wirosari	2018
145	Tirto Asri	Bangsri	Wirosari	2018
146	Sido Rahayu	Dsn jatitengah	Wirosari	2018
147	Berkah Abadi	Mlowokrgtalun	Pulokulon	2018
148	Pertiwi	Dsn Gangin	Pulokulon	2018
149	Berkah Jaya	Dsn Pelem	Pulokulon	2018
150	Melati	Dsn Kembangan	Pulokulon	2018
151	Negri Kembang	Pulokulon	Pulokulon	2018
152	PKH Mawar 1	Tuko	Pulokulon	2018
153	PKH Mawar 2	Tuko	Pulokulon	2018
154	PKH Mawar 3	Tuko	Pulokulon	2018
155	PKH Mawar 4	Tuko	Pulokulon	2018
156	Ben Berkah	Tuko	Pulokulon	2018
157	PKH Cempaka 1	Sugihan	Pulokulon	2018
158	PKH Cempaka 2	Sugihan	Pulokulon	2018
159	PKH Cempaka 3	Sugihan	Pulokulon	2018
160	PKH Cempaka 4	Sugihan	Pulokulon	2018
161	PKH Anggrek 2	Sendang	Pulokulon	2018
162	Mawar	RT 05/02 Pojok	Pulokulon	2018
163	NgalapBerkah	Grabagan	Kradenan	2018
164	Mugi Barokah	Dsn.Kembangan	Kradenan	2018
165	Barokah	Ds.Bago	Kradenan	2018
166	Sumber Resik	Tunggulrejo	Gabus	2018
167	Sekar	Pandanharum	Gabus	2018
168	Al Makmur Putra	Pandanharum	Gabus	2018
169	Bendoharjo	Bendoharjo	Gabus	2018
170	Sumber Makmur	Dsn Wonorejo	Gabus	2018
171	Berkah	Dsn Nglejok	Gabus	2018
172	Sumber Rejeki	Dsn.Ngasem	Gabus	2018
173	Sampah Berkah	Dsn Pelem	Gabus	2018
174	Suko Maju	Ds Keyongan	Gabus	2018
175	Tirto Resik	Tlogotirto	Gabus	2018
176	Sumber Resik	Ds. Karangrejo	Gabus	2018
177	Kampung Purba	Banjarejo	Gabus	2018

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
178	Barokah	Gabus	Gabus	2018
179	Anggur Merah	Ds.Nglinduk	Gabus	2018
180	Sekar Indah	Kedungrejo	Purwodadi	2019
181	Sido mukti	Sindurejo	Toroh	2019
182	Toroh Sehat	Sindurejo	Toroh	2019
183	Ngudi Berkah	Tambirejo	Toroh	2019
184	Kramat Jaya	Dsn.Tunggak 1	Toroh	2019
185	Melati	Depok	Toroh	2019
186	Sehati	Depok Selatan	Toroh	2019
187	Berkah Jaya	Depok	Toroh	2019
188	Sido Makmur	Bandungharjo	Toroh	2019
189	Katong Asri	Katong	Toroh	2019
190	Srikandi Kuwojo Dimoro	Dsn.Kuwojo	Toroh	2019
191	Srikandi Krajan Dimoro	Dimoro	Toroh	2019
192	Srikandi Kuto	Ds.Kuto	Toroh	2019
193	Risky Sejahtera	Dsn.Wonorejo	Geyer	2019
194	NT Darling Prima	Grobogan	Grobogan	2019
195	Jatipohon bersih	Jl.Raya Pati pwd	Grobogan	2019
196	Sekar Melati	Rt.05/Rw.01	Brati	2019
197	Jagan Mandiri	Ds Taruman	Klambu	2019
198	Barokah	Tegalrejo/rajak	Godong	2019
199	Maju bersama	Rajak/godong	Godong	2019
200	Penadaran	Ds.Pandanaran	Gubug	2019
201	Sumber Urip	Tlogomulyo	Gubug	2019
202	Maju Sejahtera	Jatipecaron	Gubug	2019
203	Bougenfil	Kemiri	Gubug	2019
204	Sejahtera	Pranten	Gubug	2019
205	Saban Bersih	Saban	Gubug	2019
206	Bagong Janaka	ngroto	Gubug	2019
207	Bersih makmur	Desa Pepe	Tegowanu	2019
208	Berkah uwuh 3	Krajan	Tawangharjo	2019
209	Sehati	Candisari	Purwodadi	2020
210	Sido Lestari	Grobogan	Grobogan	2020
211	Resik Becik	Grobogan	Grobogan	2020
212	Al Hikmah	Grobogan	Grobogan	2020
213	Cahaya	Ds sinawati	Brati	2020
214	Sekar Arum Sinawarah	Dsn.Sinawarah	Brati	2020
215	Daun Muda	Karanganyar	Godong	2020
216	Jajar Makmur	Sumberjosari	Karangrayung	2020
201	Sami Berkah	Dsn.Krajan	Tanggungharjo	2020
218	Amanah	Ds.Belor	Ngaringan	2020

Sumber: DLH, 2021



Gambar 2-17 Sebaran Bank Sampah

Pemrosesan Akhir

Tabel 2-29 Pemrosesan Akhir

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	TPA 1 (4)	TPA 2
1	Nama dan Lokasi TPA	1	Desa Ngembak Kec Purwodadi	
	Wilayah Pelayanan		Kabupaten Grobogan	
2	Tahun pembangunan			
	Tahun Optimalisasi		2016	
	Usia Pakai TPA (tahun)			
3	Status aset (pilih salah satu)	Serah terima aset atau pembelian sendiri Serah terima operasional Belum serah terima		
4	Luas lahan	Ha	9,78	
5	Luas sel terbangun	Ha	3	
6	Sistem TPA yang digunakan	Lahan urug saniter/lahan urug terkendali (sanitary atau controlled landfill)		

No (1)	Deskripsi (2)	Satuan (3)	TPA 1 (4)	TPA 2
7	Kondisi TPA	Baik atau Rusak		
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1 Loader + excavator: 1	
9	Kondisi jalan akses	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah		
10	Jumlah sampah yang masuk ke sel landfill	Ton/hari	77,150 ton/hari	
11	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	Recovery oleh pemulung: 10 Pengomposan:	
12	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari Gwh/hari	Gas: - Listrik: -	
	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya			

Sumber: DLH, 2021



Sel Landfill TPA Ngembak



Sel Landfill TPA Ngembak



Instalasi Pengolahan Lindi TPA Ngembak



IPL TPA Ngembak



Jembatan Timbang TPA Ngembak



Sumur Pantau TPA Ngembak



Tempat Pengolahan Kompos TPA Ngembak



Excavator

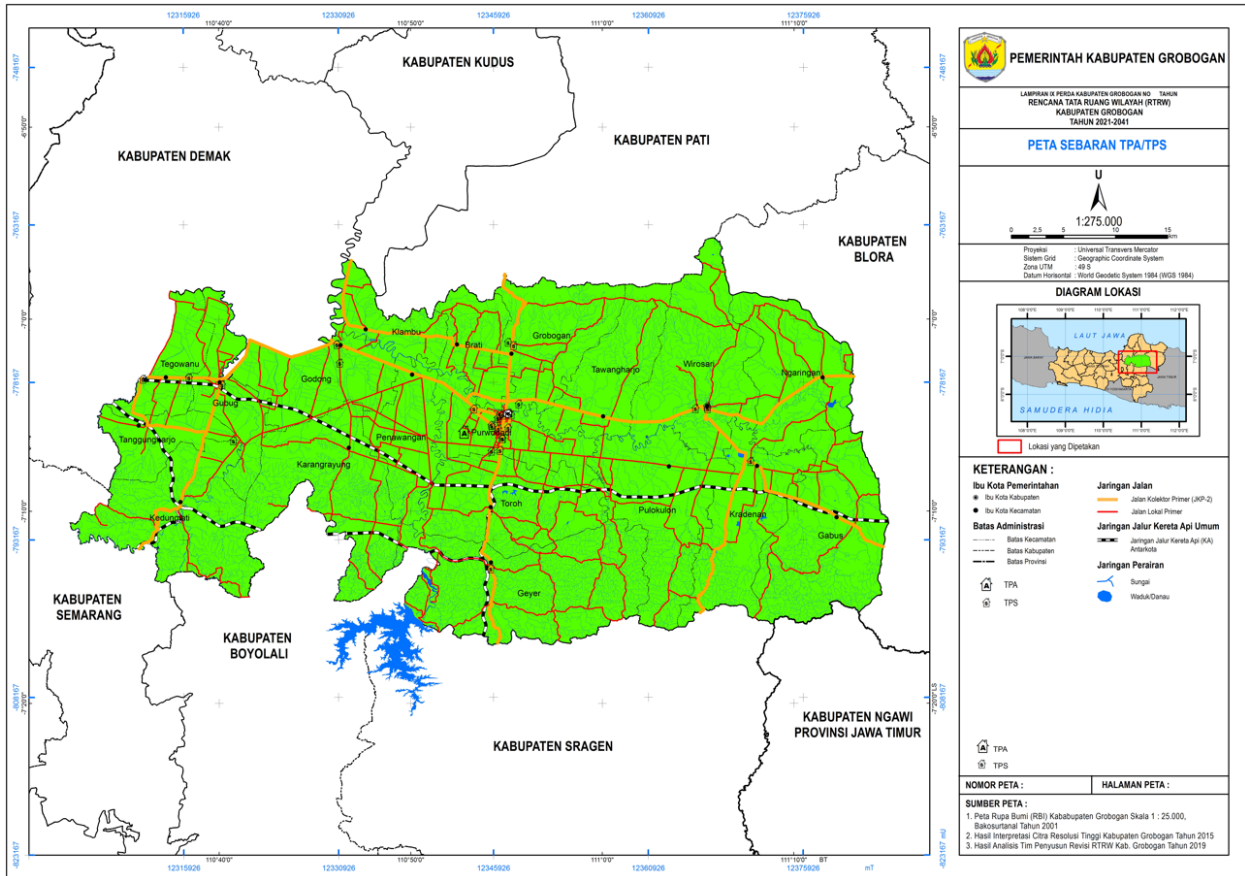


Bulldozer

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa sarana dan prasarana sampai saat ini masih berfungsi dengan baik, adapun kerusakan masih dalam kategori ringan dan keberadaanya dipelihara dengan baik.

Peta Cakupan Layanan Sampah Perkotaan

Gambar berikut menginformasikan sebaran TPA dan TPS di Kabupaten Grobogan dengan TPA berlokasi di Desa Ngembak Kec Purwodadi sedangkan TPS 23 unit di beberapa Kecamatan.



Gambar 2-18 Peta Sebaran TPA dan TPS

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024

Capaian pengelolaan persampahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 untuk Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 18,4% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 13,6%. GAP (%) Terhadap Target 2024 untuk Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 51,6% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sudah mulai mendekati target yang ditetapkan sebesar 16,4%

Tabel 2-30 Analisis GAP Terhadap Target Sub Sektor: Persampahan Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten Grobogan	Capaian (%) Tahun:2021	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan				
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	75,0%	70,0%	69,1%	18,4%	51,6%	50,7%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	25,0%	30,0%	28,4%	13,6%	16,4%	14,8%

Sumber: Instrumen SSK, 2021



Sumber: Instrumen SSK, 2021

Gambar 2-19 Rantai Layanan Sampah

Tabel 2-31 Rantai Layanan Sampah

		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	2.334.576,77	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	217.624,68	9,32%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	100.722,79	4,31%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	0,00	0,00%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	54.406,17	2,33%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	0,00	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	374.998,71	16,06%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	0,00	0,00%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	0,00	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	429.404,88	18,39%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	1.586.824,43	67,97%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

Kelembagaan Pemerintah Daerah

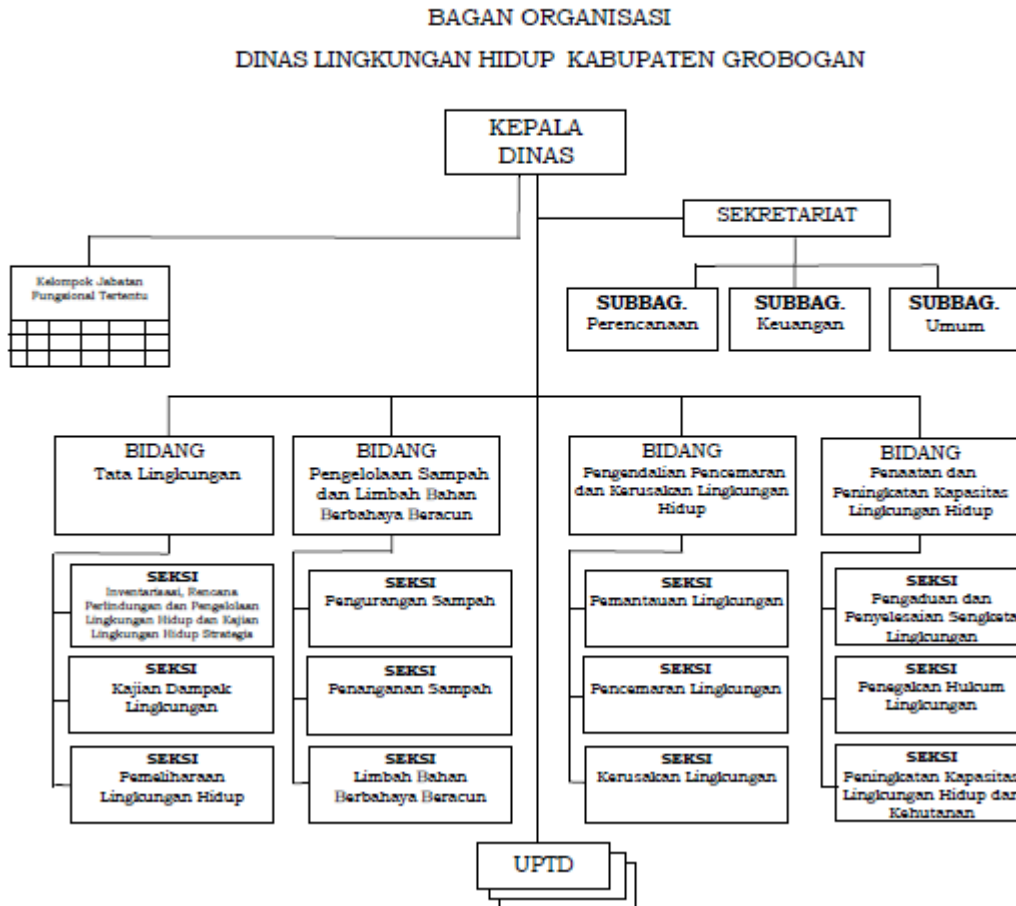
Hukum dan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk pelaksanaan aspek- aspek yang mendukung yaitu aspek teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat maupun swasta. Regulasi yang ada di Kabupaten Grobogan yang terkait dengan pengelolaan persampahan saat ini berupa:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2019 Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perda RTRW Kabupaten Grobogan memuat tentang rencana TPA, TPS dan sebarannya di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Perda RTRW, jumlah TPA yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 1 buah yaitu TPA Ngembak yang terletak di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi.

Lembaga atau dinas yang mengelola persampahan di Kabupaten Grobogan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Bidang Pengelolaan Sampah, limbah B3. Dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang persampahan.

Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor : 58 Tahun 2016
 Tanggal : 23 November 2016



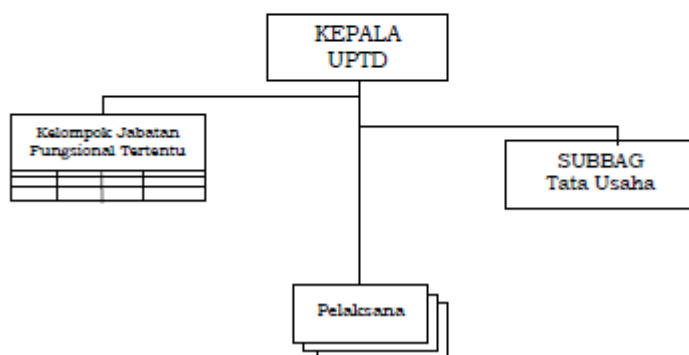
Gambar 2-20 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Institusi yang berwenang dalam pengelolaannya (baik operator maupun regulator) serta peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait persampahan, yaitu:

- Sudah ada lembaga yang menangani di Dinas Lingkungan Hidup bidang persampahan Kabupaten Grobogan.
- Sistem Pengolahan sampah telah mengikuti SPM
- Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah belum efektif dilaksanakan
- Alokasi pembiayaan dan APBD untuk pengelolaan persampahan telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Lampiran III : Peraturan Bupati GroboGAN
 Nomor : 58 Tahun 2016
 Tanggal : 23 November 2016

BAGAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
 KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 2-21 Bagan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis TPA Kabupaten GroboGAN

Kelembagaan Masyarakat

Bentuk-bentuk peran serta swasta atau partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah bisa bermacam-macam. Bentuk partisipasi umum adalah dengan ikut serta membayar retribusi kebersihan. Di samping itu ada bentuk peran serta yang lain, seperti dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu /bank sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini lazim disebut sebagai bank sampah yaitu adalah kegiatan menabung sampah sesuai dengan jenis sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini sudah berjalan di beberapa wilayah di Kabupaten GroboGAN yaitu 8 lokasi TPS 3R, 16 lokasi rumah kompos, 218 lokasi bank Sampah. Adapun secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2-32 Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat

No	Jenis Infrastruktur (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan
1	Mekar sari	Kel. Danyang Kec. Purwodadi	Beroperasi	2015
2	Belik Sari	Ds. Klambu Kec. Klambu	Beroperasi	2016
3	Mugi Lancar	Ds. Getasrejo Kec. GroboGAN	Beroperasi	2017
4	Ngudi Resik	Ds. Sulursari Kec. Gabus	Beroperasi	2018
5	Ngudi Peni	Ds. Kunden Kec. Wirosari	Beroperasi	2018
6	Alam Sejahtera	Ds. Kronggen Kec. Brati	Beroperasi	2021
7	Kuariron Jaya	Ds. Kuwaron Kec. Gubug	Beroperasi	2021
8	Pulokulon Maju	Ds. Pulokulon Kec. Pulokulon	Beroperasi	2021

Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Identifikasi peran dan pengaruh pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) pada dua matriks berikut :

Tabel 2-33 Target Advokasi dan Komunikasi: Pokja, Kepala OPD, Kepala Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	Legislasi Penganggaran Pengawasan	Tim anggaran terkait Alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta:	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Mendapatkan PROPER	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes:	Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi desa dalam pembangunan sanitasi	Memaksimalkan potensi desa
Organisasi Massa (Ormas):	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF	Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist
Tokoh Masyarakat:	Pranata sosial (sistem, nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sanitasi dalam kehidupan masyarakat)	Stimulan dalam penanganan permasalahan sanitasi Potensi / sumber penanganan masalah sanitasi

- Kepentingan: tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi
- Kekuatan/Sumberdaya: tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

Selanjutnya matriks di atas diperinci lebih lanjut ke dalam matriks “Kontribusi, Legitimasi, Kesiediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan” berikut:

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesiediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Pengusaha / Swasta:	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka pengelolaan persampahan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
BUMDes	Pembinaan dan pengawasan sehingga bahwa urusan pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi tetap terkendali ditingkat daerah	1). Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan 5). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa.	Sedang	Sedang	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Organisasi Massa (Ormas):	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Tinggi	Sedang	Ya
Tokoh Masyarakat:	Pranata sosial (sistem, nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sanitasi dalam kehidupan masyarakat)		Sedang	Sedang	Ya

Sumber: Pokja PKP, 2021

- Kontribusi (nilai): Apa yang sudah dilakukan dalam mendukung kegiatan terkait sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) kondisi eksisting.
- Legitimasi: Seberapa sahkah para pemangku kepentingan untuk mendapatkan keterlibatan? Tuliskan dasar aturan dan atau ketentuan yang mengaturnya
- Kesiediaan untuk terlibat: seberapa besar keinginan para pemangku kepentingan untuk terlibat? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat kesediaannya dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH
- Pengaruh: seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder? Pokja menilai dan menentukan berdasarkan pengalaman selama ini tingkat pengaruhnya terhadap kesuksesan program dengan menentukan apakah; TINGGI, SEDANG atau RENDAH
- Perlunya keterlibatan: apakah merupakan seseorang/lembaga yang dapat menggagalkan atau mendelegitimasi proses jika mereka tidak termasuk dalam pengelolaan program?

Regulasi

Tabel 2-34 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan		
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada (v)	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	V	
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	V	
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	V	
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	V	
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	V	
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	V	
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	V	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	V	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	V	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	V	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala	Sudah ada V	Belum ada

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan		
	Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?		
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. 2. 3. 4.

2.2.2.3 Komunikasi dan Media

Berita tentang permasalahan persampahan yang belum tertangani dengan baik beberapa kali dimuat di media. Beberapa berita yang terekam di dunia maya/cetak yang memuat berita persampahan dapat dilihat pada Tabel Berita Persampahan Kabupaten Grobogan di Media Massa

Tabel 2-35 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Pengelolaan Persampahan

No	Nama Media	Jenis Acara	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Pendapat Media
1	www.liputan6.com	Artikel	Persampahan	Kabupaten Grobogan Terapkan Sistem Bank Sampah, Hasilkan Uang untuk Masyarakat	Positif, kedalamannya memadai
2	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	DLH Kabupaten Grobogan Sesalkan Masih Banyak Masyarakat Yang Membuang Sampah di Pinggir Jalan	Negatif, kedalamannya memadai
3	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Pelatihan Saka Kalpataru pada kesempatan kali ini yaitu pelatihan daur ulang, pembuatan sabun dari minyak jelantah	Positif, kedalamannya memadai
4	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Pembekalan Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten dan Provinsi	Positif, kedalamannya memadai
5	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Rayakan Idul Adha Tanpa Sampah Plastik	Positif, kedalamannya memadai
6	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Perilaku Tidak Disiplin, Membuat Pemandangan Tampak Kumuh Karena Tumpukan Sampah Menumpuk di Pinggir Kali Bandang, Kecamatan Wirosari	Positif, kedalamannya memadai
7	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2021, Dinas Lingkungan Hidup Melaksanakan Kegiatan Kebersihan Kerja Bakti	Positif, kedalamannya memadai
8	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Jumat Bersih, Warga Dinas Lingkungan Hidup Melaksanakan Kerja Bakti	Positif, kedalamannya memadai
9	dlh.grobogan.go.id/	Artikel	Persampahan	Kerja Bakti Resik-Resik Kutho Jalan Pertigaan Gubug bersama Kecamatan, dan PLHB serta Desa	Positif, kedalamannya memadai
10	http://www.grobogantoday.com	Artikel	Persampahan	Anggaran Minim, Penanganan Sampah di Grobogan Belum Maksimal	Negatif, kedalamannya memadai

2.2.3 Drainase Lingkungan

Sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota dibagi menjadi 2 yakni : drainase utama (major drainage) dan drainase lokal (minor drainage). Sistem drainase mayor dan minor dapat dibedakan menurut sifat, kriteria dan peruntukannya.

Drainase Makro

Sistem drainase induk yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran – saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada di Grobogan juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Pada dasarnya terdapat 3 (sungai) sungai utama (Sungai Serang, Sungai Lusi dan Sungai Tuntang) sebagai badan penerima air akhir di wilayah Grobogan. Sungai – sungai tersebut membelah wilayah studi dari sisi selatan ke utara dan bermuara di Laut Jawa.

Drainase Mikro

Drainase mikro berupa saluran – saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan.

Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran drainase yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan. Pada Tabel berikut merangkum panjang drainase perkotaan wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Grobogan.

Tabel 2-36 Panjang Drainase Perkotaan Wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Grobogan

No	Nama IKK	Panjang Saluran (m)		
		Saluran Primer	Saluran Sekunder	Saluran Tersier
1	Purwodadi	3.990	4.620	28.750
2	Grobogan	2.300	12.100	12.900
3	Tawangharjo	3.059	3.353	8.353
4	Pulokulon	3.250	3.450	8.900
5	Kradenan	1.636	4.418	11.018
6	Wirosari	3.300	11.138	28.500
7	Gabus	7.625	8.250	12.750
8	Ngaringan	2.206	1.853	10.147
9	Geyer	3.350	1.710	3.500
10	Brati	2.750	2.050	1.400

No	Nama IKK	Panjang Saluran (m)		
		Saluran Primer	Saluran Sekunder	Saluran Tersier
11	Godong	3.059	3.353	8.353
12	Klambu	1.763	2.325	12.195
13	Karangrayung	5.200	8.240	21.213
14	Toroh	2.000	6.987	8.027
15	Tanggunharjo	743	3.071	2.557
16	Gubug	2.300	12.100	12.900
17	Kedungjati	5.440	4.560	10.720
18	Tegowanu	2.333	1.667	14.933
19	Penawangan	1.691	18.622	22.429
	JUMLAH	55.796	111.685	232.40

Untuk wilayah daerah genangan dan banjir diatas baru dua wilayah yang sudah ada perencanaan drainasenya, yaitu Kota Purwodadi dan Gubug, sedangkan wilayah lain belum ada. Berdasarkan perencanaan drainase yang ada dapat digambarkan kondisi jaringan drainase di dua kota tersebut sebagai berikut :

1. Kondisi drainase kota Purwodadi

Kota Purwodadi dilalui oleh beberapa sungai besar yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Aliran drainase diarahkan ke sungai – sungai yang ada. Sistem drainase melayani area seluas 197.277,00 Ha. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan yaitu :

- Terdapat permukiman di daerah rendah
- Dimensi saluran belum sesuai debit
- Banyak jaringan yang rusak
- Sistem drainase belum terpadu
- Meluapnya air dari saluran irigasi

Saluran drainase yang ada di Kota Purwodadi sebagian besar telah dibuat permanen dengan sistem tertutup di bawah trotoir.

- Saluran Utama pertama (b) :

Jl. Siswa Miharja ke Utara melintas Jl. Cempaka I, Jl. Piere Tendeau, kemudian ke Barat melewati bawah pertokoan sampai pertigaan Jl. Jend. A Yani dan Jl. Untung Suropati.

- Saluran Utama ke dua (c)

Dari Jl. Suhada (depan KODIM) ke Selatan kemudian ke Barat, melintasi Jl. Letjen. MT. Haryono, Jl. Kol. Sugiyono sedikit ke arah Barat Daya, melintas Jl. Usaha lalu menyatu dengan Saluran Utama ke tiga.

- Saluran Utama ke tiga (d):

Dari Jl. Jend. A. Yani (Jalan menuju Semarang) di ujung pertokoan, ke arah Utara melintas Jl. Niti Karya menuju Sungai Lusi. Saluran Utama yang lain ada pada Jl. Srikaya ke Utara menuju sungai Lusi

– Saluran Pengglontor Kota (a):

Berada di Jl. Pangeran Diponegoro ke Utara membelok ke Barat (Jl. Soponyono V), menyatu dengan saluran dari Jl. Untung Suropati ke Utara dan menjadi satu dengan Saluran Utama ke tiga. Air untuk pengglontor kota ini diambil dari waduk Kedung Ombo dengan debit (Q) = 50 l/dt. Alur pembuangan akhir pada sistem jaringan drainase di kota Purwodadi sebagian diarahkan ke Sungai Lusi dan Sungai Glugu sedang lainnya ke Sungai Grobogan

Tabel 2-37 Saluran Drainase Utama Yang Ada di Kota Purwodadi

No	Lokasi Saluran Profil	Profil	Dimensi				Kondisi
			0	B1	B2	H	
1	Jl. Kyai Busro (A1)	Pas. Terbuka	-	0,60	1,85	0,90	
2	Jl. Kyai Busro (A2)	Sal. Tanah	-	0,60	1,85	0,90	
3	Jl. Kyai Busro Iv (A3)	Sal. Tanah	-	0,70	0,80	0,70	
4	Jl. Kyai Busro Iv (A4)	Sal. Tanah	-	0,70	0,80	0,70	
5	Jl. Getas Pendawa V (A5)	Sal. Tanah	-	1,30	1,90	1,00	
6	Jl. Getas Pendawa V (A6)	Sal. Tanah	-	0,60	2,00	0,80	
7	Jl. Getas Pendawa Raya V (A7)	Sal. Tanah	-	1,00	2,00	0,60	
8	Jl. Getas Pendawa Raya V (A8)	Sal. Tanah	-	1,00	2,00	0,60	
9	(A9)	Sal. Tanah	-	1,00	1,70	0,50	
10	(A10)	Sal. Tanah	-	1,00	1,70	0,50	
11	Jl. Gatot Subroto (B1)	Pas. Terbuka	-	1,10	1,10	1,00	
12	Jl. Gatot Subroto (B2)	Pas. Terbuka	-	1,20	1,20	1,00	
13	Jl. Pegadaian (B3)	Pas. Terbuka	-	1,00	1,90	0,90	
14	Jl. Pegadaian (B4)	Pas. Terbuka	-	0,30	0,50	0,60	
15	Jl. Jend. Sudirman (B5)	Pas. Tertutup	-	0,80	0,80	1,00	
16	Jl. Suhada (B6)	Pas. Tertutup	-	1,10	1,10	1,00	
17	Jl. Brigjend.Katamso (B7)	Pas. Tertutup	-	1,20	1,20	0,90	
18	Jl. Brigjend.Katamso (B8)	Pas. Tertutup	-	1,20	1,20	1,20	
19	Jl. Brigjend.Katamso (B9)	Gorong-Gorong	-	1,80	1,80	1,50	
20	Jl. Brigjend.Katamso (B10)	Gorong-Gorong	-	1,20	1,20	1,20	
21	Jl. Brigjend.Katamso (B11)	Pas. Tertutup	-	0,80	0,80	1,30	
22	Jl. Kol. Sugijono (B12)	Pas. Tertutup	-	1,20	1,20	1,00	
23	Jl. Kol. Sugijono (B13)	Pas. Tertutup	-	1,20	1,20	1,00	
24	Jl. Kol. Sugijono (B14)	Pas. Tertutup	-	1,45	1,45	1,20	
25	Jl. Ampera (B16)	Pas. Terbuka	-	0,50	0,70	0,60	
26	Jl. Ampera (B15)	Sal. Tanah	-	0,50	0,80	0,60	
27	Jl. Srikaya I (N17)	Pas. Terbuka	-	1,40	1,40	1,50	
28	Jl. Slametmriyadi (B 18)	Pas. Terbuka	-	0,35	0,50	0,50	
29	Jl. Sudirman (B 19)	Pas. Tertutup	-	0,75	0,75	0,80	
30	Jl. Palembang (C1)	Pas. Terbuka	-	0,80	0,80	0,40	

No	Lokasi Saluran Profil	Profil	Dimensi				Kondisi
			0	B1	B2	H	
31	Jl. Dr. Sutomo (C2)	Sal. Tanah	-	0,90	1,60	0,60	
32	Jl. Hayam Wuruk (C3)	Sal. Tanah	-	0,80	1,20	0,60	
33	Jl. Hayam Wuruk (C4)	Sal. Tanah	-	0,60	1,20	0,70	
34	Jl. Banaran Iii (C5)	Pas. Terbuka	-	0,30	0,30	0,30	
35	Jl. Banaran Iii (C6)	Pas. Terbuka	-	0,50	0,50	0,30	
36	Jl. Hayam Wuruk (C7)	Pas. Terbuka	-	0,55	0,55	0,35	
37	Jl. Hayam Wuruk (C8)	Sal. Tanah	-	1,20	2,00	0,65	
38	Jl. Pemuda (C9)	Sal. Tanah	-	1,50	2,70	0,65	
39	Jl. Pemuda (C10)	Sal. Tanah	-	0,50	1,50	0,60	
40	Jl. Hayam Wuruk (C11)	Pas. Terbuka	-	1,00	1,50	1,40	
41	Jl. Banaran li (C12)	Pas. Terbuka	-	0,35	0,35	0,60	
42	Jl. Banaran li (C13)	Pas. Terbuka	-	0,35	0,35	0,60	
43	Jl. Jetis Timur (C14)	Sal. Tanah	-	1,20	1,60	0,45	
44	Jl. Piere Tendean (C15)	Pas. Terbuka	-	2,80	2,80	0,65	
45	Jl. Piere Tendean (C16)	Pas. Terbuka	-	1,80	1,80	0,70	
46	Jl. Cempaka I (C17)	Pas. Terbuka	-	0,47	0,47	0,50	
47	Jl. Cempaka I (C18)	Pas. Terbuka	-	0,30	0,30	0,50	
48	Jl. Gajah Mada (D1)	Pas. Terbuka	-	1,40	1,40	1,40	
49	Jl. Soponyono V (D2)	Pas. Terbuka	-	3,80	4,90	1,55	
50	Jl. Banyuono (D3)	Pas. Terbuka	-	0,40	0,50	0,50	
51	Jl. Soponyono li (D4)	Pas. Terbuka	-	1,70	3,50	1,20	
52	Jl. Soponyono Iii (D5)	Pas. Terbuka	-	0,60	0,60	1,00	
53	Jl. Soponyono Iii (D6)	Pas. Terbuka	-	0,70	0,70	0,82	
54	Jl. Soponyono Iii (D7)	Pas. Terbuka	-	0,30	0,30	0,62	
55	Jl. Banyuono (D8)	Pas. Terbuka	-	0,55	0,55	0,72	
56	Jl. Banyuono (D9)	Pas. Terbuka	-	0,55	0,55	0,65	
57	Jl. Soponyono li (D10)	Pas. Terbuka	-	0,50	0,50	0,20	
58	Jl. Soponyono li (D11)	Pas. Terbuka	-	0,48	0,48	0,45	
59	Jl. Soponyono I (D12)	Pas. Terbuka	-	0,25	0,25	0,36	
60	Jl. Soponyono I (D13)	Pas. Terbuka	-	0,50	0,50	0,60	
61	Tm. Pahlawan (I4)	Sal. Tanah	-	1,50	2,00	0,60	
62	Jl. Letjen. Suprpto (D15)	Pas. Tertutup	-	0,80	0,80	0,90	
63	Jl. P. Diponegoro (E1)	Pas. Tertutup	-	1,10	1,10	1,10	
64	Jl. Gajah Mada (E2)	Pas. Terbuka	-	1,15	1,15	1,23	
65	Jl. Tentara Pelajar (F1)	Sal. Tanah	-	1,20	2,90	1,00	
66	Jl. Brigjen. Sudiarso (F2)	Sal. Tanah	-	0,80	1,90	0,50	
67	Jl. Tentara Pelajar (F3)	Sal. Tanah	-	0,80	2,20	0,65	
68	Jl. Tentara Pelajar (F4)	Sal. Tanah	-	1,00	3,20	1,30	
69	Jl. Tentara Pelajar (F5)	Sal. Tanah	-	1,30	3,00	0,80	
70	Jl. Dr. Sutomo (F6)	Pas. Terbuka	-	1,00	1,00	0,80	
71	Jl. Ki Ageng Selo (F7)	Pas. Tertutup	-	0,90	1,40	1,00	
72	Jl. Ki Ageng Selo (F8)	Pas. Tertutup	-	1,60	1,60	1,20	
73	Jl. P. Diponegoro (F9)	Pas. Tertutup	-	1,40	1,40	1,20	

No	Lokasi Saluran Profil	Profil	Dimensi				Kondisi
			0	B1	B2	H	
74	Jl. Dr. Sutomo (F10)	Sal. Tanah	-	0,90	1,60	0,50	
75	Jl. Palembang (F11)	Pas. Terbuka	-	0,60	0,60	0,50	

Selain saluran-saluran utama yang telah dibangun terdapat pula alur-alur alam yang cukup membantu sistem pembuangan air hujan dan buangan rumah tangga di Purwodadi. Saluran-saluran tersebut adalah: Pembuang di desa Sambak; Saluran alam di Dukuh Cebok; Saluran di Jl. Hayam Wuruk; Saluran di Jl. Pemuda; Saluran di sebelah Selatan Jl. Jend. A. Yani (belakang rumah penduduk).

2. Sistem Drainase Kota Gubug

Di Kota Gubug, sistem drainase yang ada saat ini melayani area kota seluas 383,325 Ha dengan jumlah penduduk yang terlayani 21.138 jiwa. Terdiri dari sistem drainase primer, sekunder dan lokal. Yang berfungsi sebagai sistem primer yaitu KB 15 yang melintasi kota Gubug sebagai badan penerima air dari sistem drainase sekunder. Sedangkan drainase sekunder adalah badan penerima air dari saluran-saluran lokal yang berasal dari kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan dan sebagainya. Saluran drainase ada di kota Gubug sebagian besar telah dibuat permanen baik terbuka ataupun tertutup, terutama saluran drainase sekitar jalan besar. Sedangkan yang berada ditengah kampung saluran drainasenya masih berupa saluran tanah. Adapun sistem pengelolaan drainase di kota Gubug terbagi menjadi :

- Sistem primer dikelola oleh PSDA
- Sistem sekunder dikelola oleh pemerintah Kabupaten.

Sistem lokal dikelola oleh pemerintah Kabupaten Grobogan bersama-sama dengan masyarakat yang berfungsi sebagai drainase primer di kota Gubug adalah KB 15 dimana kondisi yang ada sekarang ini telah berkurang kapasitasnya akibat tingkat sedimentasi yang tinggi KB 16 terletak di sebelah barat kota Gubug yang mengalir dari selatan menuju ke utara, dimana apabila muka airnya tinggi akan menyebabkan banjir karena aliran balik.

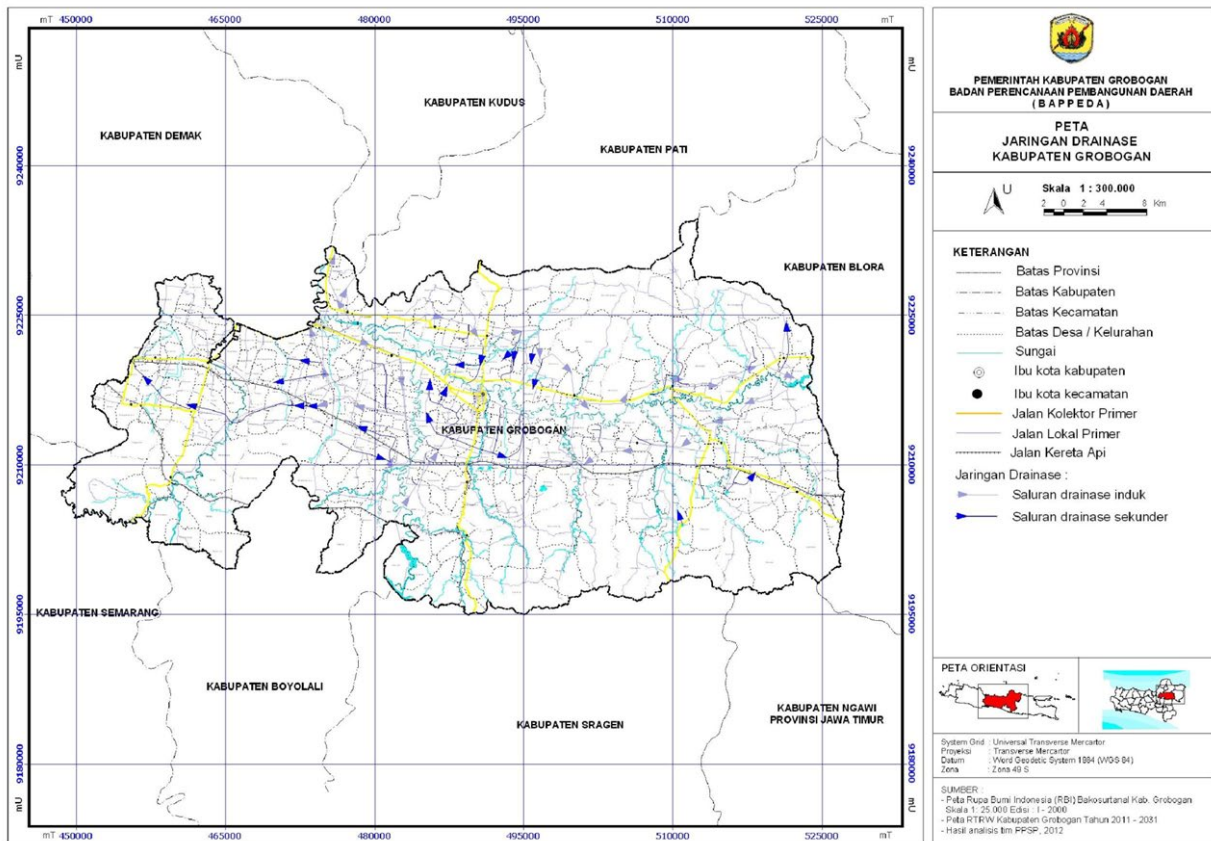
Tabel 2-38 Kapasitas Bank Full Kb 15 Kota Gubug

No.	Lokasi	A (m ²)	R (m)	I	V (m/dt)	Q (m ³ /dt)
1.	Sebelum jembatan rel KA s/d sesudah sal. Sekunder 2	37,875	2,17	0,0051	3,86	146,2
2.	Sesudah sal. Sekunder 2 s/d sebelum jembatan Smg-Pwd	59,61	2,525	0,0022	2,9	172,87
3.	Sebelum jembatan Smg-Pwd s/d sesudah sal. Sek.3	76,00	2,91	0,0011	2,25	171,00

Secara garis besar sistem drainase sekunder di Kota Gubug terbagi menjadi empat bagian wilayah pelayanan sebagai berikut:

- 1) Saluran sekunder dari B.G. 3 di desa Kunjen mengalir ke barat kearah KB 15 melayani daerah sebelah selatan jalan kereta api
- 2) Saluran sekunder dari B.G. 5 mengalir ke barat ke arah KB 15 melayani daerah antara jalan A. Yani dan jalan kereta api
- 3) Saluran sekunder dari B.G. 7 mengalir ke barat kearah KB 15 melayani daerah antara Jalan A. Yani sampai desa Pranten.

Sistem drainase lokal yang ada berupa saluran permanen dan saluran tanah dengan kondisi kotor, banyak endapan, rumput dan kapasitas yang tidak memadai. Air untuk penggelontoran Kota didapat dari saluran irigasi sekunder Gubug di B.G. 3, B.G. 6 lewat saluran drainase sekunder yang ada. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pamong, masyarakat setempat dan survey lapangan, daerah-daerah yang sering terjadi genangan apabila terjadi hujan adalah sebagai berikut: Sawah di sebelah jembatan timbang; Sepanjang Jl. A.Yani mulai dari terminal hingga ujung Jl. Suhada; Jalan masuk ke terminal; Ujung Jl. Bayangkara ke arah Jl. A. Yani; Sawah di belakang Terminal Gubug; Jalan ke arah Pranten; Jalan depan SD Pranten dan Balai Desa Pranten; Pertigaan depan Pasar Gubug; Jl. Letjen Suprpto;



Gambar 2-22 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Grobogan

Di Kabupaten Grobogan menurut data dari DPUPR Kabupaten Grobogan, beberapa wilayah kecamatan yang merupakan daerah genangan air dan banjir, diantaranya di Kecamatan Purwodadi, Gubug, Klambu, Brati, Ngaringan, Klambu, Grobogan, Godong dan Tegowanu.

Tabel 2-39 Data Genangan di Kabupaten Grobogan

NO	NAMA KALI / SUNGAI	LOKASI			Lama Genangan (jam)	Tinggi Genangan (cm)	Luas Genangan (Ha)	KET.
		KECAMATAN		DESA				
1	TUNTANG	KEDUNGJATI	1	KARANGLANGU	3	30		
			2	WATES	3	30		
			3	JUMO	3	30		
			4	KEDUNGJATI	2	30		
			5	NGOMBAK	2	30		
			6	PADAS	2	30		
			7	DERAS	2	30		
		GUBUG	1	TRISARI	3	40		
			2	ROWOSARI	8	80		
			3	NGROTO	8	100		
			4	PAPANREJO	8	100		
			5	GUBUG	3	50		
			6	KUWARON	3	50		
			7	PRANTEN	4	80		
			8	JATIPECARON	4	50		
			9	BATUR AGUNG	4	50		
			10	RINGIN HARJO	4	50		
			11	RINGIN LOR	4	50		
			12	GINGGANG TANI	6	60		
			13	JEKETRO	3	80		
			14	GLAPAN	3	80		
			15	SABAN	3	50		
			16	MLILIR	3	60		
			17	KEMIRI	3	60		
2	K.B.1 DAN K.B. 15	TEGOWANU	1	SUKOREJO	8	80		
			2	MEDANI	8	80		
			3	GEBANGAN	8	100		
			4	MANGUNSARI	8	100		
			5	KEJAWAN	8	100		
			6	KARANGPASAR	4	80		
			7	TANJUNGSARI	8	60		
			8	KEDUNGWUNGU	8	60		
			9	CANGKRING	4	60		
			10	PEPE	4	60		
			11	CURUK	4	60		
			12	TUNJUNG HARJO	4	60		
			13	TANGGIREJO	8	80		
		GUBUG	1	ROWOSARI	8	80		

NO	NAMA KALI / SUNGAI	LOKASI			Lama Genangan (jam)	Tinggi Genangan (cm)	Luas Genangan (Ha)	KET.
		KECAMATAN		DESA				
			2	KUWARON	3	50		
			3	GUBUG	3	50		
3	JRAGUNG	TEGOWANU	1	KEBONAGUNG	4	50		
			2	TLOGOREJO	4	50		
			3	TAJEMSARI	4	40		
			4	KARANGPASAR	4	40		
			5	CANGKRING	4	40		
			6	PEPE	4	40		
			7	TLOGOMULYO	4	40		
4	JAJAR BARU / JAJAR LAMA	KARANGRAYUNG	1	KARANGRAYUNG	3	30		
			2	MOJOAGUNG	3	30		
			3	MANGIN	3	30		
			4	PANGKALAN	2	30		
			5	RAWOH	2	30		
		GODONG	1	ANGGASWANGI	8	60		
			2	KEMLOKO	4	30		
			3	GUCI	4	50		
			4	SUMBERAGUNG	4	40		
			5	KLAMPOK	3	40		
			6	GUYANGAN	3	40		
			7	WERDOYO	3	40		
			8	GODONG	3	40		
			9	KETITANG	3	30		
5	GLUGU	GEYER	1	JAMBANGAN	2	30		
			2	ASEMRUDUNG	2	30		
		TOROH	1	BANDUNGHARJO	2	30		
			2	GENENGSARI	2	30		
			3	TUNGGAK	2	30		
		PURWODADI	1	NAMBUHAN	2	30		
			2	KANDANGAN	2	30		
			3	NGRAJI	2	30		
			4	KALONGAN	2	30		
			5	DANYANG	2	30		
6	LUSI	PURWODADI	1	PURWODADI	3	40		
			2	KEDUNGREJO	3	40		
			3	KARANGANYAR	3	40		

NO	NAMA KALI / SUNGAI	LOKASI			Lama Genangan (jam)	Tinggi Genangan (cm)	Luas Genangan (Ha)	KET.
		KECAMATAN		DESA				
			4	KURIPAN	8	50		
			5	PUTATSARI	8	80		
			6	PULOREJO	8	80		
			7	NGLOBAR	8	60		
		BRATI	1	KRONGGEN	8	100		
			2	KARANGSARI	3	50		
			3	LEMAHPUTIH	3	50		
			4	TEMON	3	40		
			5	JANGKUNGHARJO	3	40		
			6	MENDURAN	3	40		
		KLAMBU	1	KANDANGREJO	4	80		
			2	KLAMBU	4	80		
			3	MENAWAN	4	80		
			4	SELOJARI	4	80		

2.3 Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Pengidentifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan Sanitasi di Kabupaten Grobogan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar dan berdampak negatif di masa yang akan datang;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berikut permasalahan mendesak sanitasi di kabupaten Grobogan:

1. Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

Salah satu permasalahan untuk sub sektor air limbah domestik adalah masih adanya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Grobogan. Sesuai dengan isu yang ada, untuk cakupan kepemilikan jamban keluarga yang memenuhi syarat (tangki septik) baru mencapai 90,9% dan kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik dan lingkungan yang sehat masih kurang karena rendahnya pengetahuan secara menyeluruh mengenai pengelolaan air limbah domestik dan lingkungan. Sementara di lingkungan masyarakat sistem

pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Grobogan yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang memiliki sistem pengolahan air limbah. Kabupaten Grobogan sampai saat ini juga belum memiliki bangunan IPAL SPALD - Terpusat skala perkotaan- / koneksi penghubung dari sumber air limbah domestik hingga tempat pengolahan tersebut diperlukan untuk dilaksanakan terutama pada kawasan padat penduduk. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa posisi pengelolaan untuk sub sektor air limbah perlu di benahi dan dibutuhkan pemeliharaan yang selektif mungkin, baik dari kelembagaan, pendanaan dan pemeliharaan MCK yang sudah ada untuk terus di tingkatkan.

Salah satu permasalahan untuk sub sektor air limbah domestik adalah masih adanya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Grobogan saat ini yaitu sebesar 6,0%. Sesuai dengan isu yang ada, untuk cakupan kepemilikan jamban keluarga yang memenuhi syarat (tangki septik) baru mencapai 81,7% dan kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik dan lingkungan yang sehat masih kurang karena rendahnya pengetahuan secara menyeluruh mengenai pengelolaan air limbah domestik dan lingkungan. Sementara di lingkungan masyarakat sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Grobogan yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang memiliki sistem pengolahan air limbah. Kabupaten Grobogan sampai saat ini juga belum memiliki bangunan SPALDT Skala Permukiman terkoneksi penghubung dari sumber air limbah domestik hingga tempat pengolahan tersebut diperlukan untuk dilaksanakan terutama pada kawasan padat penduduk. Ini menunjukkan bahwa posisi pengelolaan untuk sub sektor air limbah perlu di benahi dan dibutuhkan pemeliharaan yang selektif mungkin, baik dari kelembagaan, pendanaan dan pemeliharaan MCK yang sudah ada untuk terus di tingkatkan. Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah memiliki peraturan daerah bidang air limbah. Oleh karena itu diperlukan penguatan aspek payung hukum dan kerangka teknis guna menjamin adanya situasi lingkungan yang lebih sehat dan aman, disamping juga sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan.

Tabel 2-40 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

No.	Permasalahan Mendesak
1	Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis
	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian (%) Tahun:2021 Akses aman Kabupaten Grobogan baru mencapai 13,4%; Akses Layak capaian sebesar 82,0%; Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) capaian sebesar 58,6%; Akses Layak Bersama capaian sebesar 9,3%; Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk) capaian sebesar 0,7%; Belum Layak 1 capaian sebesar 8,5% - Pemanfaatan IPLT Ngembak Kondisi baik, beroperasi tidak optimal.

No.	Permasalahan Mendesak
	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas IPLT sebesar 21 m³/hari sistem yang digunakan Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan - Pengelolaan dan Pengembangan SPALD - Permukiman (IPAL Komunal) masih rendah total ada 80 unit. - Tangki septik suspek aman Tidak aman sebesar 91,48%, Pencemaran karena pembuangan isi tangki septic Tidak aman sebesar 99,08%, dan Pencemaran karena SPAL Tidak aman sebesar 95,24% (EHRA, 2021) - Tempat Buang Air Besar sebesar 93,54% memilih di Jamban pribadi, Tempat Penyaluran Akhir Tinja sebesar 88,56% menggunakan Tangki septik konstruksi sendiri sesuai SNI (kedap samping dan dasar). Untuk waktu Terakhir Pengurusan Tangki Septik Tidak Pernah dilakukan sebesar 83,01%. Praktik Pengurusan Tangki Septik dilakukakn oleh Layanan sedot tinja atau truk sedot tinja pemerintah sebesar 0,66% Layanan sedot tinja atau truk swasta 11,15% dan Membayar tukang sebesar 1,69% (EHRA, 2021) - Sarana prasaranan pengangkutan truk tinja yang dimiliki DLH Kabupaten Grobogan hanya 3 unit. - Belum memiliki dokumen masterplan tentang air limbah domestik.
2	<p>Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</p>
	<p>Aspek Kelembagaan: Sinkronisasi dan koordinasi Pokja PKP belum terjalin secara maksimal</p>
	<p>Aspek Peraturan dan Perundang - Undangan: Memiliki regulasi terkait air limbah domestik. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.</p>
	<p>Aspek Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAD dari retribusi pengelolaan ALD belum dikelola - Keterbatasan pendanaan APBD yang dialokasikan untuk sektor ALD - Rasio anggaran sanitasi dalam APBD masih kecil
	<p>Aspek Teknik Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian IPLT tidak berjalan dengan optimal - Bangunan IPAL/MCK Komunal beberapa ada tidak digunakan oleh penerima manfaat - Pengujian kualitas BOD dan COD tidak dilakukan secara berkala (minimal 6 bulan sekali)
	<p>Aspek Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Program khusus di media lokal terkait promosi pengelolaan ALD - Kegiatan komunikasi belum berkelanjutan
	<p>Peran Serta Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya minat dan kesadaran terkait pemanfaatan dan pengelolaan ALD - Masyarakat belum menganggap penting penanganan ALD - Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan ALD masih rendah

2. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan sudah dilakukan secara terpadu tetapi masih terbatas pelayanannya. Pelayanan persampahan di Kabupaten Grobogan untuk Penanganan Sampah Perkotaan 53,9% dan Pengurangan Sampah Perkotaan 16,3%. Sesuai isu

yang berkembang untuk anggaran sanitasi di sub sektor persampahan masih kurang. Masih adanya kelurahan yang belum terlayani secara optimal, dikarenakan sarana dan prasarana persampahan masih kurang. Selain itu juga masih kurang SDM petugas lapangan sehingga pengelolaan persampahan di tingkat penyapu jalan tidak sesuai aturan dan meningkatnya biaya operasional untuk pengelolaan persampahan.

Tabel 2-41 Permasalahan Mendesak Persampahan

No.	Permasalahan Mendesak
1	<p>Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan sampah) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan dari segi pengelolaan sampah, frekuensi pengangkutan sampah, ketidaktepatan waktu pengangkutan sampah dan tidak dilakukan pengolahan sampah setempat belum optimal. - untuk Penanganan Sampah Perkotaan 53,9% dan Pengurangan Sampah Perkotaan 16,3% - Pengelolaan Sampah dengan cara dibakar sebesar 78,22%, Perilaku Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga tidak dipilah sebesar 80,83% (EHRA, 2021) - Pengelolaan sampah Tidak memadai sebesar 97,70% (EHRA 2021) - Frekuensi pengangkutan sampah Ya, memadai sebesar 4,21% (EHRA, 2021) - Ketepatan waktu pengangkutan sampah Ya, tepat waktu sebesar 2,06% (EHRA, 2021) - Pengolahan sampah setempat Tidak diolah ya, diolah sebesar 18,07% (EHRA, 2021)
2	<p>Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</p> <p>Aspek Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan belum jelas terkait hubungan kerja sama dengan swasta - Pengambilan keputusan terkait kebijakan (eksekutif dan legislatif) pengelolaan persampahan belum optimal <p>Aspek Peraturan dan Perundang - Undangan: Belum adanya penindakan tegas terkait pengelolaan persampahan.</p> <p>Aspek Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran bidang persampahan dalam APBD Kabupaten masih terbatas terkait pengelolaan persampahan. - PAD dari retribusi sampah masih sangat rendah <p>Aspek Teknik Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan persampahan belum tercover secara keseluruhan masih di wilayah perkotaan. - Masih banyaknya pemakaian produk kemasan yang tidak ramah lingkungan. <p>Aspek Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang persampahan. - Media kurang dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi persampahan. <p>Peran Serta Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah dimasyarakat masih belum sesuai dengan standar kesehatan. - Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

3. Permasalahan Mendesak Drainase Lingkungan

Wilayah genangan banjir di Kabupaten Grobogan di wilayah perkotaan. Adapun sarana dan prasarana pelayanan drainase di Kabupaten Grobogan masih parsial dan tidak terintegrasi dan posisi pengelolaan sistem drainase kota saat ini belum merupakan suatu sistem yang terencana secara sistematis dan menyeluruh. Saluran yang dibuat masih mengatasi masalah drainase / genangan air yang bersifat lokal dan belum menjangkau seluruh kawasan genangan, sebagian saluran belum jelas arah pembuangannya dan masih terdapat saluran yang buntu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi drainase kota dalam berada pada tahap pemeliharaan dan sebagian sedang dibangun.

Adapun untuk pengelola layanan drainase belum dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan yang rinci serta belum didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga diperlukan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase. Selain itu, isu lainnya adalah kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase yang masih rendah dan tingkat kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sinkronisasi pengelolaan drainase yang masih rendah baik secara vertikal maupun horizontal.

Tabel 2-42 Permasalahan Mendesak Drainsae Lingkungan

No.	Permasalahan Mendesak
1	<p>Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi - Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan - Masih banyak sampah yang dibuang diselokan - Pada umumnya, sitem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water) - Belum berfungsinya sistem drainase yang ada karena Leveling yang tidak baik ataupun ditimbun warga - Ada genangan air (banjir) sebesar 28,60% (EHRA, 2021)
2	<p>Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</p> <p>Aspek Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terkoordinasi dengan baik pengelolaan drainase lingkungan yang dilakukan oleh pemda dan yang berbasis masyarakat. - Koordinasi pengelolaan drainase belum optimal (pelimpahan kewenangan penanganan drainase dari PU - SDA) <p>Aspek Peraturan dan Perundang - Undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada regulasi penanganan Drainase di tingkat Kabupaten <p>Aspek Pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran pengelolaan drainase yang bersumber dari APBD masih kecil - Alokasi Biaya yang terbatas untuk Pembangunan <p>Aspek Teknik Operasional:</p>

No.	Permasalahan Mendesak
	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Drainase masih rendah - Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan
	Aspek Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk pemeliharaan drainase
	Peran Serta Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian masyarakat membuang limbah cair ke badan air dan saluran drainase - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase

4. Tingkat Area Beresiko Sanitasi

Tingkat Area beresiko sanitasi Kabupaten Grobogan ditetapkan berdasarkan elaborasi antara data sekunder, persepsi OPD dan hasil study EHRA. Elaborasi data tersebut dilakukan dengan menggunakan Instrumen SSK. Hasil area beresiko meliputi air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase. Untuk skor 1 adalah risiko sangat rendah, skor 2 adalah risiko rendah, risiko 3 tinggi, dan skor nilai 4 sangat tinggi.

Penentuan area beresiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh OPD dan hasil studi EHRA. Tingkat area beresiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/ desa) berdasarkan data yang telah tersedia di OPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas sanitasi dan data umum, meliputi jumlah jamban, nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta bila data tersedia, luas genangan. Penentuan area beresiko berdasarkan Penilaian OPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota Pokja PKP. Adapun penentuan area beresiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, buang air besar sembarangan).

Proses penentuan area beresiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian OPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area beresiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Hasil penentuan area beresiko berdasarkan tingkat/ derajat risiko ini dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini :

Tabel 2-43 Tingkat Area Beresiko Sanitasi

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
1	Kedungjati	Prigi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
2	Kedungjati	Ngombak	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
3	Kedungjati	Kentengsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
4	Kedungjati	Karanglangu	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
5	Kedungjati	Panimbo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah	Resiko Rendah
6	Kedungjati	Padas	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
7	Kedungjati	Deras	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
8	Kedungjati	Klitikan	Resiko Sangat Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
9	Kedungjati	Kedungjati	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
10	Kedungjati	Kalimaro	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
11	Kedungjati	Jumo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
12	Kedungjati	Wates	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
13	Karangrayung	Gunung Tumpeng	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
14	Karangrayung	Ketro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
15	Karangrayung	Sendangharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
16	Karangrayung	Karanganyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
17	Karangrayung	Parakan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
18	Karangrayung	Nampu	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
19	Karangrayung	Karangsono	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
20	Karangrayung	Jetis	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
21	Karangrayung	Telawah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
22	Karangrayung	Cekel	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
23	Karangrayung	Mangin	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
24	Karangrayung	Sumberjosari	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
25	Karangrayung	Mojoagung	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
26	Karangrayung	Pangkalan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
27	Karangrayung	Rawoh	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
28	Karangrayung	Dempel	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
29	Karangrayung	Termas	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
30	Karangrayung	Putatnganten	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
31	Karangrayung	Temurejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
32	Penawangan	Lajer	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
33	Penawangan	Sedadi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
34	Penawangan	Bologarang	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Rendah
35	Penawangan	Karangwader	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
36	Penawangan	Toko	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
37	Penawangan	Pengkol	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
38	Penawangan	Leyangan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
39	Penawangan	Watu Pawon	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
40	Penawangan	Tunggu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
41	Penawangan	Jipang	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
42	Penawangan	Kramat	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
43	Penawangan	Curut	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
44	Penawangan	Wedoro	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
45	Penawangan	Kluwan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
46	Penawangan	Karangpaing	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
47	Penawangan	Pulutan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
48	Penawangan	Winong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
49	Penawangan	Wolo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
50	Penawangan	Ngeluk	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
51	Penawangan	Penawangan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
52	Toroh	Dimoro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
53	Toroh	Genengadal	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
54	Toroh	Sindurejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
55	Toroh	Bandungharjo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
56	Toroh	Genengsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
57	Toroh	Kenteng	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
58	Toroh	Ngrandah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
59	Toroh	Tunggak	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
60	Toroh	Boloh	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
61	Toroh	Plosoharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
62	Toroh	Tambirejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
63	Toroh	Depok	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
64	Toroh	Krangganharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
65	Toroh	Sugihan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
66	Toroh	Pilangpayung	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
67	Toroh	Katong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
68	Geyer	Rambat	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
69	Geyer	Kalangbancar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
70	Geyer	Juworo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
71	Geyer	Monggot	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
72	Geyer	Ngrandu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
73	Geyer	Bangsri	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
74	Geyer	Karang Anyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
75	Geyer	Asemrudung	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
76	Geyer	Jambangan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
77	Geyer	Geyer	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
78	Geyer	Ledokdawan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
79	Geyer	Sobo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
80	Geyer	Suru	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
81	Pulokulon	Randurejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
82	Pulokulon	Mlowokarangtalun	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
83	Pulokulon	Pojok	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
84	Pulokulon	Jatiharjo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
85	Pulokulon	Sidorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
86	Pulokulon	Tuko	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
87	Pulokulon	Panunggalan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
88	Pulokulon	Mangunrejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
89	Pulokulon	Jetaksari	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
90	Pulokulon	Pulokulon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
91	Pulokulon	Jambon	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
92	Pulokulon	Karangharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
93	Pulokulon	Sembungharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
94	Kradenan	Bago	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
95	Kradenan	Simo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
96	Kradenan	Rejosari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
97	Kradenan	Pakis	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah

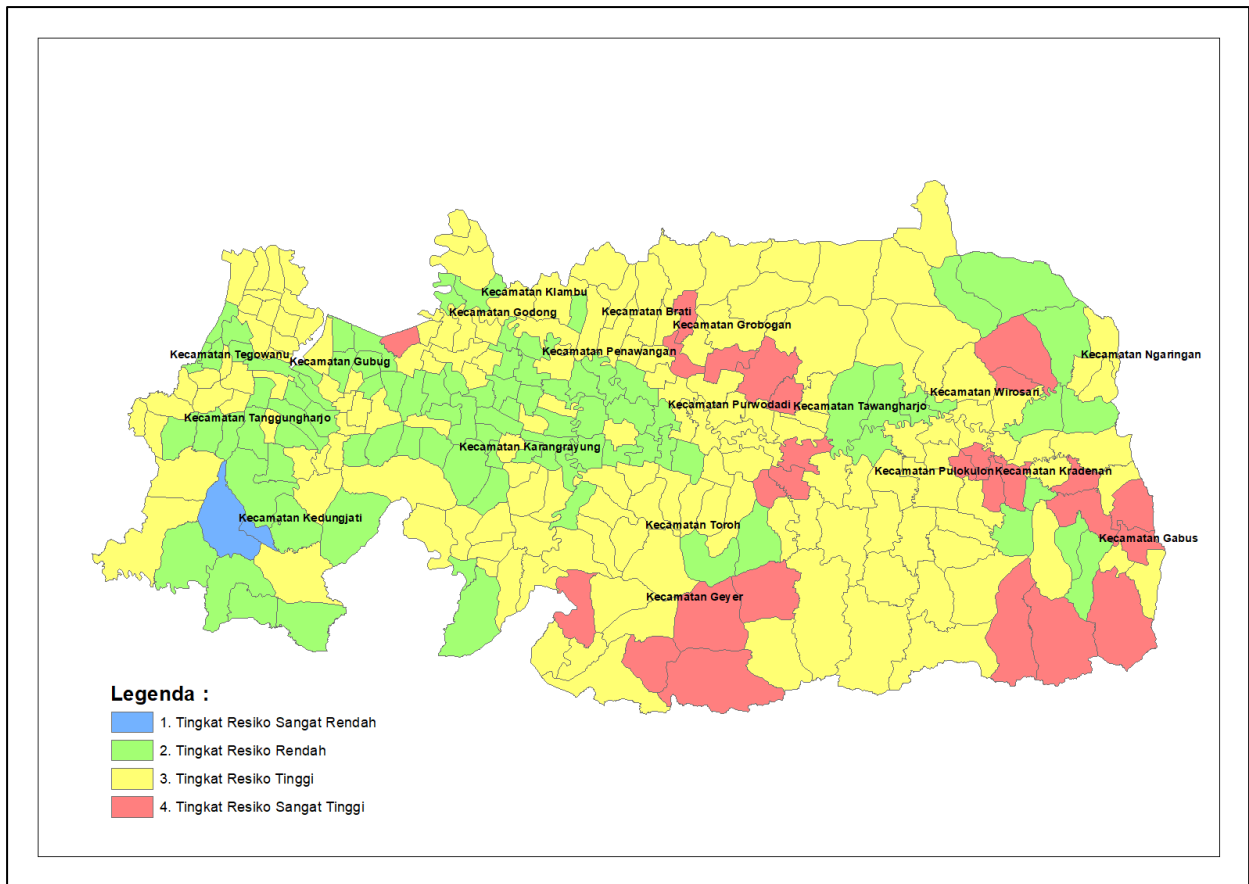
No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
98	Kradenan	Crewek	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
99	Kradenan	Banjarsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
100	Kradenan	Kradenan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
101	Kradenan	Sambongbangi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
102	Kradenan	Sengonwetan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
103	Kradenan	Banjardowo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
104	Kradenan	Kalisari	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
105	Kradenan	Kuwu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
106	Kradenan	Grabagan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
107	Kradenan	Tanjungsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
108	Gabus	Keyongan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
109	Gabus	Suwatu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
110	Gabus	Nglinduk	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
111	Gabus	Pelem	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
112	Gabus	Sulursari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
113	Gabus	Tlogotirto	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
114	Gabus	Gabus	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
115	Gabus	Pandanharum	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
116	Gabus	Tunggulrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
117	Gabus	Tahunan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
118	Gabus	Bendoharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
119	Gabus	Kalipang	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
120	Gabus	Karangrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
121	Gabus	Banjarejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
122	Ngaringan	Sendangrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
123	Ngaringan	Sarirejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
124	Ngaringan	Kalangdosari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
125	Ngaringan	Kalanglundo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
126	Ngaringan	Truwolu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
127	Ngaringan	Pendem	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
128	Ngaringan	Bandungsari	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
129	Ngaringan	Ngaringan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
130	Ngaringan	Ngaraparap	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
131	Ngaringan	Belor	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
132	Ngaringan	Tanjungharjo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
133	Ngaringan	Sumberagung	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
134	Wirosari	Sambirejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
135	Wirosari	Tanjungrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
136	Wirosari	Kunden	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
137	Wirosari	Tambahrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
138	Wirosari	Kropak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
139	Wirosari	Kalirejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
140	Wirosari	Dapurno	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
141	Wirosari	Mojorebo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
142	Wirosari	Wirosari	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
143	Wirosari	Gedangan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
144	Wirosari	Tambakselo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
145	Wirosari	Karangasem	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
146	Wirosari	Dokoro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
147	Wirosari	Tegalrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
148	Tawangharjo	Pulongrambe	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
149	Tawangharjo	Mayahan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
150	Tawangharjo	Jono	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
151	Tawangharjo	Selo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
152	Tawangharjo	Tawangharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
153	Tawangharjo	Tarub	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
154	Tawangharjo	Pojok	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
155	Tawangharjo	Plosorejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
156	Tawangharjo	Godan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
157	Tawangharjo	Kemaduhbatur	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
158	Grobogan	Getasrejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
159	Grobogan	Rejosari	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
160	Grobogan	Tanggunharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
161	Grobogan	Teguhan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
162	Grobogan	Ngabenrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
163	Grobogan	Grobogan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
164	Grobogan	Karangrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
165	Grobogan	Putatsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
166	Grobogan	Lebak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
167	Grobogan	Lebengjumuk	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
168	Grobogan	Sedayu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
169	Grobogan	Sumber Jatipohon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
170	Purwodadi	Candisari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
171	Purwodadi	Genuksuran	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
172	Purwodadi	Danyang	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
173	Purwodadi	Kalongan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
174	Purwodadi	Ngraji	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
175	Purwodadi	Kandangan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
176	Purwodadi	Nambuhan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
177	Purwodadi	Warukaranganyar	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
178	Purwodadi	Nglobar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
179	Purwodadi	Kedungrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
180	Purwodadi	Karanganyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
181	Purwodadi	Purwodadi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
182	Purwodadi	Kuripan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
183	Purwodadi	Ngembak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
184	Purwodadi	Cingkrong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
185	Purwodadi	Pulorejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
186	Purwodadi	Putat	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
187	Brati	Menduran	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
188	Brati	Jangkunharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
189	Brati	Temon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
190	Brati	Lemahputih	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
191	Brati	Tirem	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah

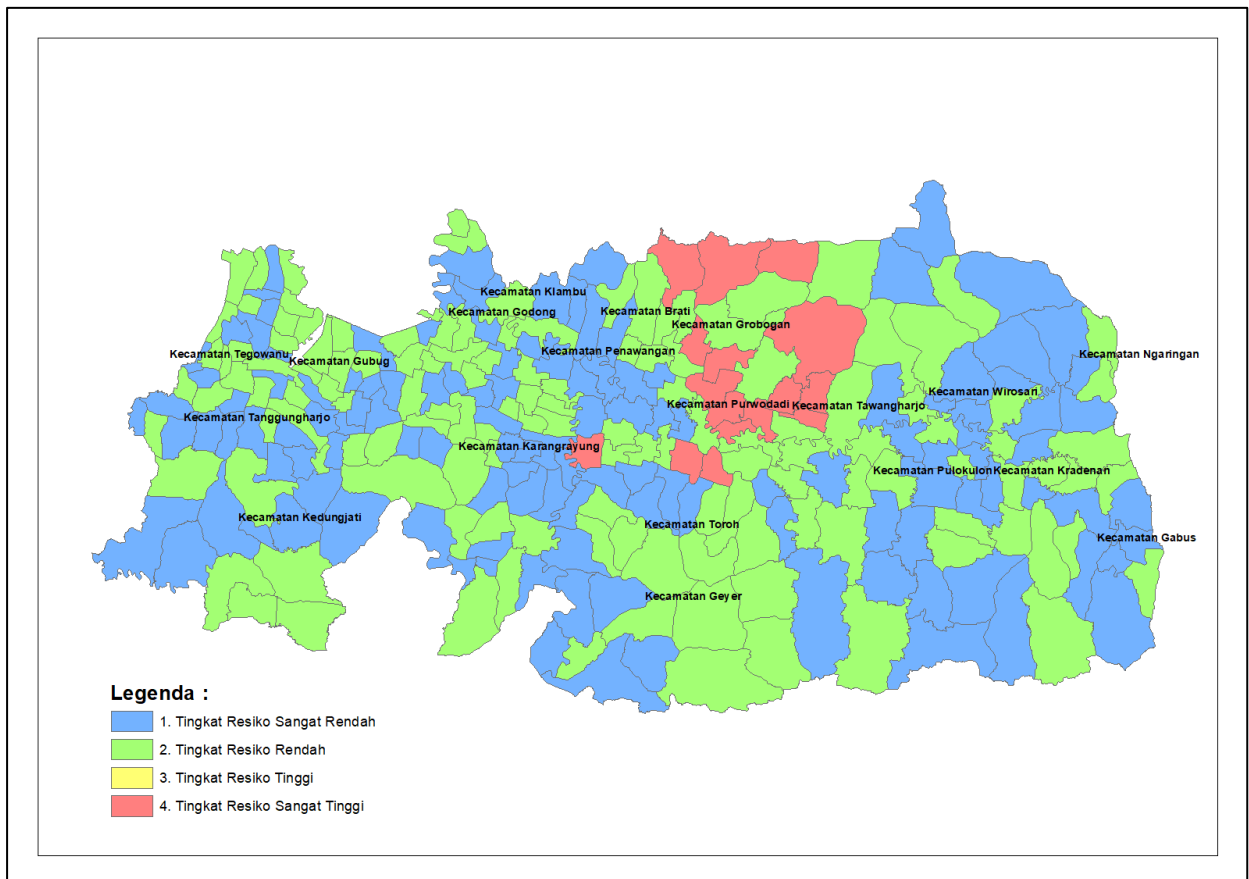
No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
192	Brati	Karangsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
193	Brati	Kronggen	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
194	Brati	Katekan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
195	Brati	Tegalsumur	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
196	Klambu	Kandangrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
197	Klambu	Selojari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
198	Klambu	Taruman	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
199	Klambu	Penganten	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
200	Klambu	Klambu	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
201	Klambu	Menawan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
202	Klambu	Terkesi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
203	Klambu	Jenengan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
204	Klambu	Wandankemiri	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
205	Godong	Tungu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
206	Godong	Paheasan	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
207	Godong	Latak	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
208	Godong	Sumurgede	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
209	Godong	Sambung	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
210	Godong	Ketangirejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
211	Godong	Anggaswangi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
212	Godong	Guci	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
213	Godong	Werdoyo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
214	Godong	Guyangan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
215	Godong	Gundi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
216	Godong	Jatilor	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
217	Godong	Sumberagung	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
218	Godong	Bringin	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
219	Godong	Klampok	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
220	Godong	Kemloko	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
221	Godong	Godong	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
222	Godong	Bugel	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
223	Godong	Ketitang	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
224	Godong	Kopek	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
225	Godong	Dorolegi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
226	Godong	Rajak	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
227	Godong	Harjowinangun	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
228	Godong	Karanggeneng	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
229	Godong	Wanutunggal	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
230	Godong	Manggarwetan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
231	Godong	Manggarmas	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
232	Godong	Tinanding	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
233	Gubug	Penadaran	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
234	Gubug	Gelapan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
235	Gubug	Ngroto	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
236	Gubug	Ginggangtani	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
237	Gubug	Jeketro	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
238	Gubug	Saban	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
239	Gubug	Mlilir	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
240	Gubug	Kemiri	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
241	Gubug	Papanrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
242	Gubug	Kunjeng	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
243	Gubug	Trisari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
244	Gubug	Kuwaron	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
245	Gubug	Rowosari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
246	Gubug	Gubug	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
247	Gubug	Pranten	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
248	Gubug	Jatipecaron	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
249	Gubug	Baturagung	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
250	Gubug	Tambakan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
251	Gubug	Ringinkidul	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
252	Gubug	Ringinharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
253	Gubug	Tlogomulyo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
254	Tegowanu	Kebonagung	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
255	Tegowanu	Tlogorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
256	Tegowanu	Medani	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Rendah
257	Tegowanu	Sukorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
258	Tegowanu	Tanggirejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
259	Tegowanu	Mangunsar	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
260	Tegowanu	Gebangan	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
261	Tegowanu	Kejawan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
262	Tegowanu	Tegowanu Wetan	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
263	Tegowanu	Tegowanu Kulon	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
264	Tegowanu	Tajemsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
265	Tegowanu	Karangpasar	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
266	Tegowanu	Kedungwungu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
267	Tegowanu	Pepe	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
268	Tegowanu	Curug	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
269	Tegowanu	Cangkring	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
270	Tegowanu	Gaji	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
271	Tegowanu	Tunjungharjo	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
272	Tanggungharjo	Ringinpitu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
273	Tanggungharjo	Mrisi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
274	Tanggungharjo	Ngambakrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
275	Tanggungharjo	Kapung	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
276	Tanggungharjo	Kaliwenang	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
277	Tanggungharjo	Sugihmanik	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
278	Tanggungharjo	Tanggungharjo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
279	Tanggungharjo	Brabo	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
280	Tanggungharjo	Padang	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah

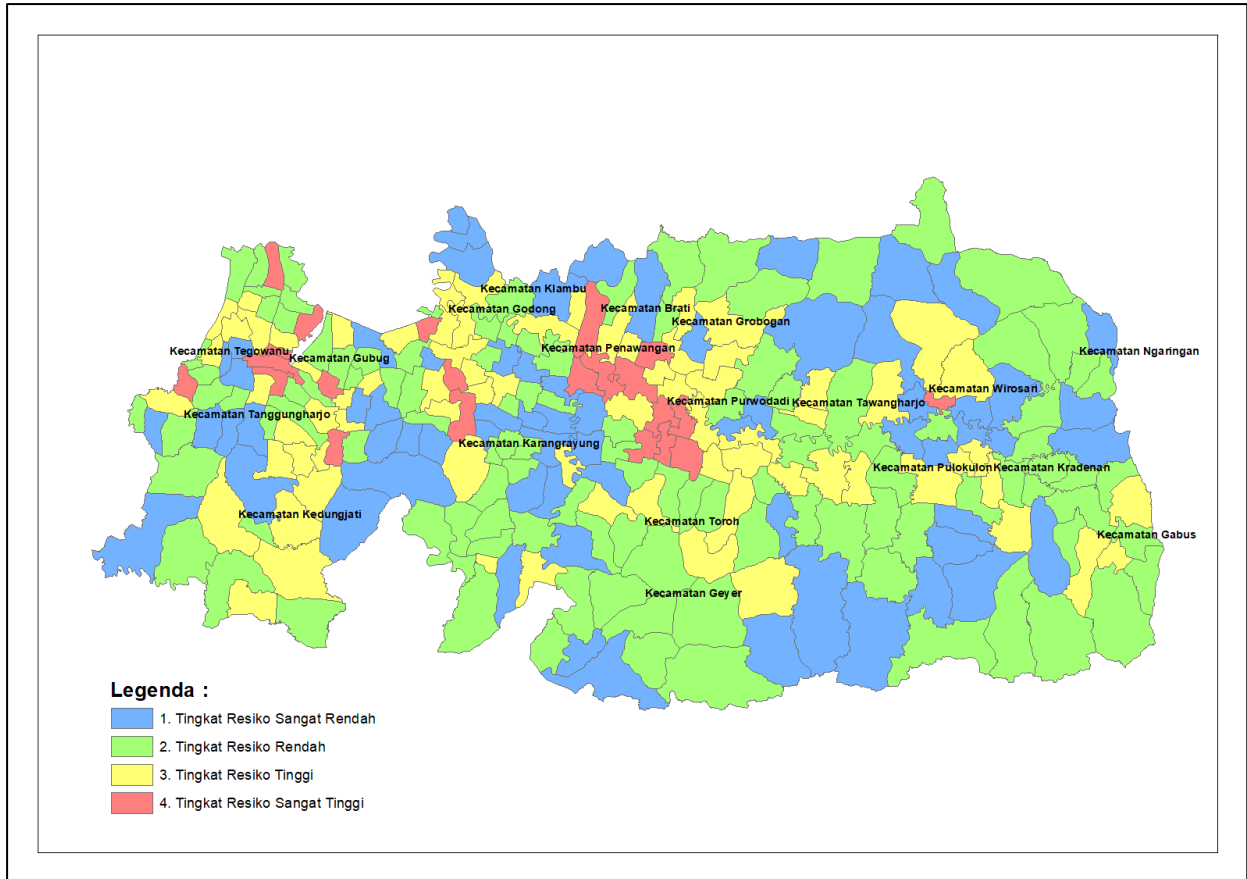
Sumber: Instrumen SSK, 2021



Gambar 2-23 Peta Beresiko Air Limbah Domestik



Gambar 2-24 Peta Area Beresiko Pengelolaan Persampahan



Gambar 2-25 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan

BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup yaitu air limbah domestik dan persampahan. Dalam pembahasan bab ini mencakup visi dan misi sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi (sistem dan zonasi), tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Penetapan visi daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang diharapkan. Pada dasarnya visi dan misi sanitasi merupakan kerangka dasar dari tujuan pembangunan sektor sanitasi yang menjadi penjabaran dari visi-misi dasar Pemerintah Kabupaten Grobogan. Visi-misi dasar Kabupaten Grobogan telah dengan jelas dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dari sinilah kerangka kerja sektor sanitasi diambil dan dikembangkan menurut potensi dan issue strategis serta permasalahan mendesak yang ada saat ini.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Sedangkan untuk Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan atau yang lebih luas disebut sektor air minum dan penyehatan lingkungan merujuk pada misi ke 2 dari misi Kabupaten Grobogan dalam RPJMD 2021-2026, misi itu adalah “Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana”. Tentu saja misi tersebut akan bersinergi dengan misi-misi yang lain secara luas sebagai dasar pengembangan sanitasi ke depan. Arah dari misi sanitasi tersebut adalah membawa masyarakat Kabupaten Grobogan menjadi bersih dan sehat secara luas dan secara khusus pengembangan sanitasinya memenuhi standar minimal pelayanan yang disyaratkan serta berwawasan lingkungan dan dilakukan secara berkelanjutan baik pelaksanaannya maupun pengoperasian dan pemeliharannya. Terkait dengan RPJMD baru yang memuat visi misi

Kabupaten Grobogan 2021-2026, maka visi misi sanitasi Kabupaten Grobogan akan tetap relevan dengan misi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3-1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan

Visi Kab/Kota	Misi Kab/Kota	Visi Sanitasi Kabupaten Grobogan	Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan
“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2 Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana 3 Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat 	Terwujudnya Sanitasi Grobogan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sehat dan Lebih Sejahtera”	<p>Misi Air Limbah Domestik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Memantapkan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan; 2 Mengembangkan cakupan pelayanan air limbah domestik; 3 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. <p>Misi Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan persampahan yang terpadu, handal serta berorientasi lingkungan; 2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan didukung pengembangan kelembagaan.

Sumber: Pokja PKP, 2021

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dalam pencapaian visi misi sanitasi Kabupaten Grobogan tidak lepas dari tujuan visi misi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu pada tujuan ke dua yaitu “Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana”. Sasarannya meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Diharapkan dengan tujuan tersebut dapat menopang dan mengimplementasikan terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang bersih dan sehat dengan pembangunan sanitasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran sanitasi Kabupaten Grobogan dapat dirinci sebagai berikut, berdasarkan penyesuaian RPJMD dan kajian bersama Pokja PKP yang tertuang dalam kerangka pembangunan sanitasi menjadi layanan dasar yang wajib disediakan untuk seluruh masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kualitas Infrastruktur air limbah domestik dan menjamin ketersediaan yang berkelanjutan untuk semua.	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat tertutup dan terbuka pada tahun 2026 berkurang menjadi 0%. • Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 90% pada tahun 2026. • Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan SPAL • Capaian akses aman sebesar 15% pada tahun 2026 dengan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. • Perilaku penduduk yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) berdasarkan studi EHRA tahun 2021 sebanyak 6% • Penduduk yang menggunakan cubluk/tangki septik individual tidak layak di tahun 2021 sebanyak 19,36% • Cakupan kepemilikan tangki septik individual layak pakai pada tahun 2021 sebanyak 71,77% • Jumlah IPAL Komunal di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebanyak 205 unit. • Cakupan pelayanan SPALD-T di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mencapai 3,00%. • IPLT di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 terdapat 1 IPLT yaitu IPLT Ngembak dengan kapasitas 21 m³/hari. • Truk tinja milik pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebanyak 3 unit.

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan program Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) yang menjadi upaya untuk mencapai target akses sanitasi yang bersih dan baik lewat pengolahan air limbah domestik.. 	

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sub sektor air limbah domestik adalah tercapainya Target RPJMN 2020-2024 90% akses layak air limbah, termasuk 15% akses aman dan 0% rumah tangga yang mempraktikkan BABS di tempat terbuka. yang menitikberatkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas serta didukung adanya regulasi dan kelembagaan yang baik.

Berdasarkan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas kegiatan: a) pengurangan sampah; dan b) penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, berdasarkan target tersebut dan UU No. 18/2008, pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan sampah yang baik terdiri atas akses terhadap penanganan dan pengurangan sampah domestik di perkotaan.

Tercapainya Target RPJMN 2020-2024 100% akses pengelolaan sampah di perkotaan (80% pengangkutan; 20% pengurangan)

Tabel 3-3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Mewujudkan akses pengelolaan sampah yang baik terdiri atas akses terhadap penanganan dan pengurangan sampah domestik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM yang memadai dan merata bagi semua.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026. • Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pelayanan persampahan sebesar 79,9% • Jumlah TPS di Kabupaten Grobogan sebanyak 23 TPS • TPS3R di Kabupaten Grobogan sebanyak 8 Unit • Bank Sampah di Kabupaten Grobogan Sebanyak 218 Bank Sampah • Sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan terdiri dari 98 gerobak, 18 unit motor roda tiga, 4 Dump Truck, 6 Arm Roll Truck, 1 Bulldozer, 1 Excavator dan 1 TPA. • Jumlah Timbulan Sampah harian disominasi sumber sampah rumah tangga sebesar 524,2 Ton/Hari urutan selanjutnya yaitu dari pasar sebesar 109,9 ton/hari. • Timbulan sampah Kabupaten Grobogan 308.618,46 ton/tahun, Persentase pengurangan sampah 14,24%, Persentase penanganan sampah 17,84%, Persentase sampah terkelola 32,09% dan Persentase sampah tidak terkelola 67,91%

Sumber: Pokja PKP, 2021

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pengembangan pengelolaan sanitasi Kabupaten Grobogan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pentahapan tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan secara tepat dan akurat sumber daya yang terbatas jumlahnya, baik dari segi alokasi anggaran, waktu, maupun tenaga pelaksana. Dalam pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke dalam tahap jangka pendek (1-2 tahun), menengah (5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun), maupun kombinasi antara 2 tahapan.

Penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah kepadatan penduduk yang mendiami desa/kelurahan, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai unit analisis terkecil dalam penetapan strategi sanitasi Kabupaten Grobogan. Kelurahan dengan kepadatan penduduk yang besar, terutama CBD membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding kelurahan dengan kepadatan rendah.

Pertimbangan berikutnya dalam menentukan pentahapan adalah kondisi fisik lingkungan, terutama relief (kemiringan lereng) dan kondisi tanah. Sebagai contoh : kondisi tanah dengan relief terjal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan saluran off-site maupun sanitasi on-site individual. Pertimbangan terhadap faktor fisik penting untuk dilakukan agar pembangunan sarana sanitasi yang dilakukan pemanfaatannya dapat optimal dalam jangka panjang.

Pertimbangan selanjutnya adalah resiko sanitasi yang dimiliki oleh desa/kelurahan tersebut. desa/Kelurahan dengan resiko sanitasi terbesar akan mendapatkan prioritas penanganan terlebih dahulu. Pertimbangan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kesesuai dengan rencana RTRW Kota dan RPJMD Kabupaten Grobogan yang telah disusun.

Indikator yang digunakan dalam tahapan cakupan pelayanan dalam dokumen strategi sanitasi ini adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.

Tahapan Pengembangan Sanitasi Air Limbah

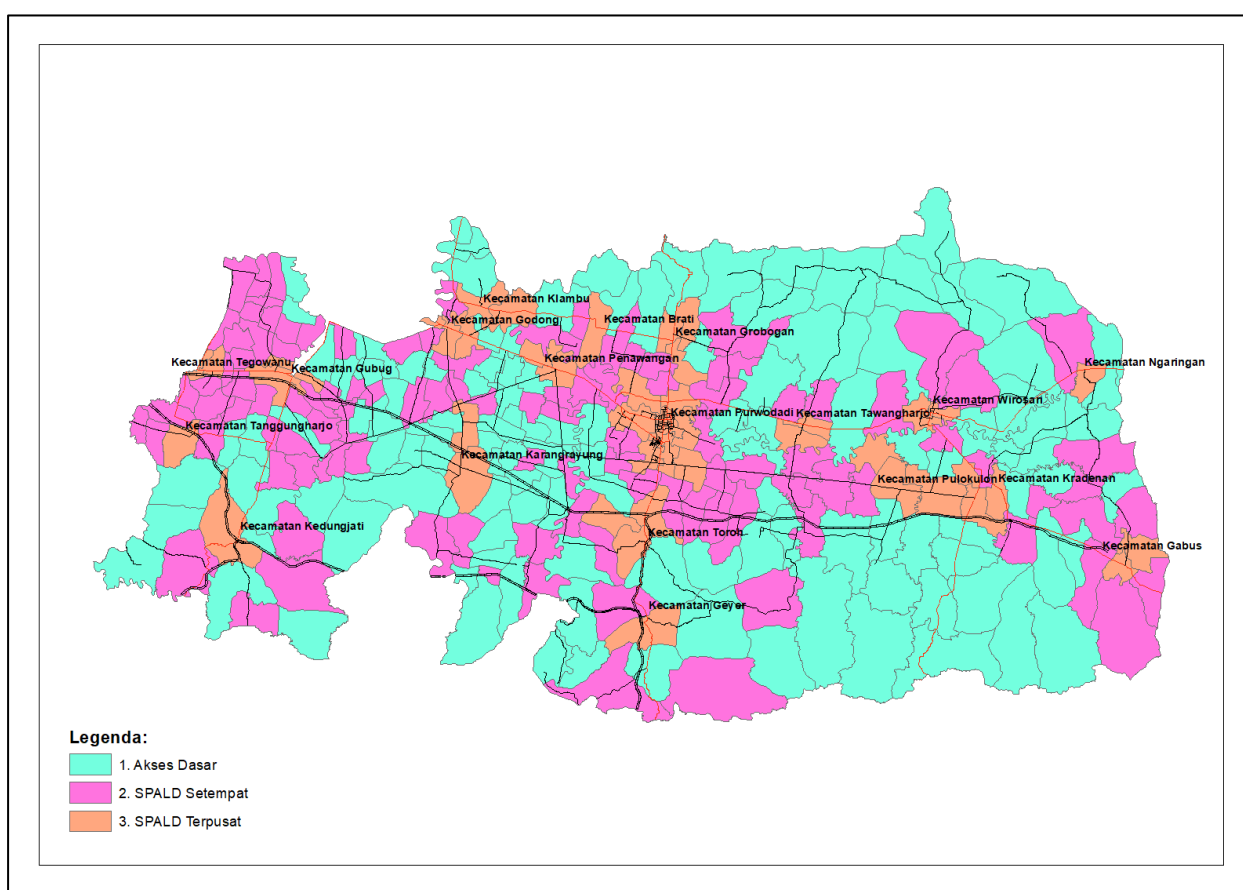
Berdasarkan isu pokok sanitasi air limbah domestik, permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

- Permasalahan yang dihadapi adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kabupaten Grobogan lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri.
- Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar.
- Kurangnya ketersediaan air bersih untuk Jamban dan MCK cenderung mendorong masyarakat berperilaku kurang sehat.
- Kurangnya akses masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan dana dan modal sehingga masyarakat sering beralasan tidak memiliki biaya untuk membuat jamban.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hidup sehat. Pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antar kependudukan dan lingkungan hidup belum memadai, sementara berbagai kearifan tradisional yang berorientasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sudah lama ditinggalkan karena faktor ekonomi, teknologi dan lain-lain.

- Maraknya dugaan pembuangan limbah cair dari rumah penduduk, hotel dan restoran ke badan sungai. Para pelaku usaha memilih mengambil jalan pintas membuang limbah cair ke sungai karena biaya penyedotan lumpur tinja meningkat dari biaya normal.

Berdasarkan analisis penentuan zona dan sistem sanitasi dari Instrumen Profil sanitasi Kabupaten Grobogan, diperoleh gambaran bahwa untuk penetapan zona air limbah di Kabupaten Grobogan, dalam pengelolaan sistem air limbah domestik dikategorikan dalam 3 (Tiga) tipikal sistem, yaitu :

- 1 Akses Dasar
- 2 SPALD Setempat
- 3 SPALD Terpusat



Sumber: Instrumen SSK, 2021

Gambar 3-1 Zona Sistem Air Limbah

Berdasarkan hasil instrument SSK didapatkan tahapan prioritas penanganan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan. Tahapan pengembangan air limbah dibagi menjadi tiga kondisi yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini didasarkan pada perhitungan target RPJMN 2020-2024 yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Pentahapan pembangunan sanitasi sub sektor air limbah di kawasan perkotaan diarahkan dengan pengembangan Akses Aman. Tahapan Pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3-4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan %	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Akses Aman	13,4%	14,1%	14,6%
2	Akses Layak	82,0%	90,0%	95,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	58,6%	62,9%	65,9%
	Akses Layak Bersama	9,3%	10,9%	11,5%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,7%	2,1%	3,0%
3	Belum Layak	18,5%	9,5%	0,0%
4	BABS Tertutup			
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

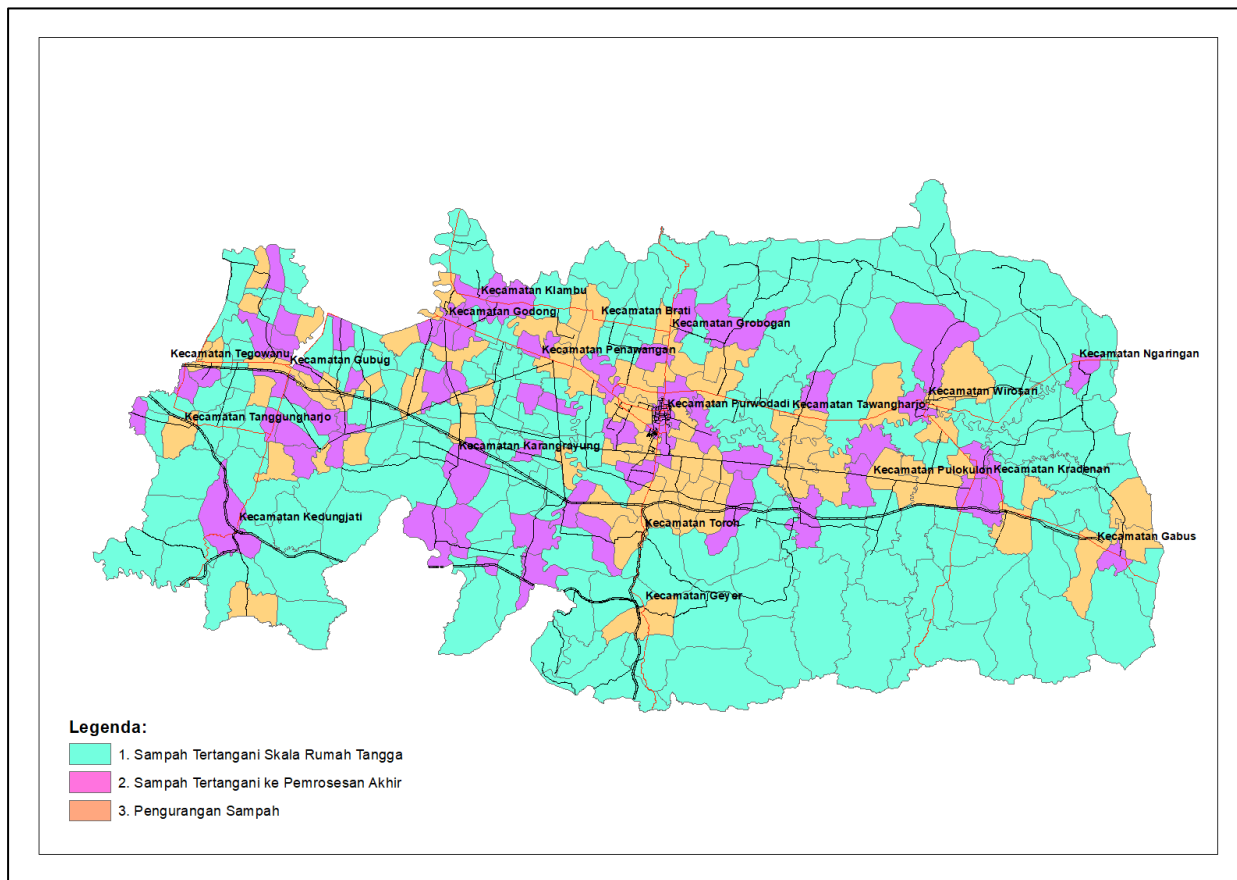
Tahapan Pengembangan Sanitasi Persampahan

Permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan masih banyak wilayah yang belum terlayani oleh pengelola persampahan., permasalahan utama sektor persampahan adalah :

- Belum ada dana kompensasi untuk petugas dan masyarakat di wilayah resiko tinggi
- Sampah belum terangkut semua
- Belum ada TPA yang memadai dan memenuhi syarat sesuai UU no. 18/2008
- Kurangnya kapasitas TPA
- Belum ada masterplan persampahan
- Transfer depo masih ada dilingkungan permukiman
- Belum ada workshop untuk mengelola sarpras
- Pendidikan atau SDM karyawan kurang mendukung
- Kurangnya jumlah tenaga pengumpul sampah
- Kurangnya lembaga pengelola sampah ditingkat masyarakat
- Tidak ada lembaga pengelola sampah di tingkat RT/RW
- Masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai
- Keterbatasan informasi marketing di masyarakat terkait pemasaran hasil composting
- Belum ada keseragaman jam pembuangan sampah oleh masyarakat ke TPS
- Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah
- Masyarakat belum mengetahui cara composting
- Belum ada kerjasama pengelolaan sampah dengan kabupaten lain
- Wilayah luas dan berkontur
- Jumlah penduduk bertambah tidak diimbangi penyediaan sarpras
- Kurangnya alternative pengemasan barang terkait penggunaan plastic

- Pengembang belum menyediakan tempat pengelolaan sampah

Pengembangan sektor sampah ditentukan oleh data jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, prosentase penduduk yang sampahnya terangkut dan luas are terbangun. Adapun hasil perhitungan dalam pentahapan persampahan adalah sebagai berikut :



Sumber: Instrumen SSK, 2021

Gambar 3-2 Peta Zonasi Persampahan

Tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Grobogan terbagi dalam 4 zona penanganan yang diperhitungkan dari prosentase jumlah penduduk dalam jangka menengah yaitu 5 tahun, zona tersebut adalah

1. Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga
2. Sampah Tertangani Pemrosesan Akhir
3. Pengurangan Sampah

Tahapan pengembangan persampahan dibagi menjadi tiga kondisi yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini didasarkan pada perhitungan target universal acces yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai pada tabel berikut

Tabel 3-5 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
1	Penanganan Sampah Perkotaan	18,4%	69,1%	70,0%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	13,6%	28,4%	30,0%

Sumber: Instrumen SSK, 2021

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi

Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada beberapa dokumen strategis daerah seperti APBD 5 tahun terakhir, LKPJ Bupati, RPJMD, dan RPIJM Kabupaten Grobogan, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Grobogan melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Grobogan 5 tahun kedepan.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitas sebagaimana diidentifikasi didalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Grobogan. Dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Grobogan, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBD Kabupaten Grobogan maupun bantuan provinsi. Analisis belanja diterus pinjamkan/diterus hibahkan ke kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi yang dipergunakan untuk pembangunan sanitasi, ataupun dana pendampingan untuk kegiatan sanitasi dari Pusat/Provinsi. Pengurangan ini akan menunjukkan belanja sanitasi yang didanai oleh APBD murni kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional.

Tabel 3-6 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	32,38	38,11	43,35	57,20	62,90	18,06%
1.1	Air Limbah Domestik	12,51	14,48	16,30	24,40	28,97	
1.2	Sampah Domestik	19,87	23,63	27,04	32,81	33,93	
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2)	21,48	25,87	26,40	26,74	25,25	4,13%
2.1	DAK Sanitasi	6,94	8,62	9,06	9,43	9,13	
2.2	DAK Lingkungan Hidup	6,46	7,67	7,71	7,70	7,16	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	8,07	9,58	9,64	9,62	8,95	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	0,18	0,17	3,73	4,16	4,53	122,92%
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	10,72	12,07	13,22	26,30	33,12	32,60%
	Total Belanja Langsung	1.471,70	1.524,59	1.545,31	1.682,45	1.655,26	2,98%

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	0,73%	0,79%	0,86%	1,56%	2,00%	28,76%
	Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)						5%

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, hasil tinjauan realisasi selama 5 tahun terakhir pendanaan sanitasi mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penanganan sanitasi cukup tinggi . Namun demikian jika dibandingkan antara porsi APBD murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung, porsi sanitasi masih sangat kecil yaitu yaitu 2% dengan pertumbuhan rata rata 2,98% untuk APBD murni. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi di Kabupaten Grobogan belum merupakan masalah yang mendesak dibandingkan dengan permasalahan lainnya.

Tabel 3-7 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp. Milyar)					Total Pendanaan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perkiraan Belanja Langsung	1.375,98	1.395,98	1.427,62	1.437,62	1.447,62	7.084,82
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	24,08	24,43	24,98	25,16	25,33	123,98
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	19,18	20,19	20,40	21,04	21,95	102,77

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkiraan belanja langsung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kegiatan sanitasi di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Berdasarkan rata rata porsi pendanaan sanitasi, maka sampai akhir tahun perencanaan Tahun 2026 perkiraan APBD murni sanitasi mencapai 25,33 M dengan rata rata per tahunnya mencapai 0,5 M. sedangkan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi mencapai total 102,77M dengan rata rata pendanaan untuk setiap tahunnya 1M.

Tabel 3-8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp. Milyar)					Pertumbuhan rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Sanitasi	3,24	3,81	4,33	5,72	6,29	18,06%
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	1,25	1,45	1,63	2,44	2,90	23,36%
1.2	Sampah domestik						

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp. Milyar)					Pertumbuhan rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	1,99	2,36	2,70	3,28	3,39	14,32%

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendanaan sanitasi untuk operasional lebih difokuskan pada pengelolaan sampah dan drainase. Sektor persampahan menjadi hal yang *urgent* di Kabupaten Grobogan karena membutuhkan operasional yang cukup besar dengan porsi rata rata per tahunnya 14,32%. Sedangkan untuk sub sektor air limbah operasional dan pemeliharanya diserahkan kepada masyarakat secara swadaya, mengingat program kegiatan yang dicanangkan untuk air limbah berbasis masyarakat. Dari total realisasi operasional mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan porsi rata rata setiap tahunnya adalah 18,06% untuk kedua sektor tersebut.

Tabel 3-9 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Grobogan untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun

No	Uraian	Belanja Operasional/Pemeliharaan (Rp. Milyar)					Total Pendanaan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Belanja Sanitasi	4,79	5,05	5,10	5,26	5,49	25,69
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	1,92	2,02	2,04	2,10	2,20	10,28
1.2	Sampah domestik						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	2,88	3,03	3,06	3,16	3,29	15,41

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perkiraan pendanaan sanitasi untuk operasional lebih difokuskan pada pengelolaan sampah dan Air Limbah Domestik. Untuk operasional persampahan sampai akhir tahun perencanaan mencapai 15,41 M. Sedangkan air limbah operasional dan pemeliharanya diserahkan kepada masyarakat dengan menggunakan pola yang sudah ada yaitu secara swadaya melalui program yang sudah ada sebelumnya. Adapaun total perkiraan operasional sampai akhir tahun perencanaan mencapai 25,69M.

Tabel 3-10 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Grobogan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp. Miliar)					Total Pendanaan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	4,79	5,05	5,10	5,26	5,49	25,69
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	24,08	24,43	24,98	25,16	25,33	123,98
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	19,18	20,19	20,40	21,04	21,95	102,77

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp. Miliar)					Total Pendanaan
		2022	2023	2024	2025	2026	
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	19,28	19,38	19,88	19,90	19,85	98,29
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	14,38	15,14	15,30	15,78	16,46	77,07

Sumber: Pokja PKP, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampai akhir tahun perencanaan perkiraan kemampuan APBD murni untuk kegiatan SSK mencapai 123,98 M dengan rincian untuk kegiatan per tahunnya mencapai 25 M. Sedangkan untuk komitmen pendanaan SSK sampai akhir perencanaan sebesar 102,7 M dengan rincian untuk kegiatan per tahunnya mencapai 20 M. Perkiraan ini tidak hanya mencakup kegiatan ketiga sub sektor melainkan juga meliputi sub sektor penyehatan lingkungan permukiman, PHBS, Air Bersih, dan Kesehatan. Sedangkan operasional lebih difokuskan pada pemeliharaan sub sektor persampahan. Anggaran ini diharapkan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Grobogan secara umum sehingga misi masing-masing sub sektor sanitasi dapat terwujud dengan benar dan berkelanjutan.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin). Selain itu, juga dijelaskan mengenai informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari simulasi menggunakan Instrumen SSK. Secara umum strategi pengembangan sanitasi ini berdasarkan analisa SWOT yang di paduserasikan dengan kerangka kerja logis sehingga dapat dicapai strategi yang jelas dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara rinci adalah berikut ini

4.1 Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik menggunakan SPALD Setempat atau dengan menggunakan tangki septic namun masih ada juga masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) misalnya di sungai dan kebun. Untuk limbah rumah tangga masih banyak yang membuang ke saluran drainase, jadi belum ada saluran air limbah secara khusus. Pengelolaan air limbah domestik masih belum maksimal dalam penanganannya. Hal ini terlihat dari tingginya angka BABS, jamban tidak layak, ketersediaan truk tinja minim dan Prasarana IPLT belum maksimal, serta belum ada peraturan yang mengatur tentang pembuangan air limbah domestik masyarakat termasuk standar pembuatan tangki septic.

Peraturan tentang pengolahan lumpur tinja dan pengoperasian IPLT baik retribusi maupun sistem penyedotan belum tersedia, Keterbatasan pendanaan juga masih minim sehingga belum maksimal dalam pelaksanaannya. Peran serta masyarakat dan swasta belum maksimal dalam kegiatan pengembangan air limbah karena dianggap bukan program prioritas.

Tabel 4-1 Analisis SWOT Air Limbah

No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
	KEKUATAN (STRENGTHS)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Pokja PKP terbentuk dan berkualitas				4	4
1.2	Kelembagaan tingkat RT, RT, PKK, Kader posyandu		2			2
1.4	Adanya BKM KSM tingkat masyarakat		2			2
1.5	Sudah terdapat Dokumen SSK				4	3
	Jumlah					12

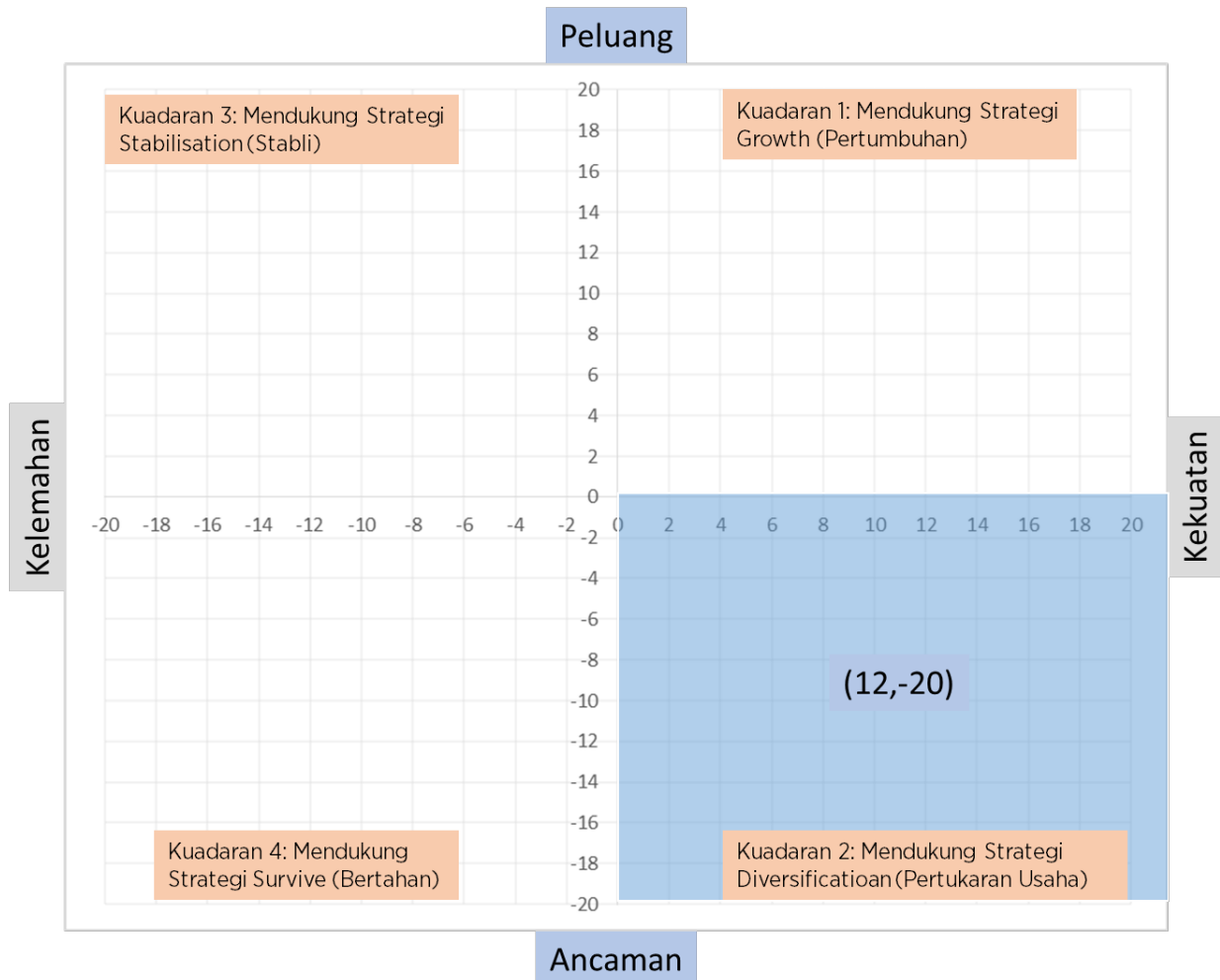
No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
2	Aspek Keuangan					
2.1	Tersedianya APBD dalam pengelolaan sanitasi air limbah				4	4
2.2	Adanya program yang mendukung untuk sanitasi air limbah			3		3
	Jumlah					7
3	Aspek Teknis Operasional					
3.1	Adanya program Sanimas, Sandes			3		3
3.3	Kegiatan pemeriksaan baku mutu dilakukan		2			2
3.4	ketersedian truk tinja			3		3
3.5	Sudah memiliki IPLT				4	4
	Jumlah					12
4	Aspek Komunikasi					
4.1	Terdapat media lokal untuk mendukung kegiatan sanitasi air limbah		2			2
4.2	Media sosialisasi dari OPD terkait PHBS		2			2
	Jumlah					4
5	SDM					
5.1	Personal POKJA PKP yang berkualitas				4	4
5.2	Peningkatan kapasitas pokja melalui pelatihan			3		3
	Jumlah					7
	Jumlah Nilai Kekuatan					42
	KELEMAHAN (WEAKNESS)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Sinkronisasi Pokja PKP belum terjalin maksimal			3		3
1.3	Koordinasi antar instansi belum maksimal			3		3
1.4	Pelaksanaan perbub tentang penanganan air limbah dan lumpur tinja belum berjalan efektif dari segi penindakan				4	4
	Jumlah					10
2	Aspek Keuangan					
2.1	Anggaran sektor air limbah belum menjadi prioritas				4	4
2.2	Rasio anggaran sanitasi dalam APBD masih kecil			3		3
	Jumlah					7
3	Aspek Teknis Operasional					
3.1	Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik		2			2
3.2	Truk tinja minim				4	4
	Jumlah					6
4	Aspek Komunikasi					
4.1	Kegiatan komunikasi belum berkelanjutan		2			2
	Jumlah					
5	SDM					2
5.1	Kemampuan personil terkait pengelolaan air limbah belum maksimal.			3		3
	Jumlah					3
	Jumlah Nilai Kelemahan					28

No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
	Selisih Nilai Kekuatan - Kelemahan					12

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
	PELUANG (OPPORTUNITIES)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Dukungan Pokja PPAS Nasional				4	4
1.2	dukungan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				4	4
1.3	Sanitasi menjadi layanan dasar yang wajib disediakan untuk seluruh masyarakat				4	4
1.4	Pembangunan subsektor Air Limbah Domestik terpapar dalam visi dan misi RPJMD 2021-2026 meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah			3		3
1.5	Kelembagaan di tingkat kelurahan sudah sebagian terbentuk (KPP, KSM, BKM)			3		3
	Jumlah					18
2	Aspek Keuangan					
2.1	Potensi pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, Tugas Perbantuan, Belanja Kementrian, DAK Sanitasi, APBD Propinsi, serta sumber dana internasional dari lembaga multilateral (world bank, Asian Development Bank, Ausaid), CSR dan partisipasi masyarakat				4	4
2.2	Peluang swadaya masyarakat			3		3
	Jumlah					7
3	Aspek Komunikasi					
3.1	Berkembangnya media sosial, cetak dan elektronik		2			2
3.2	Akses masyarakat terhadap teknologi informasi/ internet		2			2
3.3	Peran Media lokal (cetak, radio dan televisi) yang dapat digunakan kegiatan sosialisasi dan kampanye		2			2
3.4	Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai penyebaran sumber informasi				4	4
3.5	Adanya event kesenian budaya dan kerakyatan		2			2
	Jumlah					12
4	Aspek Teknis Operasional					
4.1	Tersedianya teknologi penanganan air limbah domestik				4	4
4.2	Adanya kontribusi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan ipal komunal yang dikelola kelompok masyarakat secara mandiri			3		3
	Jumlah					7
5	Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender					
5.1	Adanya peran masyarakat dalam sistem pengelolaan air limbah			3		3
5.2	Adanya perusahaan sedot tinja swasta			3		3

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
5.3	Adanya organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), PKK dan Kader Pos Yandu		2			2
	Jumlah					8
6	Aspek Sosial Budaya					
6.1	kerja bakti sebagai kearifan lokal			3		3
	Jumlah					3
	Jumlah Nilai Peluang					45
	ANCAMAN (THREATS)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Program Sanitasi antar OPD belum terintegrasi			3		3
1.2	Belum seluruhnya memahami dan berpihak kepada program sanitasi di tingkat pengambil kebijakan				4	4
1.3	Kemitraan antara Pemda dan pihak swasta belum terjalin			3		3
	Jumlah					10
2	Aspek Keuangan					
2.1	Kebutuhan biaya atau anggaran pengelolaan air limbah sangat besar				4	4
2.2	Pertambahan penduduk yang cukup tinggi memerlukan peningkatan anggaran untuk sektor sanitasi air limbah			3		3
2.3	Perhatian masyarakat dan swasta terhadap penganggaran sektor air limbah belum menjadi prioritas			3		3
2.4	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan berupa swadaya masyarakat dan partisipasi swasta.			3		3
	Jumlah					13
3	Aspek Komunikasi					
3.1	Peran media belum optimal dalam memberikan informasi pengelolaan air limbah kepada masyarakat.		2			2
3.2	Sosialisasi tentang air limbah belum maksimal		2			2
3.3	Isu air limbah belum menjadi topik yang menarik		2			2
3.4	Adanya hambatan proses komunikasi dan promosi sanitasi dari Pemerintah kepada Pelaku Bisnis			3		3
	Jumlah					9
4	Aspek Teknis Operasional					
4.1	Terbatasnya lahan untuk pembangunan IPAL Komunal di masyarakat				4	4
4.2	Tangki septik belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan (suspek tidak aman tinggi)			3		3
4.3	Kebiasaan masyarakat membuang air limbah tanpa pengolahan				4	4
4.4	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat			3		3
4.5	Ada beberapa bangunan MCK/IPAL Komunal yang belum berfungsi optimal			3		3
4.6	Banyaknya WC cemplung dan plengsengan				4	4
	Jumlah					21

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
5	Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender					
5.1	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan air limbah				4	4
5.2	Kondisi sosial budaya masyarakat yang masih mengutamakan prestise atau gengsi			3		3
	Jumlah					7
6	Aspek Sosial Budaya					
6.1	Perilaku masyarakat terkait BABS masih tinggi				4	4
6.2	Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah masih rendah				4	4
6.3	Banyaknya WC cemplung dan plengsengan				4	4
	Jumlah					12
	Jumlah Nilai Ancaman					65
	Selisih Nilai Peluang - Ancaman					-20



Gambar 4-1 Kuadran SWOT Air Limbah Domestik

Tabel 4-2 Strategi SWOT Air Limbah Domestik

Strategi	S	W
O	Strategi S – O	Strategi W – O
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran dalam sistem pengelolaan air limbah domestik • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pokja terhadap peraturan dan perundangan tentang air limbah • Meningkatkan kapasitas pokja terhadap teknologi penanganan air limbah domestik • Meningkatkan kapasitas Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap penanganan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran dalam penyediaan truk tinja • Mengundang peraturan daerah khusus tentang air limbah dan lumpur tinja • Meningkatkan kapasitas personil pengelolaan air limbah
T	Strategi S – T	Strategi W – T
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan alokasi pengelolaan air limbah pada APBD • Meningkatkan penyebaran informasi program dan kebijakan sanitasi • Meningkatkan anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IPAL Komunal • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah oleh POKJA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran pengelolaan air limbah • Menurunkan tingkat kebiasaan masyarakat membuang air limbah • Menurunkan tingkat perilaku masyarakat terkait BABS

Tabel 4-3 Strategi Penanganan Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas Infrastruktur air limbah domestik dan menjamin ketersediaan yang berkelanjutan untuk semua.	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat tertutup dan terbuka pada tahun 2026 berkurang menjadi 0%. • Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 90% pada tahun 2026. • Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan SPAL • Capaian akses aman sebesar 15% pada tahun 2026 dengan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran dalam sistem pengelolaan air limbah domestik • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pokja terhadap peraturan dan perundangan tentang air limbah • Meningkatkan kapasitas pokja terhadap teknologi penanganan air limbah domestik • Meningkatkan kapasitas Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap penanganan air limbah domestik • Meningkatkan anggaran dalam penyediaan truk tinja • Mengundang peraturan daerah khusus tentang air limbah dan lumpur tinja

Tujuan	Sasaran	Strategi
	<p>menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan program Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) yang menjadi upaya untuk mencapai target akses sanitasi yang bersih dan baik lewat pengolahan air limbah domestik.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas personil pengelolaan air limbah • Meningkatkan alokasi pengelolaan air limbah pada APBD • Meningkatkan penyebaran informasi program dan kebijakan sanitasi • Meningkatkan anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IPAL Komunal • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah oleh POKJA. • Meningkatkan anggaran pengelolaan air limbah • Menurunkan tingkat kebiasaan masyarakat membuang air limbah • Menurunkan tingkat perilaku masyarakat terkait BABS • Mengoptimalkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk peningkatan akses sanitasi yang layak aman dan ideal.

Tabel 4-4 Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah

Permasalahan Mendesak	Isu – Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
User Interface : Tangki septik suspek tidak aman : 91,48% memiliki akses tangki septik individual belum aman	<ul style="list-style-type: none"> IPLT belum optimal Belum ada masterplan Kualitas SDM kurang Belum ada dukungan pendanaan dari swasta Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan meningkatnya volume air limbah Masih banyaknya jamban yang tidak layak Belum adanya ketertarikan swasta dalam pengelolaan limbah Pontensi pendanaan dari masyarakat belum tergali 	Meningkatkan kualitas Infrastruktur air limbah domestik dan menjamin ketersediaan yang berkelanjutan untuk semua.	<ul style="list-style-type: none"> Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat tertutup dan terbuka pada tahun 2026 berkurang menjadi 0%. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 90% pada tahun 2026. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan SPAL Capaian akses aman sebesar 15% pada tahun 2026 dengan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan anggaran dalam sistem pengelolaan air limbah domestik Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pokja terhadap peraturan dan perundangan tentang air limbah Meningkatkan kapasitas pokja terhadap teknologi penanganan air limbah domestik Meningkatkan kapasitas Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap penanganan air limbah domestik Meningkatkan anggaran dalam penyediaan truk tinja Mengundangn peraturan daerah khusus tentang air limbah dan lumpur tinja 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan advokasi pola hidup bersih dan sehat Sosialisasi dan advokasi pengelolaan air limbah rumah tangga kepada pengusaha sedot tinja swasta Pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga sistem setempat (on site) Pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga menggunakan sarana komunal dan IPAL kawasan Penindakan pelanggaran Perda/Perbub 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Kampanye tentang pengelolaan air limbah rumah tangga melalui program STBM Pembangunan jamban sehat individu/Jamban Mandiri Program Sanitase Perdesaan Padat Karya (Sandes) dan Sanitasi Berbasis masyarakat (Sanimas) Pembangunan MCK komunal Pembangunan IPAL komunal Revitalisasi IPLT Pengadaan truck tinja
Langsung ke Drainase : 0,4% memiliki akses cubluk/tangki septik individual belum aman						
Pengumpulan dan penampungan / pengolahan awal						
Tangki septic belum pernah di kuras : 83,01% tangki septic belum pernah di kuras						
Jamban Bersama : 12% menggunakan jamban bersama						
IPAL komunal : 601KK terkoneksi ke IPAL komunal						
Pengangkutan /pengaliran						

Permasalahan Mendesak	Isu – Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Truk tinja : 3 unit milik Pemda (Beroperasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah masih rendah 		tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan program Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) yang menjadi upaya untuk mencapai target akses sanitasi yang bersih dan baik lewat pengolahan air limbah domestik.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas personil pengelolaan air limbah • Meningkatkan alokasi pengelolaan air limbah pada APBD • Meningkatkan penyebaran informasi program dan kebijakan sanitasi • Meningkatkan anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IPAL Komunal • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah oleh POKJA. • Meningkatkan anggaran pengelolaan air limbah • Menurunkan tingkat kebiasaan masyarakat membuang air limbah • Menurunkan tingkat perilaku masyarakat terkait BABS • Mengoptimalkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk peningkatan akses sanitasi yang layak aman dan ideal. 	Pengelolaan air limbah <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi IPLT 	
Drainase lingkungan : menimbulkan pencemaran lingkungan						
Pengolahan akhir terpusat / semi						
IPLT: pengelolaan belum optimal (kondisi Rusak Berat perlu perbaikan)						
Daur ulang / pembuangan akhir						
Sungai : 20% yang melakukan pembuangan limbah tinja yang di sedot, langsung ke sungai.						
Kelembagaan Belum adanya penindakan pelanggaran (Perda/Perbup) terkait pengelolaan limbah domestik						

4.2 Pengelolaan Persampahan

Permasalahan persampahan di Kabupaten Grobogan terutama berkaitan dengan cakupan wilayah pelayanan, dimana sampai saat ini jumlah sampah yang terangkut baru 9 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada. Hal ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan identifikasi isu – isu terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Beberapa sampah sudah dikelola dengan baik melalui penyediaan sarana prasarana baik dari pewadahan pengangkutan sampai proses akhir ke TPA khususnya wilayah perkotaan. Begitu pula dengan pengelolaan sampah mandiri yang tersebar di beberapa wilayah baik secara individu maupun kelompok meskipun sangat kecil jumlahnya. Selebihnya pengelolaan sampah masih ada yang dibakar, ditimbun bahkan di buang ke sungai.

Sistem Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Grobogan saat ini menggunakan TPA Ngembak yang dioptimalkan untuk tempat pemrosesan sampah yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah cukup maksimal ketersediaannya pada daerah pelayanan (TPS dan armada) yang mencakup 9 kecamatan. Sarana TPS dan pengangkutan masih terbatas sehingga kurang mampu menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Dengan anggaran yang terbatas maka pengelolaan persampahan hanya menjangkau di beberapa wilayah perkotaan. Arah pengembangan pengelolaan persampahan sudah cukup jelas karena sudah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga yang dibutuhkan adalah pelaksanaan di lapangan untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan serta diperlukan dukungan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah yang maksimal.

Tabel 4-5 Analisis SWOT Persampahan

No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Adanya Perda mengenai Retribusi sampah atau kebersihan dan Pengelolaan sampah				4	4
1.2	Adanya tupoksi OPD yang sudah jelas dalam pengelolaan persampahan				4	4
1.3	Pokja PKP terbentuk dan berkualitas			3		3
1.4	Kelembagaan tingkat RT, RT, PKK, Kader posyandu			3		3
1.5	Adanya BKM KSM tingkat masyarakat		2			2
1.6	Sudah terdapatnya Masterplan Persampahan				4	4
	Jumlah					20
2	Aspek Keuangan					
2.1	Tersedianya APBD dalam pengelolaan persampahan		2			2

No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
2.2	Adanya program yang mendukung untuk persampahan			3		3
	Jumlah					5
3	Aspek Teknis Operasional					
3.1	Adanya TPA, TPS 3R, TPS dan Bank Sampah				4	4
3.2	Adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST) (Pemilahan, Pengomposan dan Insinerasi)				4	4
3.3	Adanya program persampahan berbasis masyarakat (Bank Sampah, Pengomposan)				4	4
3.3	Tersedianya armada pengangkutan persampahan				4	4
	Jumlah					16
4	Aspek Komunikasi					
4.1	Terdapat media lokal untuk mendukung kegiatan persampahan		2			2
4.2	Media sosialisasi dari OPD terkait kegiatan persampahan			3		3
	Jumlah					5
5	SDM					
5.1	SDM DLH Bidang Pengelolaan Sampah yang berkualitas		2			2
5.2	Peningkatan kapasitas SDM DLH Bidang Pengelolaan Sampah melalui pelatihan			3		3
	Jumlah					5
	Jumlah Nilai Kekuatan					51
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Koordinasi antar dinas belum terjalin maksimal			3		3
1.2	Belum semua kelurahan memiliki kelembagaan bidang persampahan			3		3
1.3	Belum terdapatnya regulasi yang khusus bidang persampahan				4	4
1.4	Monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan belum dilakukan.			3		3
1.5	Belum maksimalnya dukungan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah				4	4
1.6	SOT bidang persampahan belum maksimal		2			2
	Jumlah					19
2	Aspek Keuangan					
2.1	PAD dari retribusi sampah masih sangat rendah			3		3
2.2	Kesadaran masyarakat tentang iuran retribusi kebersihan masih rendah.			3		3
2.3	Anggaran untuk pengelolaan persampahan dalam APBD masih rendah				4	4
	Jumlah					10
3	Aspek Teknis Operasional					

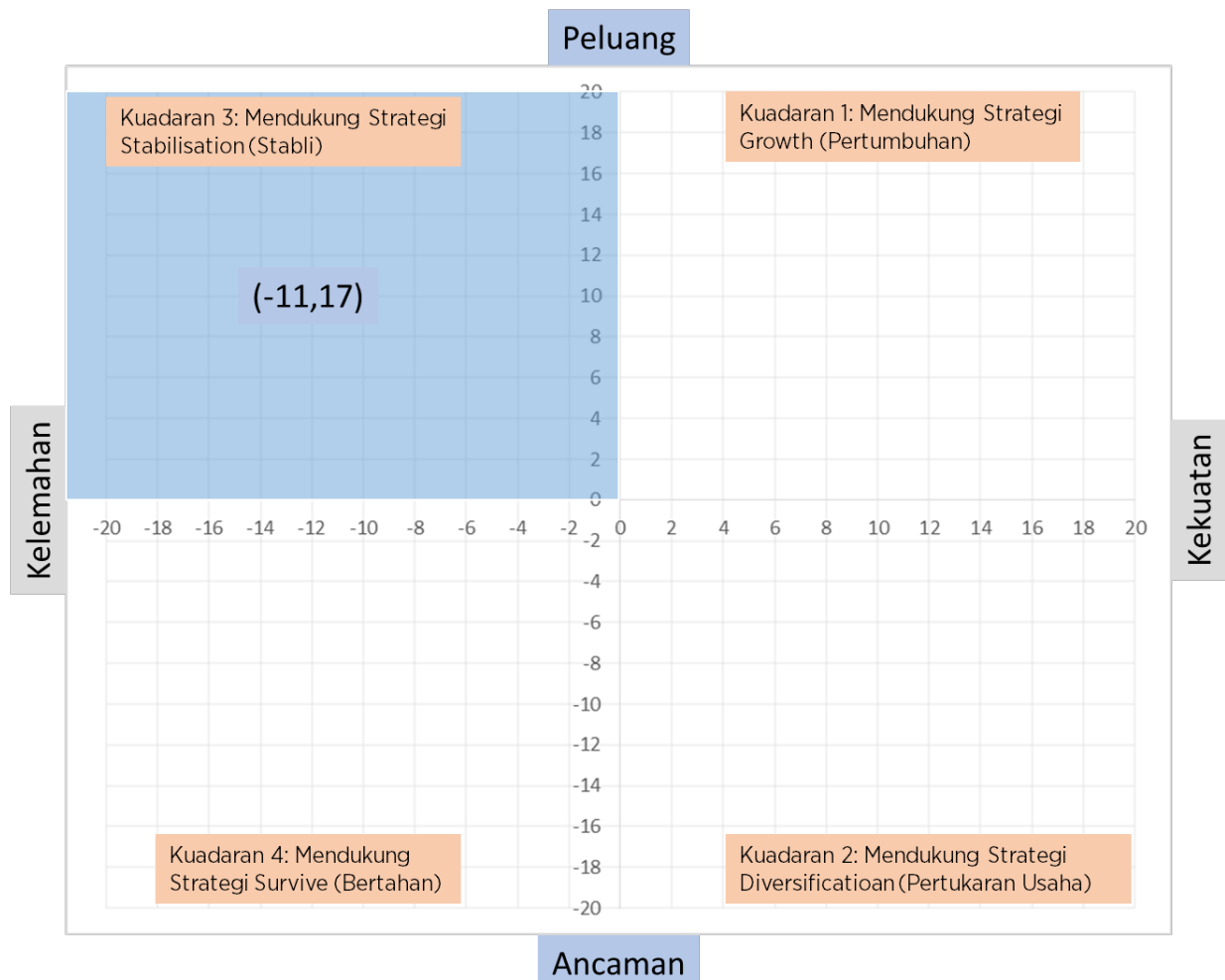
No.	Faktor Internal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
3.1	Masih rendahnya program/Kegiatan TPS 3R yang berbasis masyarakat adanya penolakan dari masyarakat.			3		3
3.2	Cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan persampahan masih terbatas				4	4
3.3	Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai pada daerah pelayanan (TPS dan armada)				4	4
3.4	Masih digunakannya sistem Open dumping pada TPA Sementara di Kelurahan Muarareja dan kurang sarana prasarana pendukungnya				4	4
	Jumlah					15
4	Aspek Komunikasi					
4.1	Media kurang dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi persampahan		2			2
4.2	Kurangnya kapasitas OPD dalam melakukan komunikasi program ke berbagai pihak			3		3
4.3	Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang persampahan			3		3
	Jumlah					8
5	SDM					
5.1	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas tenaga operasional untuk pelayanan langsung ke masyarakat			3		3
5.2	Lemahnya kapasitas SDM manajemen bidang persampahan			3		3
5.3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah				4	4
	Jumlah					10
	Jumlah Nilai Kelemahan					62
	Selisih Nilai Kekuatan - Kelemahan					-11

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
	Peluang (<i>Opportunities</i>)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;				4	4
1.2	Program Adipura dari Pemerintah Pusat			3		3
1.3	Adanya penghargaan bagi sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)			3		3
1.4	Adanya kelompok masyarakat PKK, kader lingkungan yang melaksanakan pengolahan dan pengelolaan sampah		2			2
1.5	Terdapat perlombaan sanitasi/kebersihan di berbagai tingkatan masyarakat dan instansi		2			2
1.6	Adanya program 3R, Bank Sampah, Kampung ramah lingkungan				4	4
1.7	Dukungan Pokja PPAS Nasional			3		3

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
1.8	Dukungan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan persampahan				4	4
1.9	Adanya komitmen pusat Tercapainya Target RPJMN 2020-2024 100% akses pengelolaan sampah di perkotaan (80% pengangkutan; 20% pengurangan)			3		3
1.10	Pembangunan Subsektor persampahan terpapar dalam visi dan misi RPJMD 2021-2026			3		
1.11	Kelembagaan di tingkat kelurahan sudah sebagian terbentuk (BP SPAM, KPP, KSM, BKM)		2			2
	Jumlah					30
2	Aspek Keuangan					
2.1	Potensi pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, Tugas Perbantuan, Belanja Kementrian, DAK Sanitasi, APBD Propinsi, serta sumber dana internasional dari lembaga multilateral (world bank, Asian Development Bank, Ausaid), CSR dan partisipasi masyarakat			3		3
2.2	Peluang pendanaan dari berbagai program termasuk swadaya masyarakat			3		3
	Jumlah					6
3	Aspek Komunikasi					
3.1	Berkembangnya media sosial, cetak dan elektronik		2			2
3.2	Akses masyarakat terhadap teknologi informasi/ internet		2			2
3.3	Peran Media lokal (cetak, radio dan televisi) yang dapat digunakan kegiatan sosialisasi dan kampanye		2			2
3.4	Pengurus RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai penyebaran sumber informasi			3		3
3.5	Adanya even kesenian budaya dan kerakyatan		2			2
	Jumlah					11
4	Aspek Teknis Operasional					
4.1	Rencana pembangunan TPA Bokongsemar				4	4
4.2	Berkembangnya metode pengolahan sampah dengan Sistem 3R			3		3
4.3	Adanya SPM Bidang Pelayanan Persampahan yang harus dicapai Pemerintah Daerah			3		3
	Jumlah					10
5	Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender					
5.1	Ada inisiasi kerjasama antara Pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah			3		3
5.2	Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah (3R)				4	4
5.3	Banyak pelaku usaha pengepul rongsok/ sampah non organik			3		3
5.4	Tumbuhnya komunitas peduli lingkungan		2			2
	Jumlah					12

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
6	Aspek Sosial Budaya					
6.1	Tumbuhnya industri kreatif berbasis sampah			3		3
6.2	kerja bakti sebagai kearifan lokal			3		3
	Jumlah					6
	Jumlah Nilai Peluang					75
	Ancaman (Threats)					
1	Aspek Kelembagaan					
1.1	Pemahaman dan keperpihakan program persampahan di tingkat pengambil kebijakan			3		3
	Jumlah					3
2	Aspek Keuangan					
2.1	Kebutuhan biaya atau anggaran pengelolaan sampah sangat besar				4	4
2.2	Mekanisme dan persyaratan pembiayaan APBN sektor sampah cukup rumit karena tergantung pada prioritas nasional				4	4
2.3	Alokasi anggaran APBN dan DAK masih rendah				4	4
2.4	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat			3		3
2.5	Teknologi pengelolaan sampah berbiaya tinggi/mahal				4	4
	Jumlah					19
3	Aspek Komunikasi					
3.1	Media komunikasi yang terlibat dalam mempromosikan pemilahan dan pengurangan tentang sampah masih sangat terbatas		2			2
3.2	Terbatasnya efektifitas media dalam menyampaikan pesan (berkaitan dengan jam tayang dan oplah)			3		3
3.3	Rubrik khusus tentang sanitasi belum tersedia di media cetak lokal, karena pemda kurang memanfaatkan media			3		3
	Jumlah					8
4	Aspek Teknis Operasional					
4.1	Pengelolaan sampah dengan sistem open dumping karena terkendala besarnya biaya operasional				4	4
4.2	Industri makanan/mainan kebanyakan menggunakan plastik sebagai pembungkus			3		3
4.3	Masih banyaknya pemakaian produk kemasan yang tidak ramah lingkungan			3		3
4.4	Penyediaan lahan untuk persampahan terkendala ijin masyarakat (HO)			3		3
	Jumlah					13
5	Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender					
5.1	Sungai masih dijadikan sarana untuk membuang sampah oleh masyarakat.				4	4

No.	Faktor Eksternal	Skor				Nilai
		1	2	3	4	
5.2	Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup yang berakibat pada meningkatnya jumlah timbulan sampah dan karakteristik sampah yang dihasilkan			3		3
	Jumlah					7
6	Aspek Sosial Budaya					
6.1	Kondisi sosial budaya masyarakat yang masih mengelola sampah secara sederhana			3		3
6.2	Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan				4	4
	Jumlah					7
	Jumlah Nilai Ancaman					57
	Selisih Nilai Peluang - Ancaman					17



Gambar 4-2 Kuadran SWOT Pengelolaan Persampahan

Tabel 4-6 Strategi SWOT Pengelolaan Persampahan

Strategi	S	W
O	Strategi S – O	Strategi W – O

	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penindakan pelanggaran peraturan daerah/bupati Kabupaten Grobogan terhadap pelanggaran pengelolaan persampahan secara rinci dan menyeluruh. • Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. • Mendayagunakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang ada untuk memperluas cakupan layanan • Memaksimalkan peluang pendanaan yang ada di pemerintah pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana persampahan • Mengoptimalkan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran dalam mengoptimalkan sistem TPA dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill • Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah melalui program 3R dan Bank Sampah • Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan persampahan
T	Strategi S – T	Strategi W – T
	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan dan menambah jumlah TPS/TPS 3R untuk meningkatkan jumlah pengurangan sampah sehingga mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA yang kedepannya dapat mengurangi biaya operasional TPA. • Meningkatkan anggaran dalam memaksimalkan informasi pengelolaan sampah yang benar ke masyarakat sehingga dapat merubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai dan di sembarang tempat. • Mensinergikan rencana operasional dengan masterplan persampahan yang sudah ada dalam penetapan target dan rencana kerja tahunan. • Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan anggaran pengelolaan persampahan • Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. • Membuat peraturan daerah khusus tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan

Tabel 4-7 Strategi Penanganan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan akses pengelolaan sampah yang baik terdiri atas akses terhadap penanganan dan pengurangan sampah domestik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM yang memadai dan merata bagi semua.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026. • Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% 	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria; • penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa; • penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam menyediakan anggaran penanganan sampah rumah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	<p>(tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026.</p>	<p>tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;</p> <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; • pembentukan sistem informasi; • penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; • penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan; • penguatan penegakan hukum; • penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah; • penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang ramah lingkungan dan tepat guna; dan • penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. • Mengoptimalkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk peningkatan akses sanitasi yang layak aman dan ideal.

Tabel 4-8 Matrik Kerangka Kerja Logis Persampahan

Permasalahan Mendesak	Isu – Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
<p>User interface</p> <p>Dibakar : masih ada sebagian warga yang mengolah sampah dengan cara dibakar yang menyebabkan polusi udara</p> <p>Sampah di taman / tempat umum : mencemari lingkungan dan mengganggu pemandangan</p> <p>Sampah di jalan : mencemari lingkungan dan mengganggu pemandangan</p> <p>Komposter</p> <p>Bank sampah : perlu pengembangan di wilayah yang lain</p> <p>Cakupan Layanan : 11 Ibukota Kecamatan</p> <p>Pengumpulan setempat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada TPA yang memadai dan memenuhi syarat sesuai UU no. 18/2008 • Kurangnya kapasitas TPA • Belum ada masterplan persampahan • Kurang penyediaan TPS 3R oleh OPD • Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah • Kesadaran untuk pemilahan sampah rumah tangga masih rendah • Masih banyak sampah yang dibakar sehingga 	<p>Mewujudkan akses pengelolaan sampah yang baik terdiri atas akses terhadap penanganan dan pengurangan sampah domestik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM yang memadai dan merata bagi semua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026. • Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria; • Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa; • Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam menyediakan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; • Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; • Pembentukan sistem informasi; • Penguatan keterlibatan masyarakat melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan advokasi pengelolaan sampah kepada pihak swasta dan masyarakat • Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Sosialisasi, kampanye dan pelatihan pengelolaan sampah 3R pada masyarakat • Pengembangan TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan tentang persampahan kepada swasta dan kelompok masyarakat • Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan • Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW • Pengadaan keranjang sampah komposter • Pengadaan Gerobag Sampah bersekat • Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat • Pengadaan Mobil Pick Up Sampah • Pengadaan Truk Sampah • Pengadaan Kontainer Sampah • Pengadaan Becak Sampah

Permasalahan Mendesak	Isu – Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Becak sampah/Gerobag sampah : 68 unit	menyebabkan polusi <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai Pengelolaan 3R belum optimal Masih rendahnya investasi dunia usaha ataupun pihak swasta 			komunikasi, informasi, dan edukasi; <ul style="list-style-type: none"> Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan; Penguatan penegakan hukum; Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah; Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggayang ramah lingkungan dan tepat guna; dan Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Mengoptimalkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk peningkatan akses sanitasi yang layak aman dan ideal. 		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Mesin Penggiling Sampah Pembangunan landasan TPS Pembangunan Unit Transfer Depo Pembangunan Unit Landasan Kontainer Pengadaan Peralatan Workshop Perbengkelan Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA
Becak motor : 3 unit						
Mobil pick up : 5 unit						
Penampungan sementara (TPS)						
TPS : 21 unit						
TPS-3R : 8 unit						
Bank Sampah: 218 Unit						
Pengangkutan						
Dump truk : 8 unit						
Arm roll truck : 6 unit						
Pengolahan akhir terpusat (semi)						
Daur ulang, pembuangan akhir						
Sungai : ada sebagian masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai yang mencemari badan air						
TPA : sanitary controlled landfill						
Pengomposan : 2 unit						

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pengembangan sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026, disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran dapat dilihat dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bab ini.

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022- 2026, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah domestik dan pengelolaan persampahan,).

5.1 Ringkasan

Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR, dan Masyarakat). Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel-tabel berikut.

Pada Tabel 5-1 terkait Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun ke depan, besaran biaya sanitasi ini diperoleh dari program pengembangan sektor sanitasi yang telah disusun oleh Kabupaten Grobogan dalam penyusunan SSK Pemutakhiran 2022-2026. Kebutuhan biaya ini menitikberatkan pada jenis program yang merupakan investasi sanitasi di Kabupaten Grobogan.

Untuk sumber pendanaan pada Tabel 5-2 terkait Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran di bawah juga memperlihatkan adanya peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan sektor sanitasi.

Total Kebutuhan pada Tabel 5-1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun sebesar 134.630 (x Rp 1 Juta) yang penganggarnya di mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2026 meliputi sub sektor air limbah domestik dan persampahan. Pada Tabel 5-2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber

Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR, dan Masyarakat.

Dengan asumsi pendanaan yang diusulkan ke Provinsi dan Pusat, serta dengan mengindikasikan adanya anggaran dari swasta melalui CSR maupun dari masyarakat, maka masih ditemukan adanya funding GAP atau selisih pembiayaan yang perlu diantisipasi terkait sumber dana lain yang memungkinkan. Data tersebut tidak mencakup apabila anggaran dari masing-masing sumber tidak teralokasikan sesuai kebutuhan.

Funding Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran *Funding Gap* yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2026, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5-1 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

No.	Uraian	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kebutuhan Pendanaan	26.001	33.681	38.271	48.115	52.078	198.145
2	Kemampuan Pendanaan	14.380	15.140	15.300	15.780	16.460	77.060
3	Selisih (Rp)	11.621	18.541	22.971	32.335	35.618	121.085
4	Selisih (%)	44,69%	55,05%	60,02%	67,20%	68,39%	61,11%

Sumber: Pokja PKP, 2021

Tabel 5-2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	8.676	10.408	8.188	10.015	8.844	46.130
2	APBD Provinsi	1.560	1.911	2.462	3.262	3.462	12.657
3	APBN	4.127	6.879	10.298	14.640	16.235	52.179
4.	DAK	7.299	9.249	11.199	13.149	15.099	55.993
	Jumlah	21.661	28.446	32.147	41.066	43.639	166.958
B.	Non-Pemerintah						
1.	Swasta	1.290	1.665	2.040	2.415	3.290	10.700
2.	Masyarakat	3.050	3.570	4.085	4.634	5.149	20.487
	Jumlah B	4.340	5.235	6.125	7.049	8.439	31.187
	Total (A + B)	26.001	33.681	38.271	48.115	52.078	198.145
	Daftar Tunggu (Kebutuhan A - B)	17.321	23.212	26.022	34.017	35.201	135.772

Sumber: Pokja PKP, 2021

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2026, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan DAK) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5-3, Tabel 5-4, Tabel 5-5 dan Tabel 5-6 di bawah ini:

Tabel 5-3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	5.283	5.735	4.988	5.515	5.693	27.213
2	Persampahan	3.393	4.673	3.201	4.500	3.151	18.917
	Jumlah	8.676	10.408	8.188	10.015	8.844	46.130

Sumber: Pokja PKP, 2021

Tabel 5-4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	953	1.204	1.655	2.355	2.455	8.622
2	Persampahan	607	707	807	907	1.007	4.035
	Jumlah	1.560	1.911	2.462	3.262	3.462	12.657

Sumber: Pokja PKP, 2021

Tabel 5-5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	1.802	1.904	3.206	3.208	4.410	14.530
2	Persampahan	2.325	4.975	7.092	11.432	11.825	37.649
	Jumlah	4.127	6.879	10.298	14.640	16.235	52.179

Sumber: Pokja PKP, 2021

Tabel 5-6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	6.029	7.279	8.529	9.779	11.029	42.643
2	Persampahan	1.270	1.970	2.670	3.370	4.070	13.350
	Jumlah	7.299	9.249	11.199	13.149	15.099	55.993

Sumber: Pokja PKP, 2021

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini pada Tabel 5-7 dan 5-8 penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2026, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat).

Tabel 5-7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	915	915	915	915	1.415	5.075
2	Persampahan	375	750	1.125	1.500	1.875	5.625
	Jumlah	1.290	1.665	2.040	2.415	3.290	10.700

Sumber: Pokja PKP, 2021

Tabel 5-8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp 1 juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	2.183	2.223	2.259	2.294	2.329	11.287
2	Persampahan	867	1.347	1.826	2.341	2.820	9.200
	Jumlah	3.050	3.570	4.085	4.634	5.149	20.487

Sumber: Pokja PKP, 2021

Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. *Monitoring* atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. *Evaluasi* tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik, baik untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan.

Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana.

Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

6.1 Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi

Monitoring dan evaluasi Kinerja Sanitasi memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi sanitasi, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program percepatan sanitasi permukiman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program percepatan sanitasi permukiman adalah :

1. Obyektif dan profesional

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat program percepatan sanitasi permukiman.

2. Transparan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program percepatan sanitasi permukiman, termasuk masyarakat miskin.

4. Akuntabel

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal maupun eksternal.

5. Tepat waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6. Berkesinambungan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

7. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan

kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai *monitoring* bertujuan untuk :

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi

Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2022 atau setelah SSK diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah.

6.2 Pengumpulan Dan Penyajian / Pelaporan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan pembangunan sanitasi. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pembangunan sanitasi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap sektor sanitasi.

Kegiatan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi meliputi :

1. Optimalisasi fungsi Pokjasa bidang Monev sebagai kordinator pendataan lintas OPD kunci;
2. Optimalisasi bagian pendataan dan pemantauan setiap OPD kunci untuk mendukung kegiatan monev;
3. Penganggaran khusus kegiatan pendataan sekunder dan primer;
4. Penetapan tim survei lapangan

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja PKP, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh OPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil *monitoring* dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh OPD terkait sanitasi.

Pokja PKP Kabupaten Grobogan akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja PKP akan memberikan kesempatan kepada para *stakeholder* untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik *monitoring* dan evaluasi proses perencanaan ini.

Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi.

6.2.1 Pelaporan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi

Laporan gabungan *monitoring* dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab *monitoring* dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala OPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan

6.2.2 Pelaporan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi

Laporan gabungan *monitoring* dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab *monitoring* dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala OPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan

Tabel 6-1 Pelaporan Monev Implementasi SSK

No	Objek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan
		Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data Dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		
1	Tabel Capaian Strategis	BAPPEDA	OPD Bidang Sanitasi (BAPPEDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMD)	POKJA PKP	Bulan Januari - Desember	Bupati / Kepala OPD
2	Tabel Infrastruktur dan Akses	BAPPEDA	OPD Bidang Sanitasi (BAPPEDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMD)	POKJA PKP	Bulan Januari - Desember	Bupati / Kepala OPD

6.3 Jadwal Monitoring Dan Evaluasi

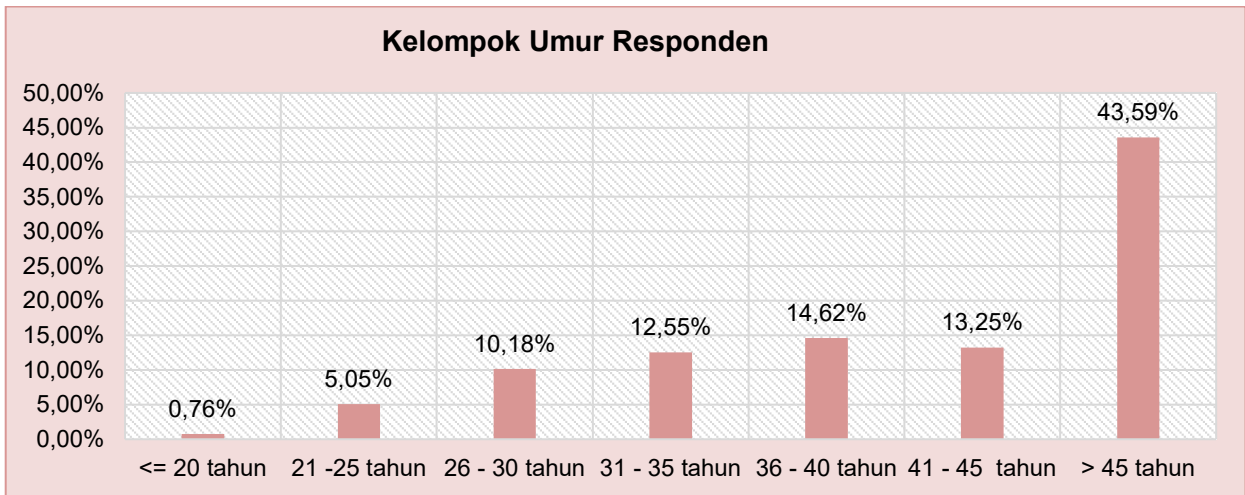
Pelaporan *monitoring* dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja PKP Kabupaten Grobogan akan mempertimbangkan bentuk laporan *monitoring* ini, seperti Buku SSK Kabupaten Grobogan yang aktual dengan pemutakhiran, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten Grobogan. Hasil laporan akan menampilkan *progress report* yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya.

Tabel dibawah ini menggambarkan matrik dan prosedur pelaksanaan Monev Sanitasi Kabupaten Grobogan persubsektor berdasarkan konsep dan teknik.

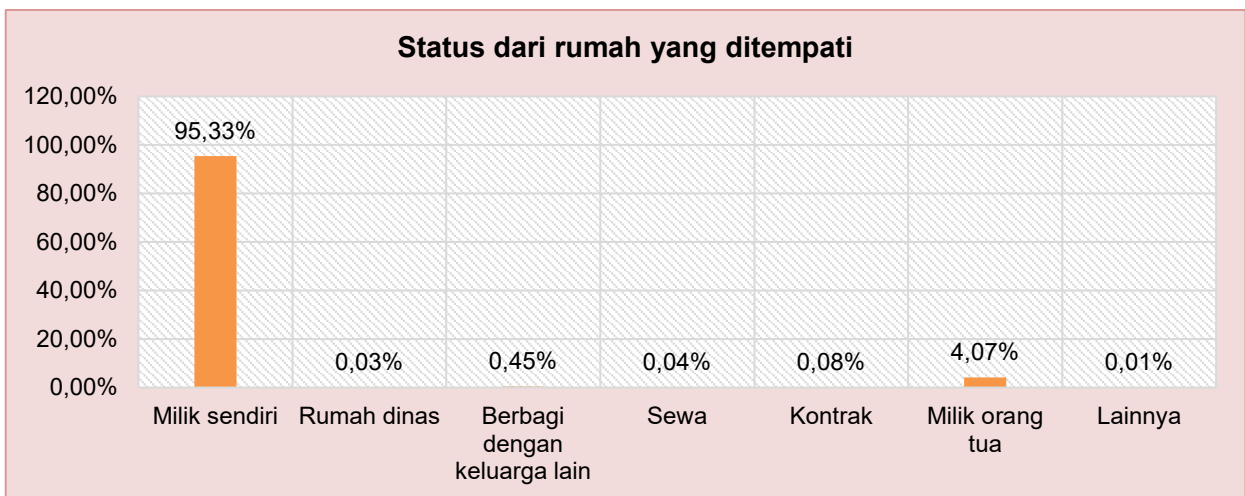
Tabel 6-2 Jadwal Monitoring Dan Evaluasi

No	Kegiatan	Rencana Monev											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Input Capaian Strategis												
2	Input menu investasi												
3	Input menu akses												
4	Input menu infrastruktur												
5	Input menu progress												
6	Pelatihan nawasis												

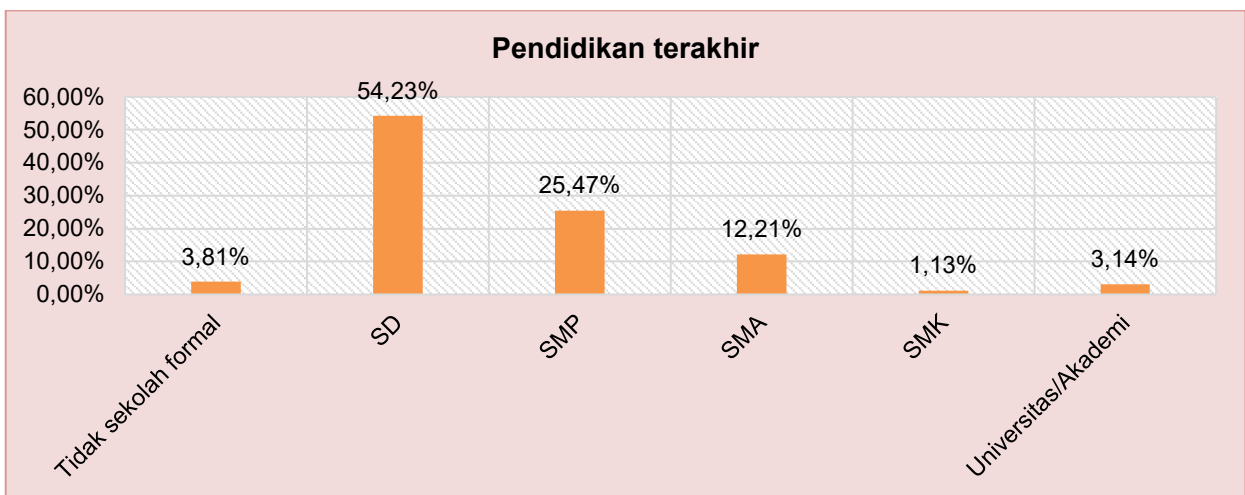
Lampiran 1: Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA



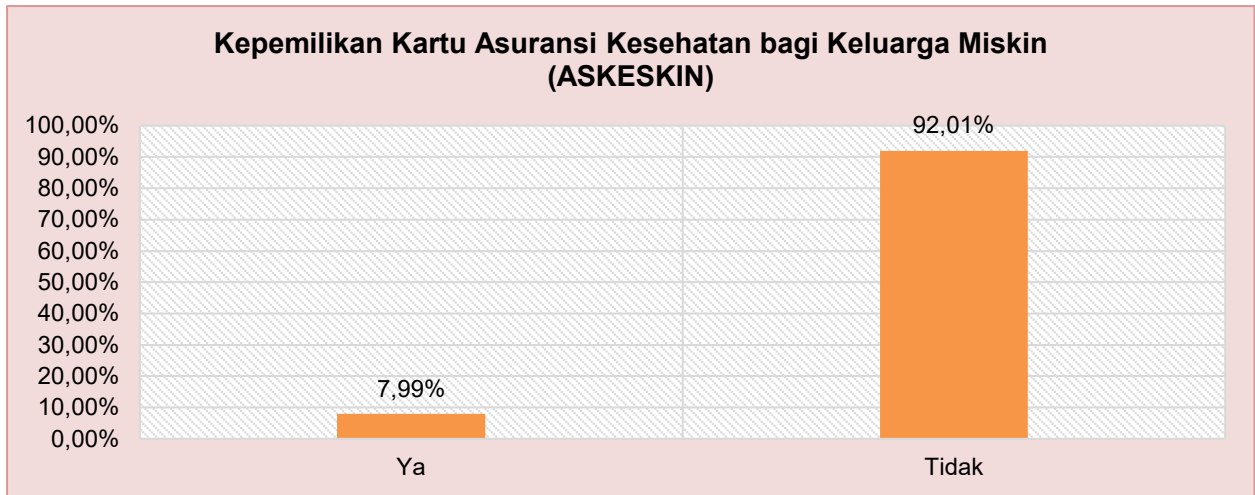
Gambar 1 Kelompok Umur Responden



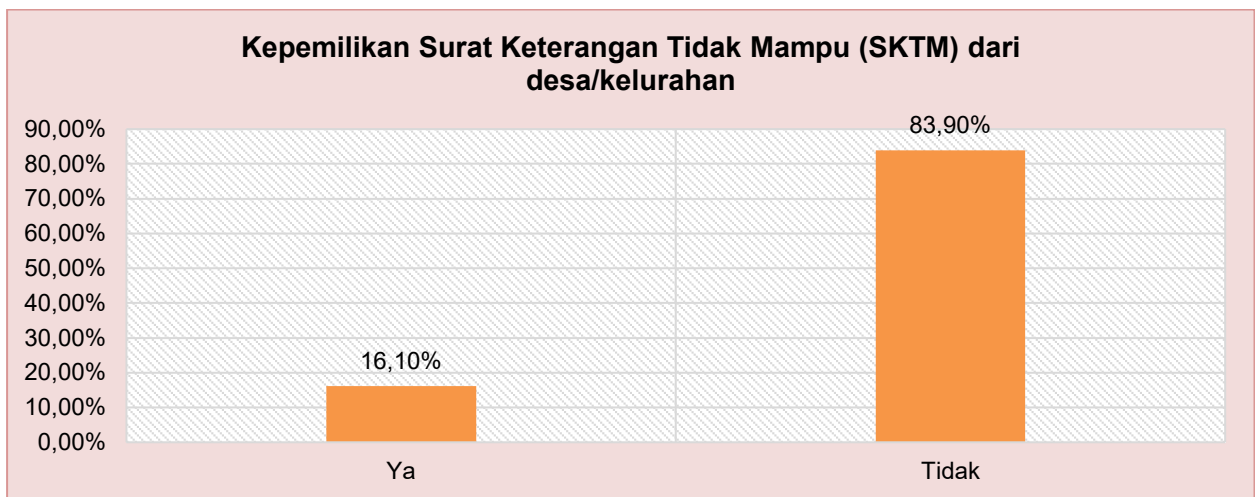
Gambar 2 Status dari rumah yang ditempati



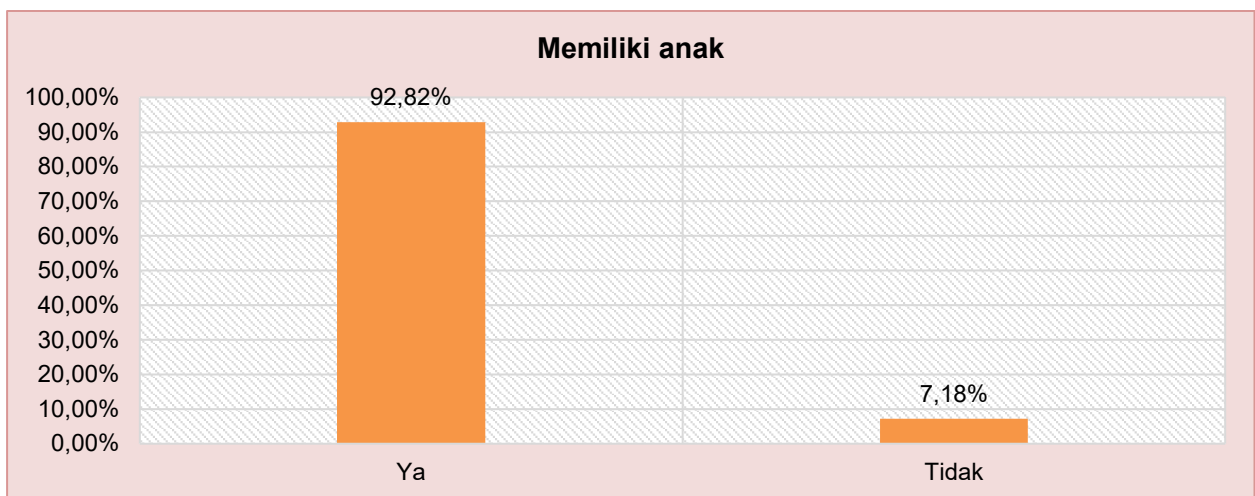
Gambar 3 Pendidikan terakhir



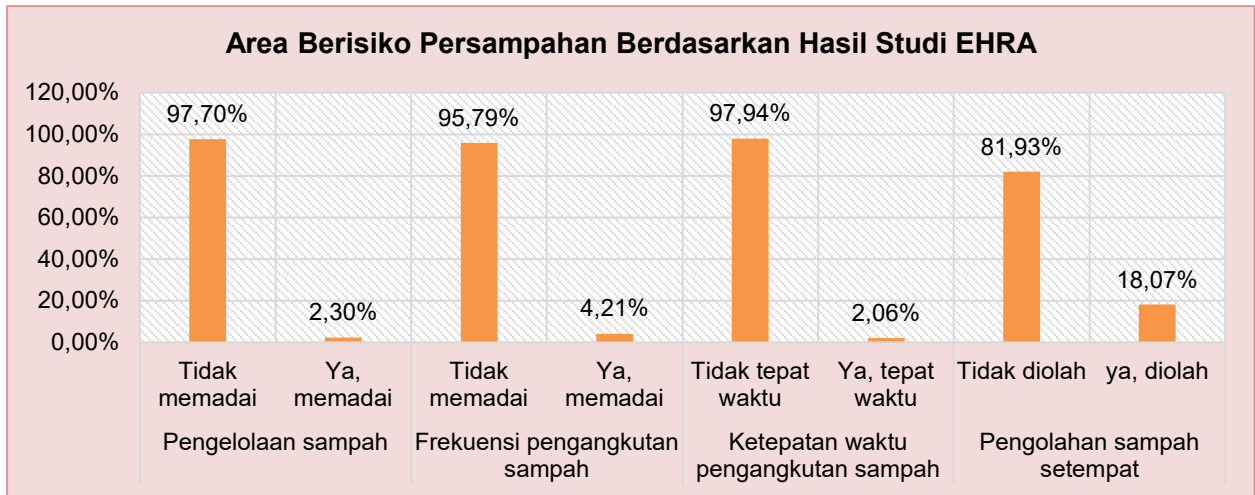
Gambar 4 Kepemilikan Kartu Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (ASKESKIN)



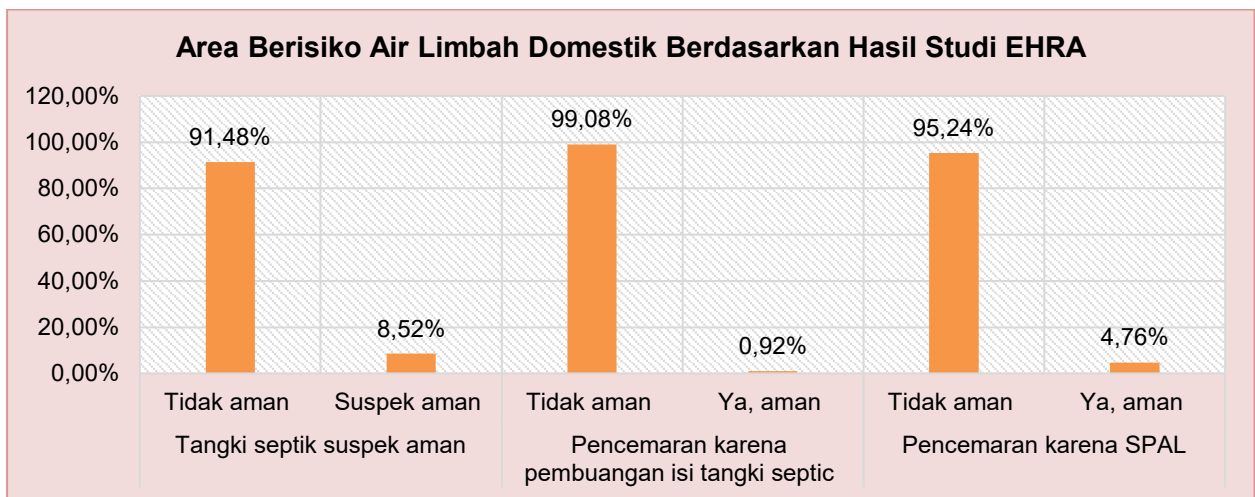
Gambar 5 Kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan



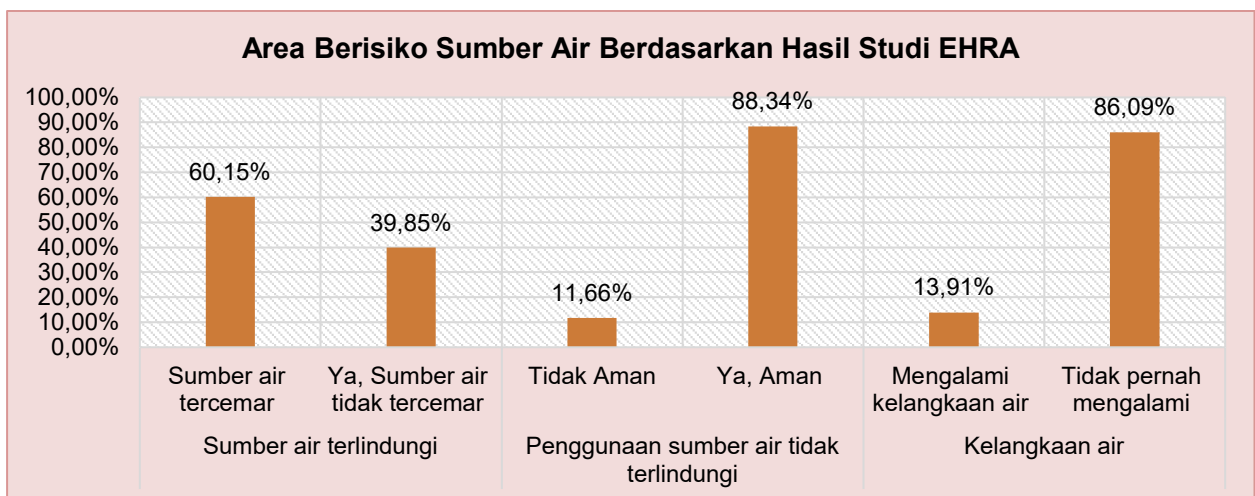
Gambar 6 Memiliki anak



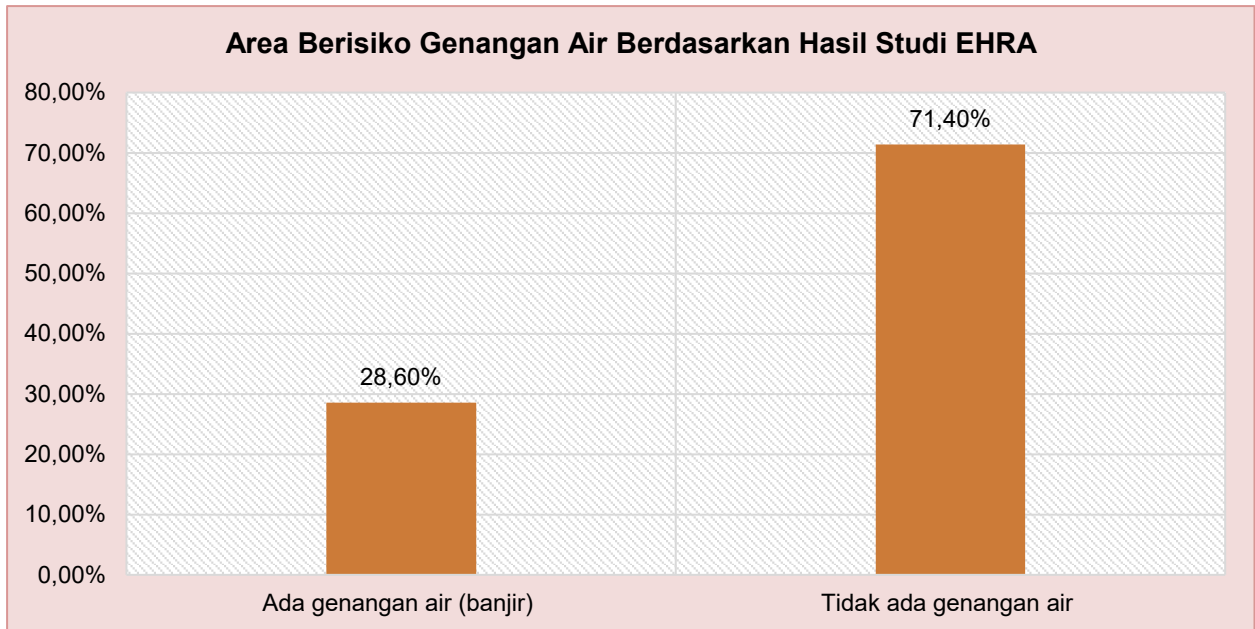
Gambar 7 Area Berisiko Air Persampahan



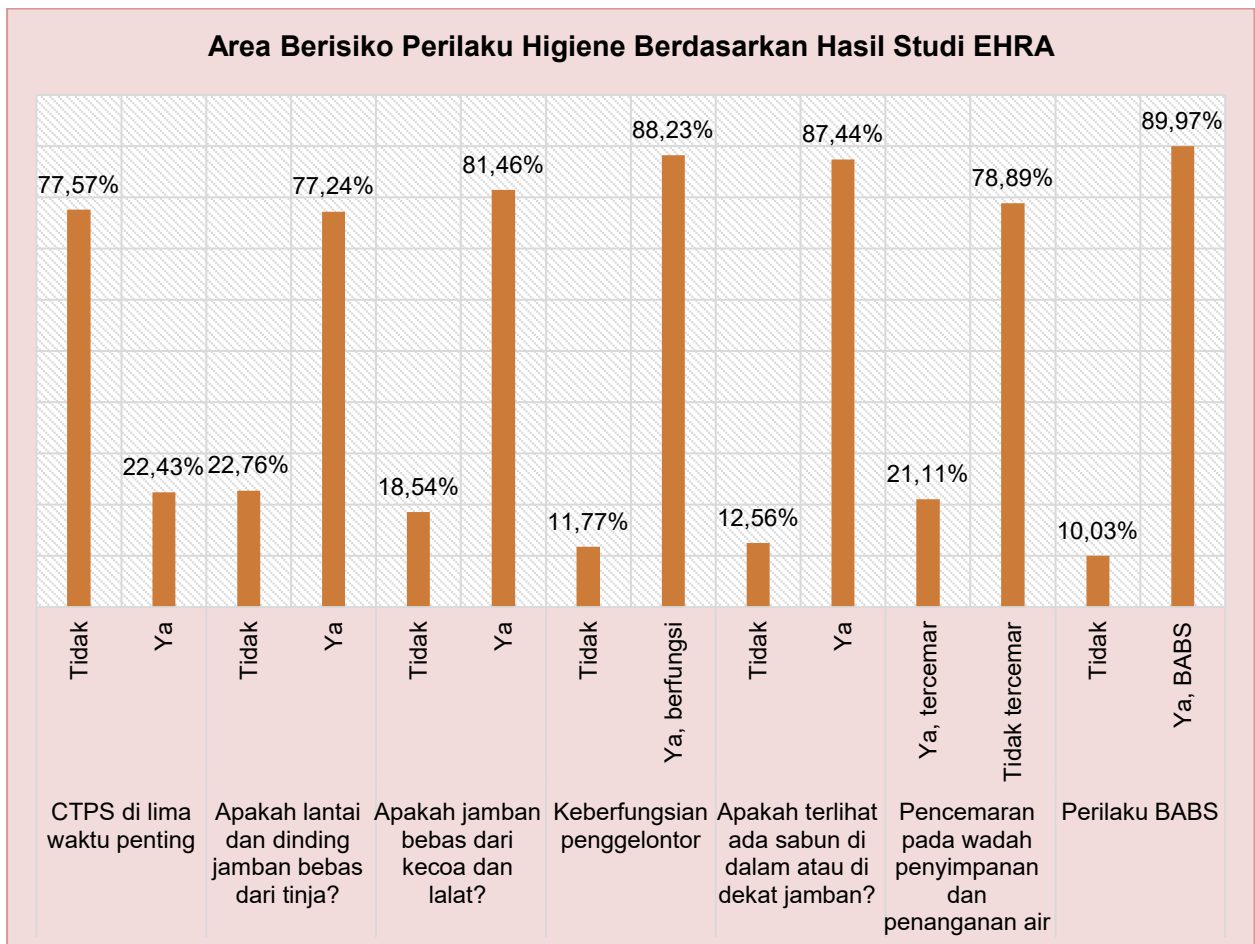
Gambar 8 Area Berisiko Air Limbah Domestik



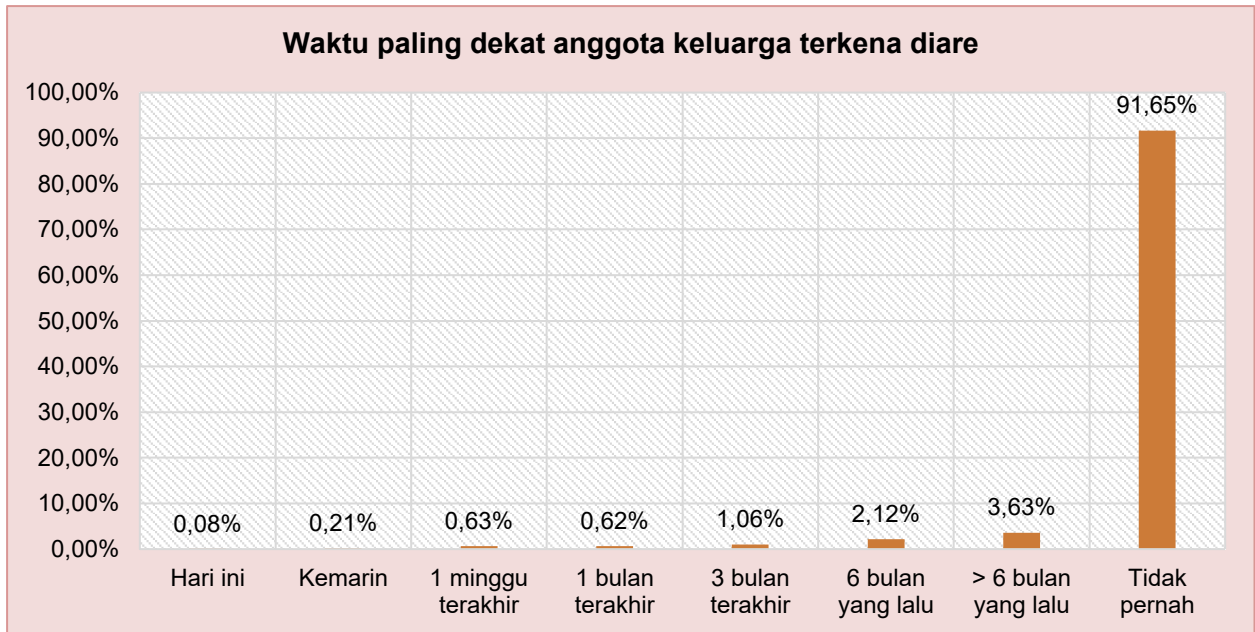
Gambar 9 Area Berisiko Sumber Air



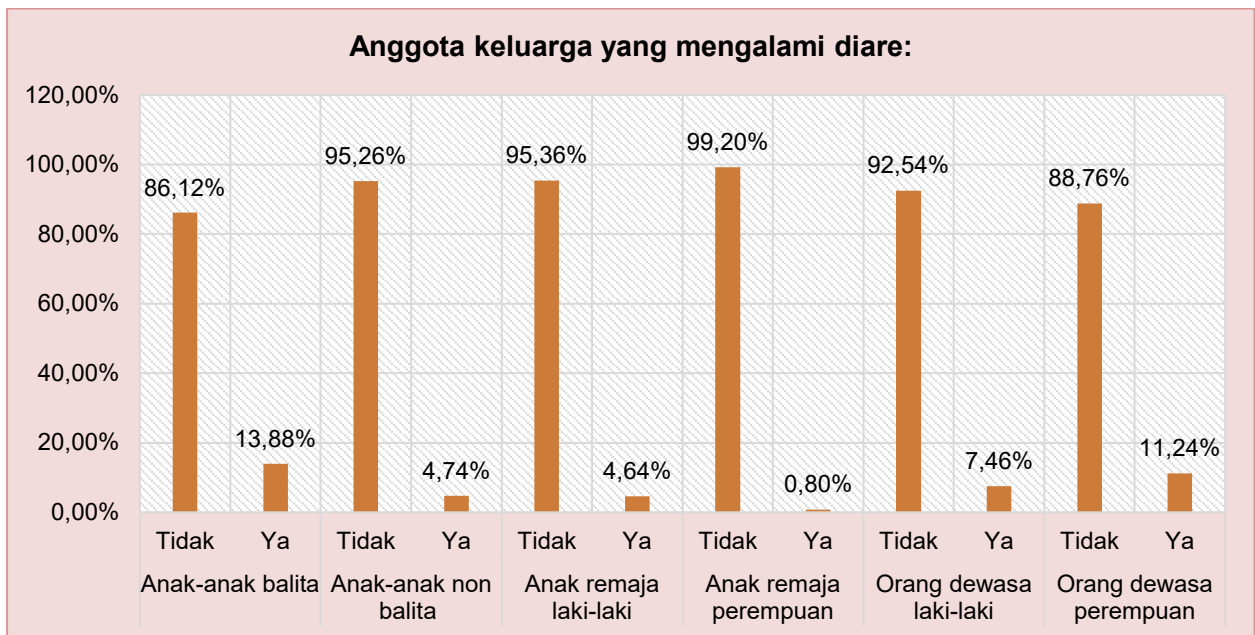
Gambar 10 Area Berisiko Genangan air



Gambar 11 Area Berisiko Perilaku masyarakat

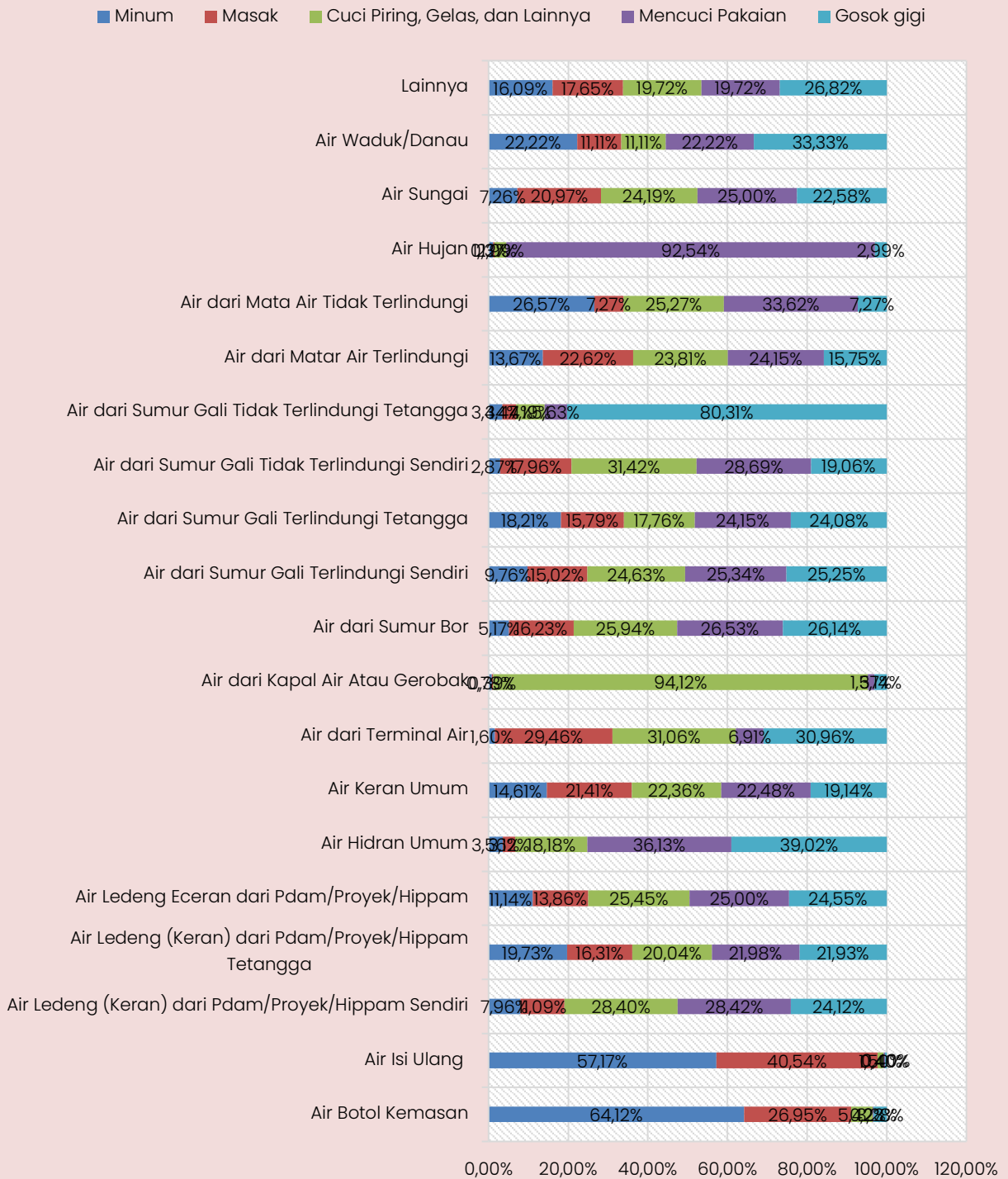


Gambar 12 Waktu paling dekat anggota keluarga terkena diare

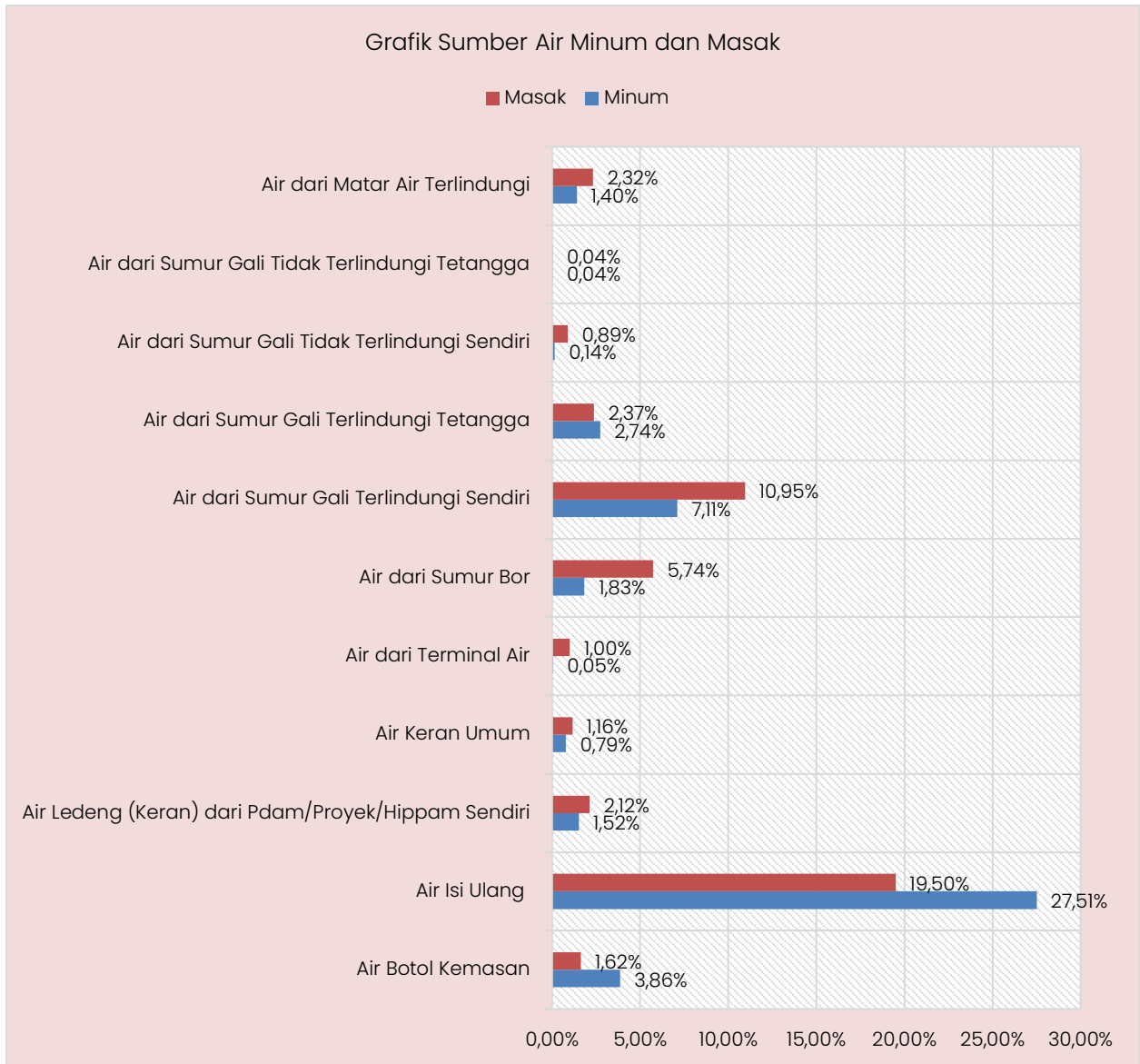


Gambar 13 Anggota keluarga yang mengalami diare:

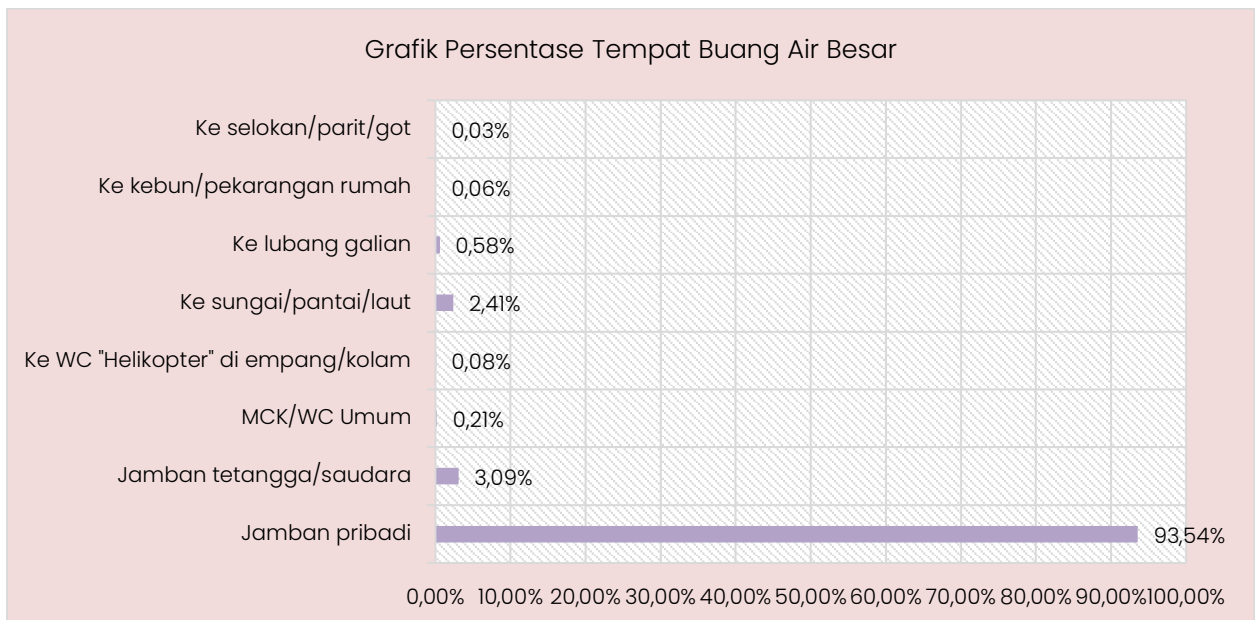
Grafik Sumber Air Minum dan Masak



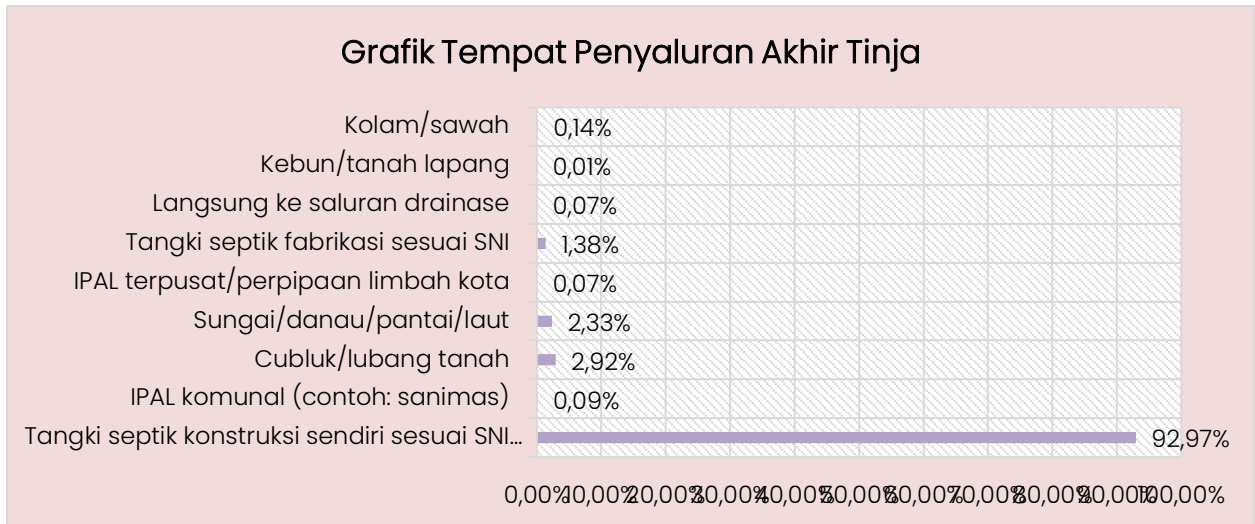
Grafik Akses Terhadap Air Bersih



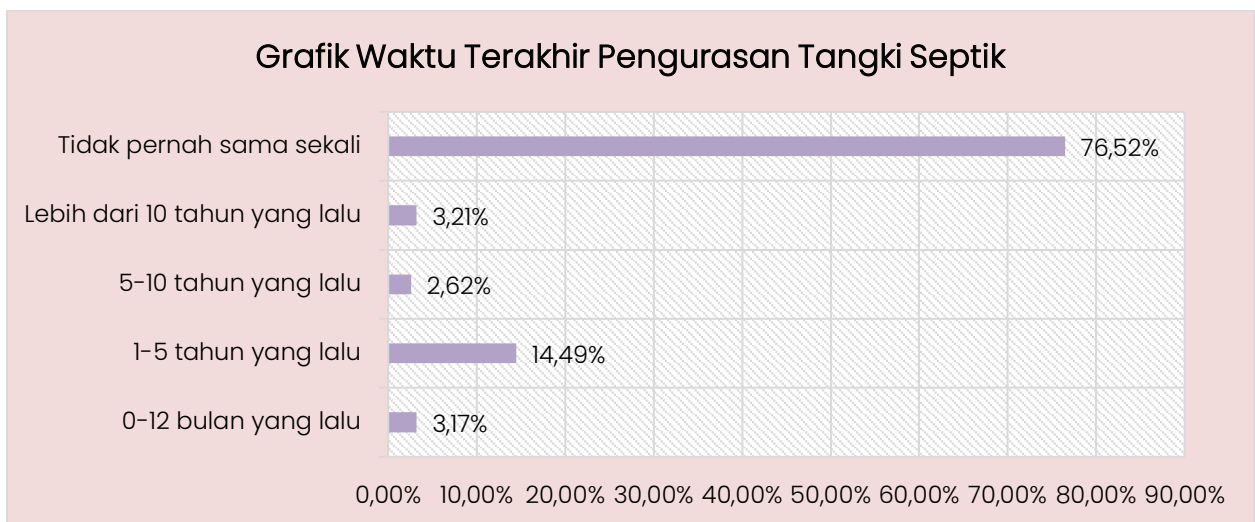
Gambar 14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak



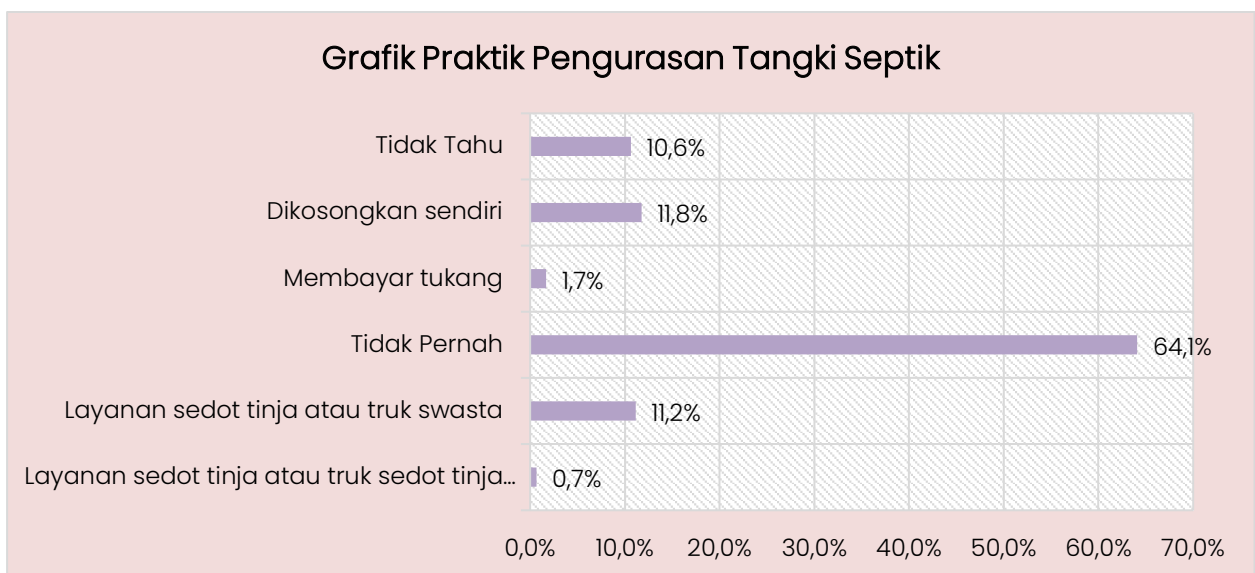
Gambar 15 Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar



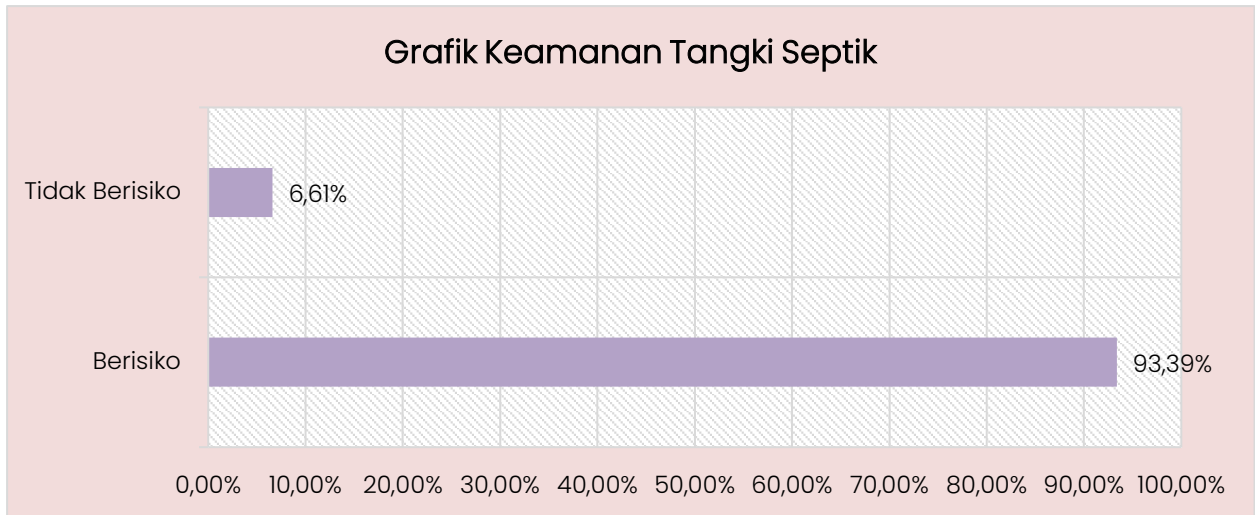
Gambar 16 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja



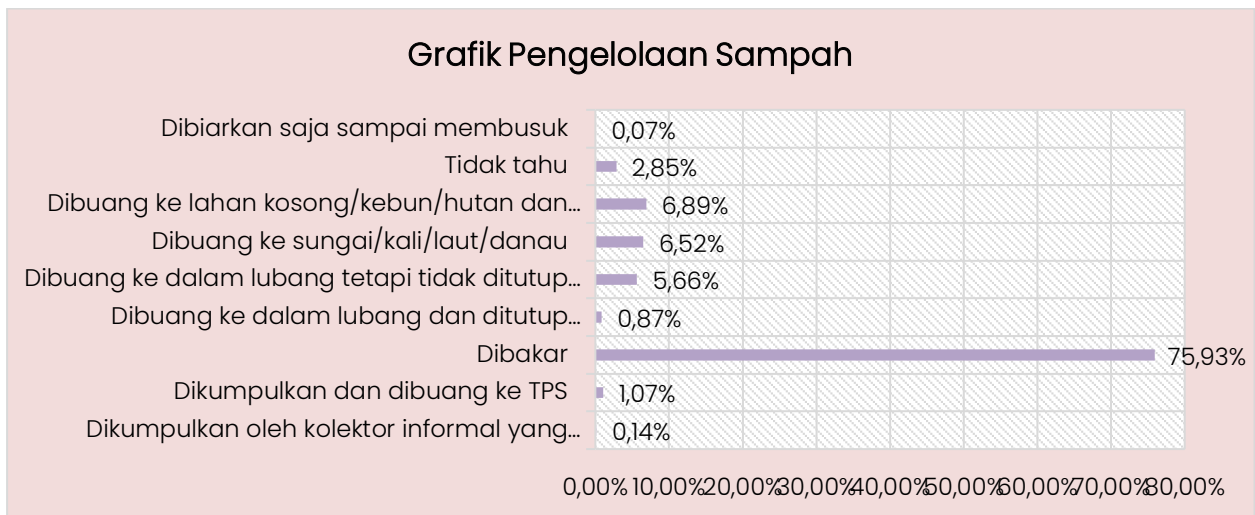
Gambar 17 Grafik Waktu Terakhir Pengurusan Tangki Septik



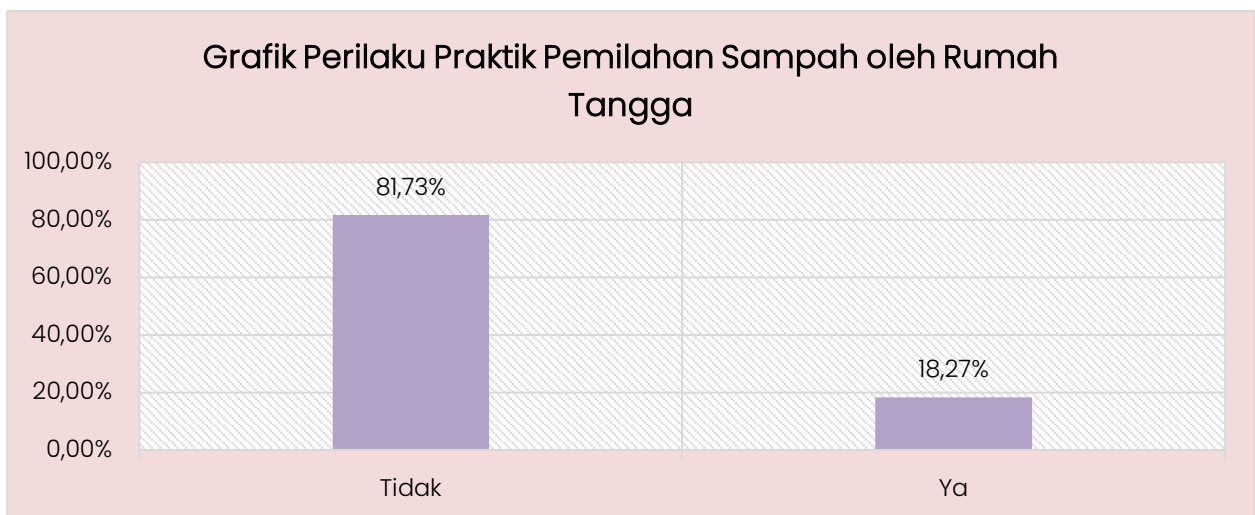
Gambar 18 Grafik Praktek Pengurusan Tangki Septik



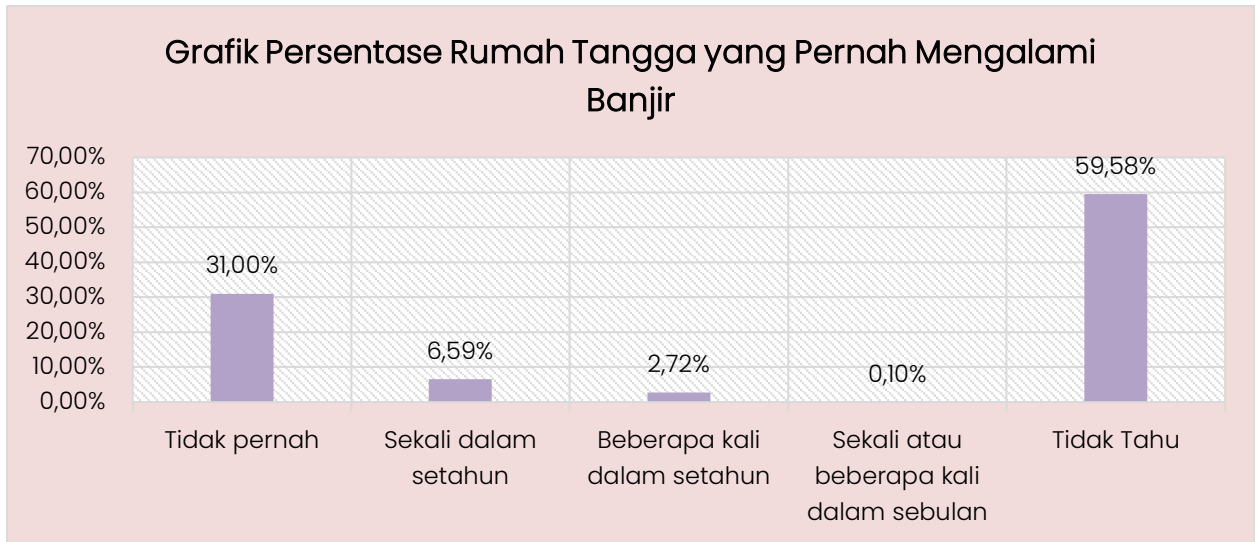
Gambar 19 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman



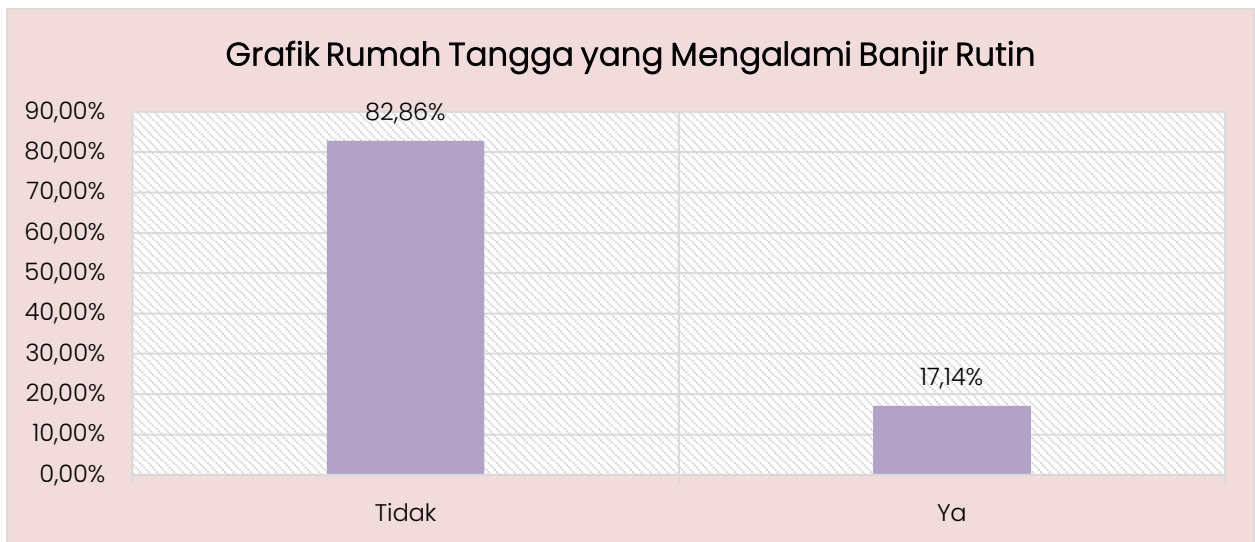
Gambar 20 Grafik Pengelolaan Sampah



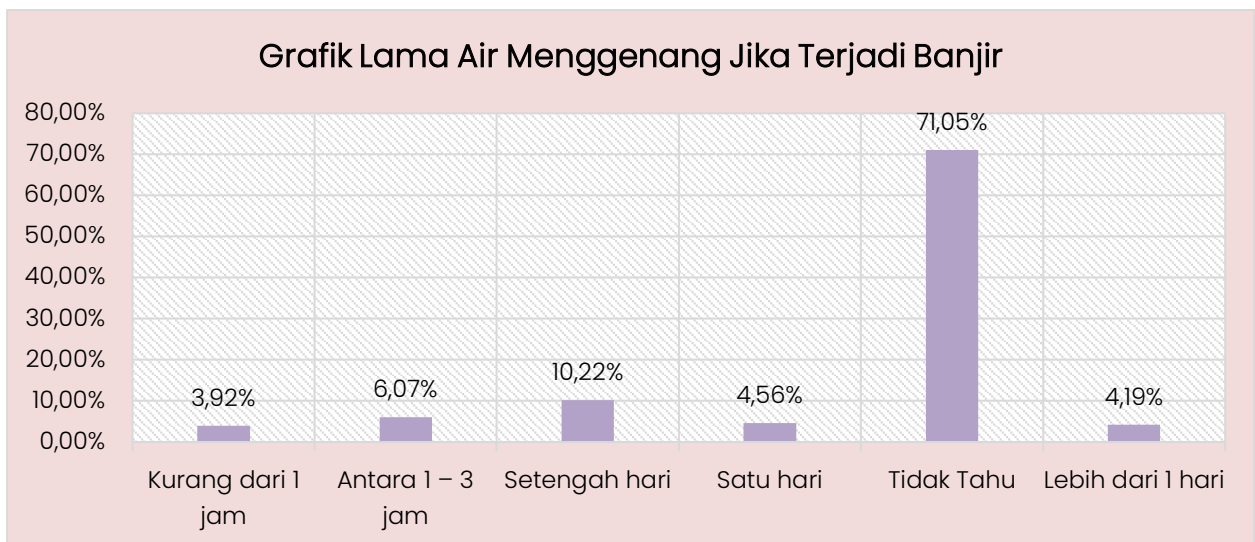
Gambar 21 Grafik Perilaku Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga



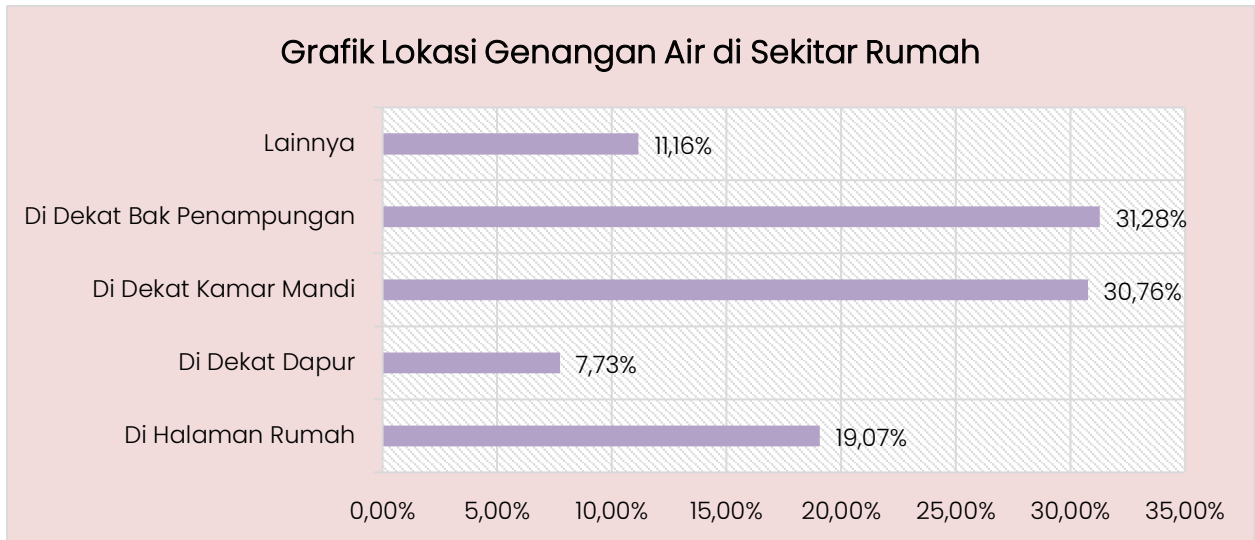
Gambar 22 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir



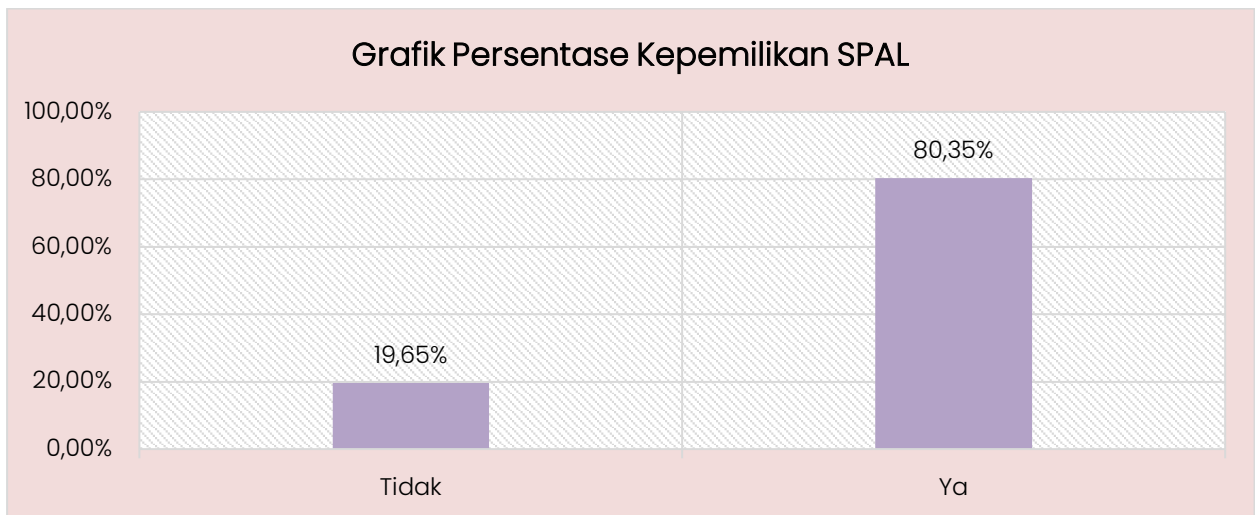
Gambar 23 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin



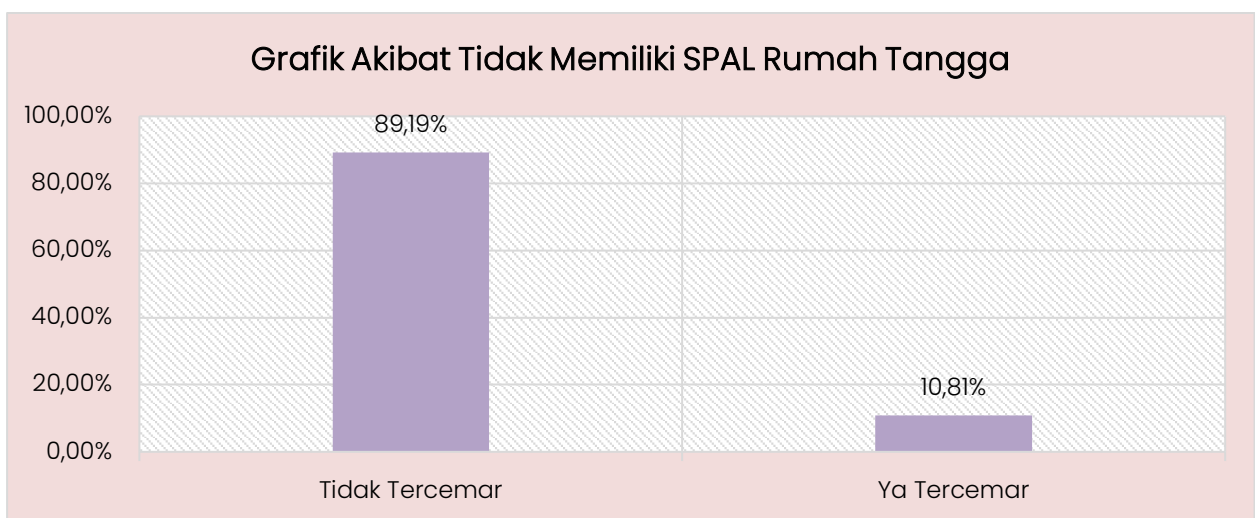
Gambar 24 Grafik Lama Air Menggenang Banjir



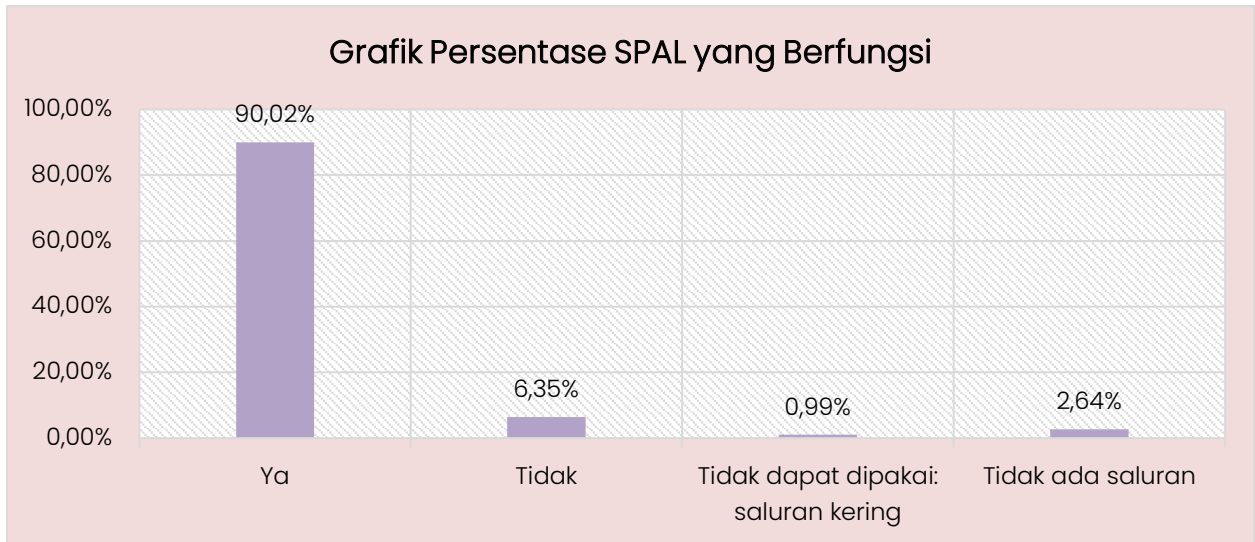
Gambar 25 Grafik Lokasi Genangan di Sekitar Rumah



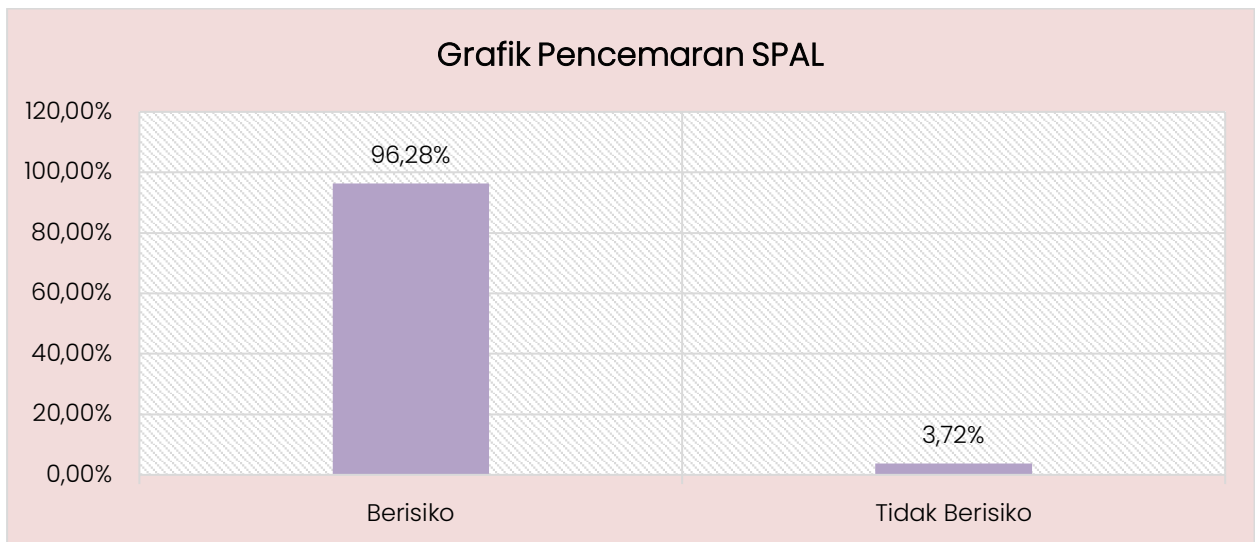
Gambar 26 Grafik Persentase Kepemilikan SPAL



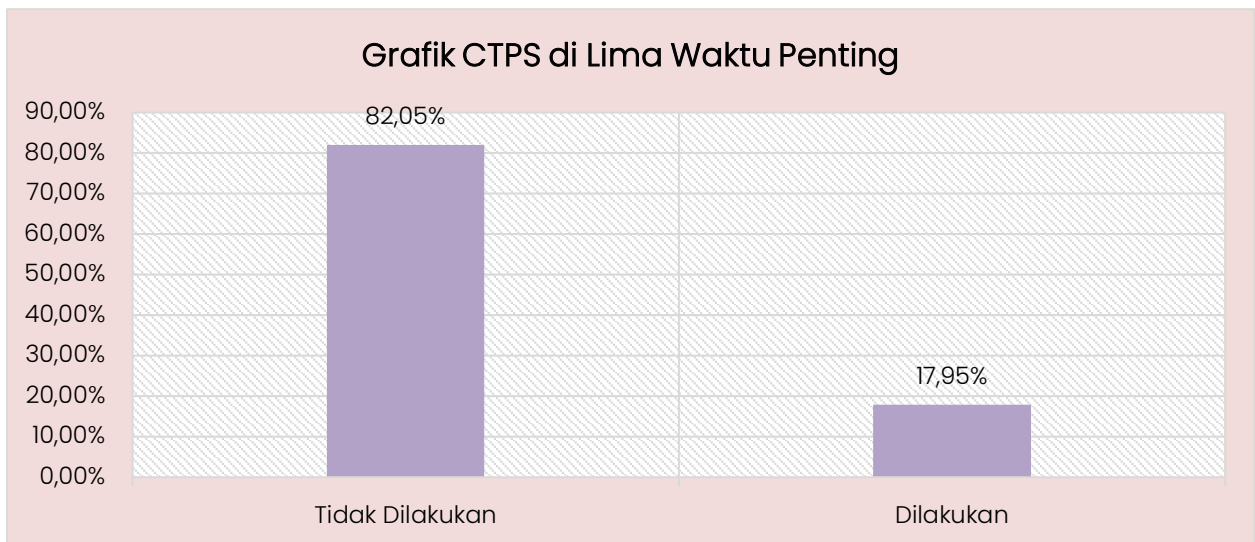
Gambar 27 Grafik Akibat Tidak Memiliki SPAL Rumah Tangga



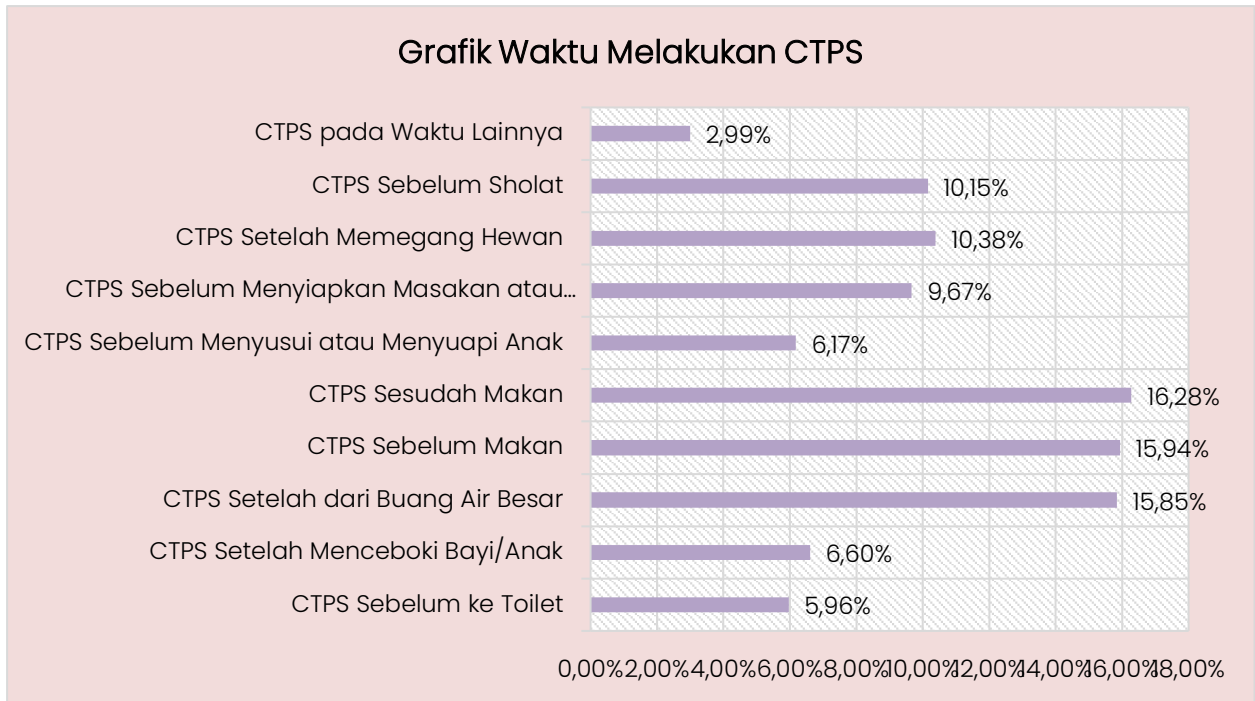
Gambar 28 Grafik Persentase SPAL yang Berfungsi



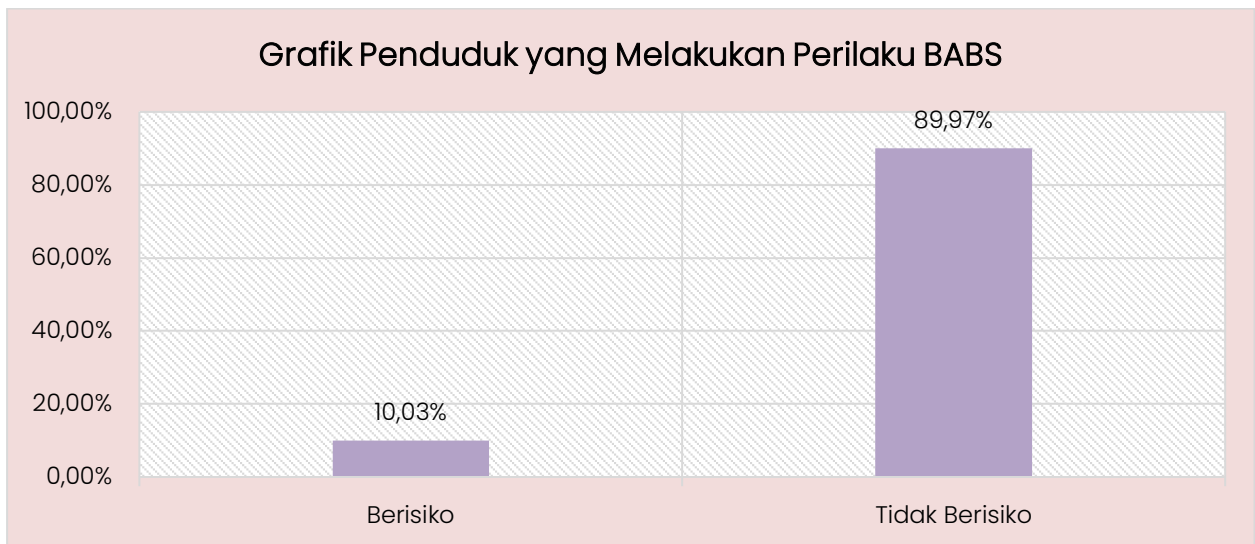
Gambar 29 Grafik Pencemaran SPAL



Gambar 30 Grafik CTPS di Lima Waktu Penting



Gambar 31 Grafik Waktu Melakukan CTPS



Gambar 32 Grafik Penduduk yang Melakukan BABS

Tabel 1 Indeks Risiko Sanitasi setiap Desa/Kelurahan

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
1	KEDUNGGATI	1. Prigi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		2. N g o m b a k	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		3. Kentengsari	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		4. Karanglangu	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		5. P a n i m b o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		6. P a d a s	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		7. D e r a s	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		8. Klitikan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		9. Kedungjati	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		10. Kalimaro	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		11. J u m o	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		12. W a t e s	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
2	TANGGUNGHARJO	1. Ringinpitu	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		2. Mrisi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Ngambakrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. K a p u n g	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		5. Kaliwenang	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		6. Sugihmanik	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Tanggungharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. B r a b o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		9. P a d a n g	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
3	KARANGRAYUNG I	1. Ketiro	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		2. Mangin	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		3. Sumberjosari	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		4. Temurejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		5. Putatnganten	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		6. Termas	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi
		7. Rawoh	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		8. Pangkalan	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		9. Mojoagung	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		10. Dempel	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
4	KARANGRAYUNG II	1. Gunungtumpeng	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		2. Sendangharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		3. Karanganyar	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		4. Parakan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		5. Nampu	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. Karangsono	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		7. Jetis	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Telawah	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		9. Cekel	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
5	PENAWANGAN I	1. P e n g k o l	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. C u r u t	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		3. Wedoro	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		4. K l u w a n	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		5. Karangpaing	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. P u l u t a n	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. W i n o n g	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		8. W o l o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		9. N g e l u k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		10. Penawangan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
6	PENAWANGAN II	1. L a j e r	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. S e d a d i	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Bologarang	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Karangwader	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		5. T o k o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. Leyangan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Watupawon	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. T u n g g u	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		9. Jipang	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		10. K r a m a t	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
7	TOROH I	1. Dimoro	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		2. Genengadal	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		3. Sindurejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		4. Bandungharjo	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		5. Tambirejo	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		6. D e p o k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		7. Krangganharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		8. Sugihan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		9. Pilangpayung	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		10. K a t o n g	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
8	TOROH II	1. Genengsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Kenteng	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Ngrandah	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Tunggak	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		5. B o l o h	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. Plosoharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
9	GEYER I	1. R a m b a t	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Kalangbancar	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. J u w o r o	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		4. Monggot	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		5. Jambangan	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		6. G e y e r	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		7. Ledokdawan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		8. S o b o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		9. S u r u	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
10	GEYER II	1. N g r a n d u	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		2. B a n g s r i	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		3. Karanganyar	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		4. Asemrudung	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
11	PULOKULON I	1. Randurejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		2. Mlowokarangtalun	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		3. Jatiharjo	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		4. Sidorejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		5. T u k o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		6. Panunggalan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
12	PULOKULON II	1. P o j o k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Mangunrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Jetaksari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Pulokulon	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		5. J a m b o n	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		6. Karangharjo	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		7. Sembungharjo	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
13	KRADENAN I	1. Bago	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		2. Simo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Crewek	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Banjarsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		5. K u w u	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		6. Grabagan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		7. Tanjungsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
14	KRADENAN II	1. Pakis	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		2. Rejosari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		3. Kradenan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		4. Sambobangi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		5. Sengonwetan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		6. Banjardowo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Kalisari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
15	GABUS I	1. Keyongan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		2. Suwatu	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Nglinduk	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Pelem	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		5. Sulursari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		6. Tlogotirto	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		7. Tahunan	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
16	GABUS II	1. Gabus	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Pandanarum	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Tunggulrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Bendoharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		5. Kalipang	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		6. Karangrejo	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi
		7. Banjarejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
17	NGARINGAN	1. Ngarap arap	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		2. Sendangrejo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		3. Sarirejo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		4. Kalangdosari	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		5. Kalanglundo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		6. P e n d e m	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		7. Sumberagung	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		8. Bandungsari	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		9. Ngaringan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi
		10. B e l o r	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		11. Trowolu	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		12. Tanjungharjo	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
18	WIROSARI I	1. Sambirejo	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		2. Tanjungrejo	1					
		3. K u n d e n	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		4. Tambakrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		5. K r o p a k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		6. Kalirejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		7. Dapurno	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		8. Wirosari	1					
19	WIROSARI II	1. Mojorebo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		2. Gedangan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		3. Tambakselo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		4. Karangasem	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		5. D o k o r o	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		6. Tegalrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
20	TAWANGHARJO	1. Pulorambe	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		2. Mayahan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		3. J o n o	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. S e l o	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		5. Tawangharjo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		6. T a r u b	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		7. P o j o k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Plosorejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		9. G o d a n	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		10. Kemadohbatur	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
21	GROBOGAN	1. Getasrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		2. Rejosari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		3. Tanggunharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Teguhan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		5. Ngabenrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		6. Groboogan	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Karangrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Putatsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		9. L e b a k	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		10. Lebengjumuk	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		11. S e d a y u	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		12. Sumerjatipohon	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
22	PURWODADI I	1. Purwodadi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		2. Danyang	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		3. Genuksuran	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		4. Ngembak	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		5. Kuripan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		6. Putat	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		7. Pulorejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		8. Cingkrong	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		9. Candisari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
23	PURWODADI II	1. Kalongan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		2. Ngraji	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Kandangan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		4. Nambuhan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		5. Warukaranganyar	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		6. Nglobar	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Kedungrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Karanganyar	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
24	B R A T I	1. Menduran	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Jangkungharjo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. T e m o n	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Lemahputih	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		5. T i r e m	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. Karang Sari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Kronggen	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Katekan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		9. Tegalsumur	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
25	KLAMBU	1. Kandangrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		2. Selojari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		3. Taruman	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Penganten	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		5. K l a m b u	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		6. Menawan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Terkesi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Jenengan	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		9. Wandankemiri	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
26	GODONG I	1. Pahesan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		2. Jatilor	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		3. Bringin	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. K l a m p o k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		5. G o d o n g	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		6. B u g e l	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		7. Ketitang	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		8. R a j e k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi
		9. Harjowinangun	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		10. Karanggeneng	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		11. Wanutunggal	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		12. Manggarwetan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		13. Manggarmas	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi
		14. Tinanding	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
27	GODONG II	1. T u n g u	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. L a t a k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		3. Sumurgede	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		4. Sambung	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		5. Ketangirejo	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		6. Anggaswangi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. G u c i	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		8. Werdoyo	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		9. Guyangan	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko
		10. G u n d i	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		11. Sumberagung	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		12. Kemloko	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		13. K o p e k	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		14. Dorolegi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
28	GUBUG I	1. Kemiri	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		2. Papanrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		3. Kunjeng	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		4. Kuwaron	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		5. Rowosari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang
		6. G u b u g	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		7. P r a n t e n	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		8. Jatipecaron	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		9. Baturagung	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		10. Tambakan	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		11. Ringinkidul	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		12. Ringinharjo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
		13. Tlogomulyo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
29	GUBUG II	1. Penadaran	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		2. G e l a p a n	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		3. N g r o t o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		4. Ginggangtani	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang
		5. J e k e t r o	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		6. S a b a n	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Mlilir	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Trisari	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
30	TEGOWANU	1. Kebonagung	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		2. Tlogorejo	Berisiko Sedang	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi
		3. M e d a n i	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		4. Sukarejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi
		5. Tanggirejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		6. Mangunsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		7. Gebangan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		8. Kejawan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang

NO	PUSKESMAS	DESA	RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					RESUME KATEGORI IRS DESA
			SUMBER AIR	AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSAMPAHAN	GENANGAN AIR	PHBS	
		9. Tegowanu wetan	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		10. Tegowanu kulon	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		11. Tajemsari	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi
		12. Karangpasar	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Berisiko Sedang	Risiko Tinggi
		13. Kedungwungu	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Kurang Berisiko
		14. P e p e	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		15. C u r u g	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		16. Cangkring	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang
		17. G a j i	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Risiko Tinggi	Berisiko Sedang
		18. Tanjungrejo	Kurang Berisiko	Risiko Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi	Kurang Berisiko	Berisiko Sedang	Berisiko Sedang

Lampiran 2: Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah

Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	2.203.275.381.321,00	2.426.674.663.998,00	2.439.501.262.356,00	2.581.437.543.584,00	2.528.344.640.296,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	299.211.316.168,00	440.456.238.668,00	315.743.175.974,00	344.559.032.450,00	349.914.052.415,00
1.1.1.	Pajak Daerah	58.183.631.899	70.309.153.782,00	77.019.507.200,00	95.732.253.435,00	96.136.851.265,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	29.772.753.265	13.700.577.914,00	12.766.569.962,00	15.508.781.728,00	14.051.835.380,00
1.1.2.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.893.234.992	27.906.619.923,00	17.543.791.034,00	22.066.931.925,00	22.507.011.546,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	199.361.696.012	328.539.887.049,00	208.413.307.778,00	211.251.065.362,00	217.218.354.224,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.897.629.137.535,00	1.980.290.287.980,00	1.993.004.329.115,00	2.090.885.628.056,00	2.019.534.077.881,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.705.546.807.799,00	1.759.723.293.511,00	1.794.017.726.760,00	1.890.096.706.035,00	1.811.354.359.234,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	192.082.329.736,00	220.566.994.469,00	198.986.602.355,00	200.788.922.021,00	208.179.718.647,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.434.927.618,00	5.928.137.350,00	130.753.757.267,00	145.992.883.078,00	158.896.510.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.434.927.618,00	5.928.137.350	130.753.757.267,00	145.992.883.078,00	158.896.510.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Tabel 2 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Belanja Daerah	2.331.272.039.305,00	2.553.147.904.253,00	2.345.537.047.244,00	2.551.226.710.394,00	2.511.268.625.929,00
2.1.	Belanja Operasi	1.471.697.352.733,00	1.524.586.305.391	1.545.307.587.569,00	1.682.452.375.894,00	1.655.258.895.715,00

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Belanja Pegawai	922.053.890.283,00	866.636.879.160,00	861.568.376.624,00	911.923.107.676,00	875.409.757.050,00
	Belanja Barang dan Jasa	437.828.985.150,00	570.006.247.713,00	588.752.938.863,00	701.664.322.836,00	639.952.659.447
	Belanja Bunga	2.789.448,00	2.879.142.297	11.559.669.883	7.290.094.514	4.546.059.006,00
	Belanja Subsidi	488.500.000,00	503.500.000	500.000.000	-	-
	Belanja Hibah	97.479.136.352,00	74.722.471.325,00	63.127.481.449,00	45.669.056.270,00	102.381.229.041,00
	Belanja Bantuan Sosial	13.844.051.500,00	9.838.064.896,00	19.799.120.750,00	15.905.794.598,00	32.969.191.171,00
2.2	Belanja Modal	494.821.083.320,00	603.353.904.468	423.425.389.079	448.666.101.416	338.711.253.077,00
	Belanja Modal Tanah	4.713.898.940,00	567.481.560,00	544.311.250,00	5.599.391.161,00	2.414.665.360
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.630.244.004,00	45.038.721.504,00	49.016.271.397,00	67.063.245.877,00	54.442.542.071,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.367.106.378,00	94.561.050.460,00	118.159.786.066,00	168.717.859.576,00	112.145.479.575,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	297.881.878.383,00	443.357.646.915,00	226.559.468.019,00	179.254.265.166,00	135.745.467.947,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	27.227.955.615,00	19.829.004.029,00	29.145.552.347,00	28.031.339.636,00	33.963.098.124,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	-	-	-	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.221.089.002,00	-	-	-	96.630.668.059,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.221.089.002,00	-	-	-	96.630.668.059,00
2.4	Belanja Transfer	363.532.514.250,00	425.207.694.394	376.804.070.596,00	420.108.233.084,00	420.667.809.078,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.854.749.500,00	8.299.477.844	7.886.297.402,00	9.500.414.384,00	9.846.551.309,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	352.677.764.750,00	416.908.216.550	368.917.773.194,00	410.607.818.700,00	410.821.257.769,00

Tabel 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	258.536.570.691,00	297.521.678.641,00	136.123.306.736,00	165.056.361.798,00	135.294.988.404,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	257.415.001.441,00	119.867.504.907,00	135.494.838.386,00	164.086.481.848,00	134.760.692.754,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	175.959.184.634	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	1.121.569.250	1.694.989.100	628.468.350	969.879.950	534.295.650
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.672.447.800,00	35.553.600.000,00	66.001.040.000,00	60.506.522.234,00	49.191.314.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.447.800	-	49.491.040.000	49.466.522.234	24.941.314.000
	Penyertaan modal daerah	9.336.000.000,00	35.043.600.000,00	15.200.000.000,00	10.170.000.000,00	24.250.000.000,00
	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Pemberian pinjaman daerah	1.290.000.000	510.000.000	1.310.000.000	870.000.000	-
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	247.864.122.891,00	261.968.078.641,00	70.122.266.736,00	104.549.839.564,00	86.103.674.404,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	119.867.464.907,00	135.494.838.386,00	164.086.481.848,00	134.760.672.754,00	103.179.688.771,00

Lampiran 4: Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK

Tabel 1 Tingkat Area Berisiko Sanitasi

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Berisiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
1	Kedungjati	Prigi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
2	Kedungjati	Ngombak	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
3	Kedungjati	Kentengsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
4	Kedungjati	Karanglangu	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
5	Kedungjati	Panimbo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah	Resiko Rendah
6	Kedungjati	Padas	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
7	Kedungjati	Deras	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
8	Kedungjati	Klitikan	Resiko Sangat Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
9	Kedungjati	Kedungjati	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
10	Kedungjati	Kalimaro	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
11	Kedungjati	Jumo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
12	Kedungjati	Wates	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
13	Karangrayung	Gunung Tumpeng	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
14	Karangrayung	Ketro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
15	Karangrayung	Sendangharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
16	Karangrayung	Karanganyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
17	Karangrayung	Parakan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
18	Karangrayung	Nampu	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
19	Karangrayung	Karangsono	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
20	Karangrayung	Jetis	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
21	Karangrayung	Telawah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
22	Karangrayung	Cekel	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
23	Karangrayung	Mangin	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
24	Karangrayung	Sumberjosari	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
25	Karangrayung	Mojoagung	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
26	Karangrayung	Pangkalan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
27	Karangrayung	Rawoh	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
28	Karangrayung	Dempel	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
29	Karangrayung	Termas	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
30	Karangrayung	Putatnganten	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
31	Karangrayung	Temurejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
32	Penawangan	Lajer	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
33	Penawangan	Sedadi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
34	Penawangan	Bologarang	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Rendah
35	Penawangan	Karangwader	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
36	Penawangan	Toko	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
37	Penawangan	Pengkol	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
38	Penawangan	Leyangan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
39	Penawangan	Watu Pawon	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
40	Penawangan	Tunggu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
41	Penawangan	Jipang	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
42	Penawangan	Kramat	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
43	Penawangan	Curut	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
44	Penawangan	Wedoro	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
45	Penawangan	Kluwan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
46	Penawangan	Karangpaing	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
47	Penawangan	Pulutan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
48	Penawangan	Winong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
49	Penawangan	Wolo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
50	Penawangan	Ngeluk	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
51	Penawangan	Penawangan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
52	Toroh	Dimoro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
53	Toroh	Genengadal	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
54	Toroh	Sindurejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
55	Toroh	Bandungharjo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
56	Toroh	Genengsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
57	Toroh	Kenteng	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
58	Toroh	Ngrandah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
59	Toroh	Tunggak	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
60	Toroh	Boloh	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
61	Toroh	Plosoharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
62	Toroh	Tambirejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
63	Toroh	Depok	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
64	Toroh	Krangganharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
65	Toroh	Sugihan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
66	Toroh	Pilangpayung	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
67	Toroh	Katong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
68	Geyer	Rambat	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
69	Geyer	Kalangbancar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
70	Geyer	Juworo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
71	Geyer	Monggot	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
72	Geyer	Ngrandu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
73	Geyer	Bangsri	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
74	Geyer	Karang Anyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
75	Geyer	Asemrudung	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
76	Geyer	Jambangan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
77	Geyer	Geyer	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
78	Geyer	Ledokdawan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
79	Geyer	Sobo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
80	Geyer	Suru	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
81	Pulokulon	Randurejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
82	Pulokulon	Mlowokarangtalun	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
83	Pulokulon	Pojok	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
84	Pulokulon	Jatiharjo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
85	Pulokulon	Sidorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
86	Pulokulon	Tuko	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
87	Pulokulon	Panunggalan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
88	Pulokulon	Mangunrejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
89	Pulokulon	Jetaksari	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
90	Pulokulon	Pulokulon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
91	Pulokulon	Jambon	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
92	Pulokulon	Karangharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
93	Pulokulon	Sembungharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
94	Kradenan	Bago	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
95	Kradenan	Simo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
96	Kradenan	Rejosari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
97	Kradenan	Pakis	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
98	Kradenan	Crewek	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
99	Kradenan	Banjarsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
100	Kradenan	Kradenan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
101	Kradenan	Sambongbangi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
102	Kradenan	Sengonwetan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
103	Kradenan	Banjardowo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
104	Kradenan	Kalisari	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
105	Kradenan	Kuwu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
106	Kradenan	Grabagan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
107	Kradenan	Tanjungsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
108	Gabus	Keyongan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
109	Gabus	Suwatu	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
110	Gabus	Nglinduk	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
111	Gabus	Pelem	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
112	Gabus	Sulursari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
113	Gabus	Tlogotirto	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
114	Gabus	Gabus	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
115	Gabus	Pandanharum	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
116	Gabus	Tunggulrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
117	Gabus	Tahunan	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
118	Gabus	Bendoharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
119	Gabus	Kalipang	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
120	Gabus	Karangrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
121	Gabus	Banjarejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
122	Ngaringan	Sendangrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
123	Ngaringan	Sarirejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
124	Ngaringan	Kalangdosari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
125	Ngaringan	Kalanglundo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
126	Ngaringan	Truwolu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
127	Ngaringan	Pendem	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
128	Ngaringan	Bandungsari	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
129	Ngaringan	Ngaringan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
130	Ngaringan	Ngaraparap	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
131	Ngaringan	Belor	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
132	Ngaringan	Tanjungharjo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
133	Ngaringan	Sumberagung	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
134	Wirosari	Sambirejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
135	Wirosari	Tanjungrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
136	Wirosari	Kunden	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
137	Wirosari	Tambahrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
138	Wirosari	Kropak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
139	Wirosari	Kalirejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
140	Wirosari	Dapurno	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
141	Wirosari	Mojorebo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
142	Wirosari	Wirosari	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
143	Wirosari	Gedangan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
144	Wirosari	Tambakselo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
145	Wirosari	Karangasem	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
146	Wirosari	Dokoro	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
147	Wirosari	Tegalrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
148	Tawangharjo	Pulongrambe	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
149	Tawangharjo	Mayahan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
150	Tawangharjo	Jono	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
151	Tawangharjo	Selo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
152	Tawangharjo	Tawangharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
153	Tawangharjo	Tarub	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
154	Tawangharjo	Pojok	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
155	Tawangharjo	Plosorejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
156	Tawangharjo	Godan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
157	Tawangharjo	Kemaduhbatur	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
158	Grobogan	Getasrejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
159	Grobogan	Rejosari	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
160	Grobogan	Tanggungharjo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
161	Grobogan	Teguhan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
162	Grobogan	Ngabenrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
163	Grobogan	Grobogan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
164	Grobogan	Karangrejo	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
165	Grobogan	Putatsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
166	Grobogan	Lebak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
167	Grobogan	Lebengjumuk	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
168	Grobogan	Sedayu	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
169	Grobogan	Sumber Jatipohon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
170	Purwodadi	Candisari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Tinggi

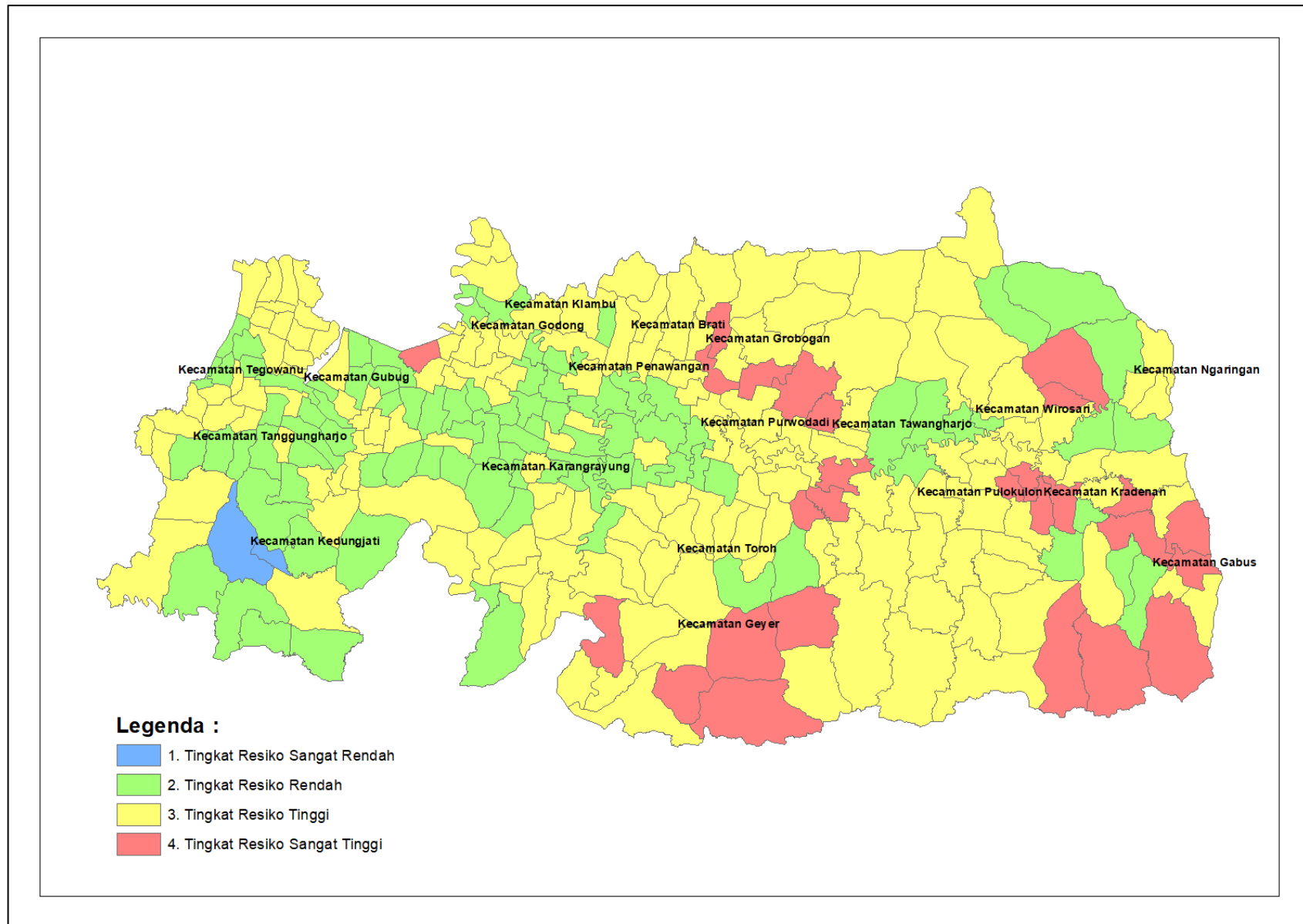
No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
171	Purwodadi	Genuksuran	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
172	Purwodadi	Danyang	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
173	Purwodadi	Kalongan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
174	Purwodadi	Ngraji	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
175	Purwodadi	Kandangan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi
176	Purwodadi	Nambuhan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
177	Purwodadi	Warukaranganyar	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
178	Purwodadi	Nglobar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
179	Purwodadi	Kedungrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
180	Purwodadi	Karanganyar	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
181	Purwodadi	Purwodadi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
182	Purwodadi	Kuripan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
183	Purwodadi	Ngembak	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
184	Purwodadi	Cingkong	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
185	Purwodadi	Pulorejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
186	Purwodadi	Putat	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
187	Brati	Menduran	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
188	Brati	Jangkungharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
189	Brati	Temon	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
190	Brati	Lemahputih	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
191	Brati	Tirem	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
192	Brati	Karangsari	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
193	Brati	Kronggen	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
194	Brati	Katekan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
195	Brati	Tegalsumur	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
196	Klambu	Kandangrejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
197	Klambu	Selolari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
198	Klambu	Taruman	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
199	Klambu	Penganten	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
200	Klambu	Klambu	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
201	Klambu	Menawan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
202	Klambu	Terkesi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
203	Klambu	Jenengan	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
204	Klambu	Wandankemiri	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
205	Godong	Tungu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
206	Godong	Pahesan	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
207	Godong	Latak	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
208	Godong	Sumurgede	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
209	Godong	Sambung	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
210	Godong	Ketangirejo	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
211	Godong	Anggaswangi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
212	Godong	Guci	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
213	Godong	Weroyo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
214	Godong	Guyangan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
215	Godong	Gundi	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
216	Godong	Jatilor	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
217	Godong	Sumberagung	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
218	Godong	Bringin	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
219	Godong	Klampok	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
220	Godong	Kemloko	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
221	Godong	Godong	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
222	Godong	Bugel	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
223	Godong	Ketitang	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
224	Godong	Kopek	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
225	Godong	Dorolegi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
226	Godong	Rajek	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
227	Godong	Harjowinangun	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
228	Godong	Karanggeneng	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah

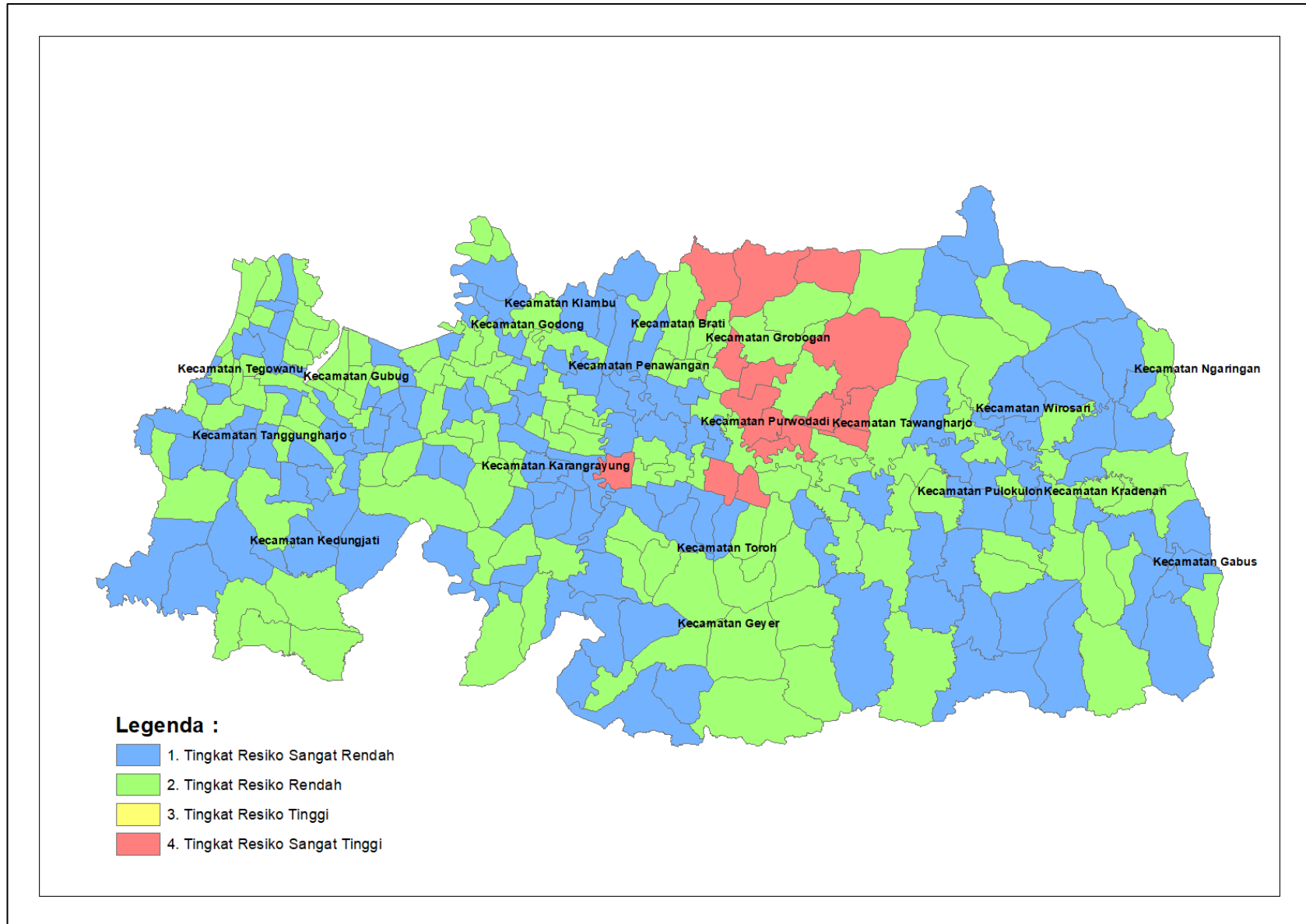
No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
229	Godong	Wanutunggal	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
230	Godong	Manggarwetan	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
231	Godong	Manggarmas	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
232	Godong	Tinanding	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
233	Gubug	Penadaran	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
234	Gubug	Gelapan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
235	Gubug	Ngroto	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
236	Gubug	Ginggangtani	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
237	Gubug	Jeketro	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
238	Gubug	Saban	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
239	Gubug	Mlilir	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
240	Gubug	Kemiri	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
241	Gubug	Papanrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
242	Gubug	Kunjeng	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
243	Gubug	Trisari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
244	Gubug	Kuwaron	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
245	Gubug	Rowosari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
246	Gubug	Gubug	Resiko Rendah	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
247	Gubug	Pranten	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
248	Gubug	Jatipecaron	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
249	Gubug	Baturagung	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
250	Gubug	Tambakan	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
251	Gubug	Ringinkidul	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
252	Gubug	Ringinharjo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
253	Gubug	Tlogomulyo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
254	Tegowanu	Kebonagung	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
255	Tegowanu	Tlogorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
256	Tegowanu	Medani	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah	Resiko Sangat Rendah
257	Tegowanu	Sukorejo	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah

No	Kecamatan	Desa	Tingkat Area Beresiko		
			Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
258	Tegowanu	Tanggirejo	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
259	Tegowanu	Mangunsar	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
260	Tegowanu	Gebangan	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
261	Tegowanu	Kejawan	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
262	Tegowanu	Tegowanu Wetan	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
263	Tegowanu	Tegowanu Kulon	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
264	Tegowanu	Tajemsari	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah
265	Tegowanu	Karangpasar	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
266	Tegowanu	Kedungwungu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Rendah
267	Tegowanu	Pepe	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
268	Tegowanu	Curug	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
269	Tegowanu	Cangkring	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
270	Tegowanu	Gaji	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
271	Tegowanu	Tunjungharjo	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
272	Tanggungharjo	Ringinpitu	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Rendah
273	Tanggungharjo	Mrisi	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
274	Tanggungharjo	Ngambakrejo	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
275	Tanggungharjo	Kapung	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Rendah
276	Tanggungharjo	Kaliwenang	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah
277	Tanggungharjo	Sugihmanik	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
278	Tanggungharjo	Tanggungharjo	Resiko Rendah	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Sangat Rendah
279	Tanggungharjo	Brabo	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi	Resiko Rendah
280	Tanggungharjo	Padang	Resiko Tinggi	Resiko Rendah	Resiko Sangat Rendah

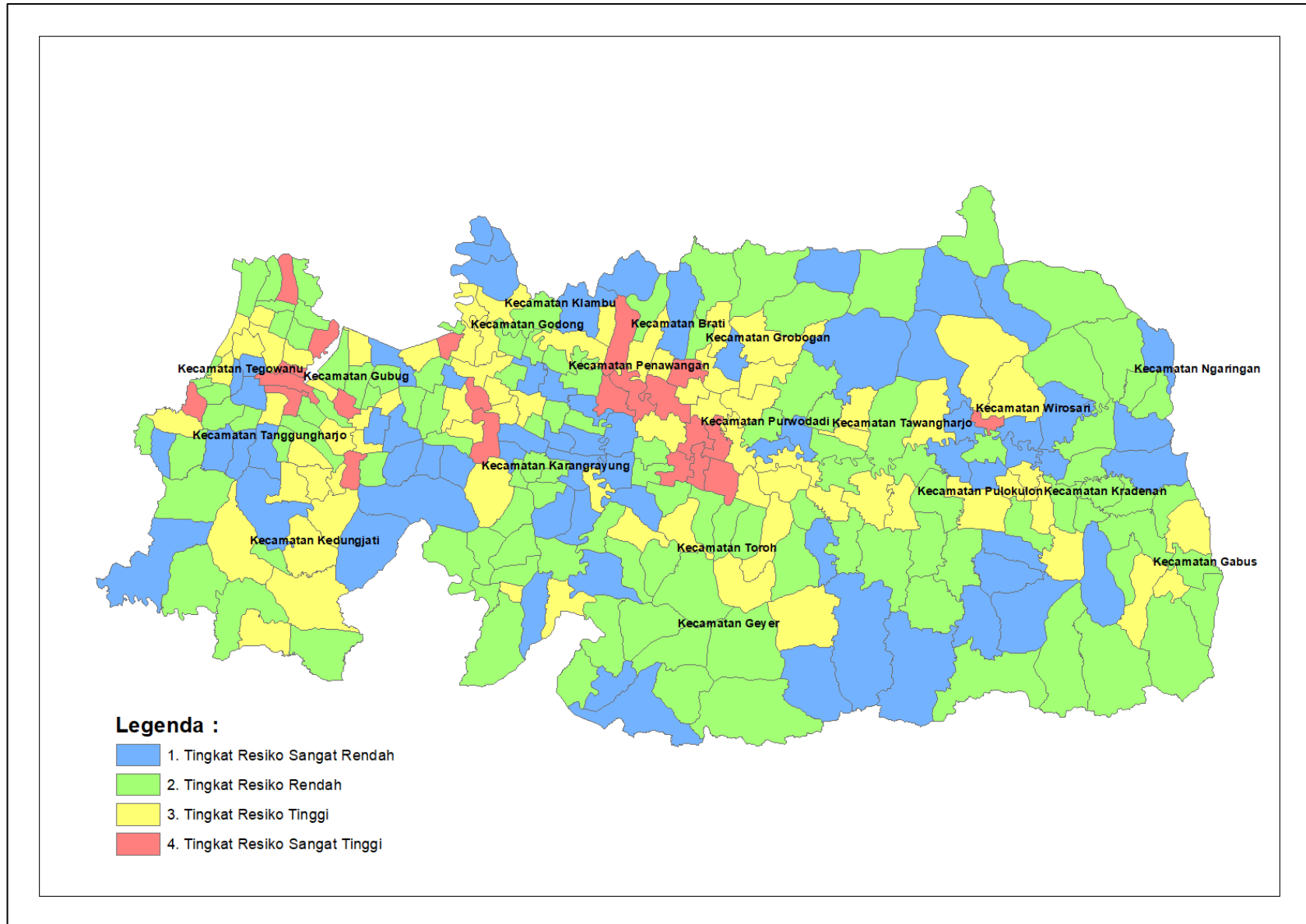
Sumber: Instrumen SSK, 2021



Gambar 1 Peta Beresiko Air Limbah Domestik



Gambar 2 Peta Area Beresiko Pengelolaan Persampahan



Gambar 3 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
REKAPITULASI**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan menyeluruh					Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)							
		SATUAN	Volume					Total Volume	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	Kab.	Prov.	APBN	APBN - DAK	SWASTA/ CSR	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026													
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.	AIR LIMBAH DOMESTIK																			
1	PERENCANAAN UMUM																			
1-1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	Paket	1					1	150	0	0	0	0	150	150					0
1-2	Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	Paket					1	1	0	0	0	0	150	150						0
2	PENYIAPAN MASYARAKAT (SPALD-S INDIVIDUAL) dengan pendekatan STBM																			
2-1	Pelatihan Fasilitator	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000					0
2-2	Pemicuan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	100	100	100	100	100	500	500					0
2-3	Pembentukan KSM	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	250	250	250	250	250	1.250	1.250					0
2-4	Pelatihan dan pemilihan Opsi Teknologi	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	250	250	250	250	250	1.250	1.250					0
2-5	Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	200	200	200	200	200	1.000	1.000					0
2-6	Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	100	100	100	100	100	500						500
2-7	Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	15.000					0
2-8	Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	500	500	500	500	500	2.500						2.500
2-9	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	500	500	500	500	500	2.500						2.500
2-10	Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000						5.000
2-11	Monev STBM																			
2-11-1	Pelatihan Monev STBM	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	125					0
2-11-2	Verifikasi Desa/Kelurahan STBM	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	125					0
2-11-3	Pelaksanaan Monev STBM (input data oleh Sanitarian) dan Masyarakat	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	125					0
2-12	Deklarasi STBM Kabupaten/Kota	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	125					0
3	SPALD SETEMPAT (ON-SITE SISTEM)																			
3-1	BERBASIS MASYARAKAT																			
3-1-1	Pemicuan	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125				375		-250
3-1-2	Pembangunan MCK, Tangki septik komunal (termasuk Pengadaan TFL; Pembentukan KSM; perencanaan/bantuan teknis; pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan keuangan)	Unit	500	750	1.000	1.250	1.500	5.000	2.500	3.750	5.000	6.250	7.500	25.000			1.500			23.500
3-1-3	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50						50
3-1-4	Operasi dan Pemeliharaan	Paket	50	75	100	125	150	500	50	75	100	125	150	500						500
3-3	MCK (Komunal) - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM																			
3-3-1	Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	1	2	2	2	2	9	1	1	1	1	1	5		5				0
3-3-2	Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK	Paket	1	2	2	2	2	9	1	1	1	1	1	5		5				0
3-3-3	Pembangunan MCK	Unit	1	2	2	2	2	9	250	500	600	700	800	2.850		2.850				0
3-3-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK	Paket	1	2	2	2	2	9	5	10	10	10	10	45						45
3-4	Pembangunan Tangki Septik Komunal - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM																			
3-4-1	Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		15				0
3-4-2	Perencanaan Detail Septiktank Komunal & Jaringan perpipaan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		15				0
3-4-3	Pembangunan Tangki Septik Komunal & Jaringan Perpipaan	Unit	2	4	6	8	10	30	700	1.400	2.100	2.800	3.500	10.500		10.500				0
3-4-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septik Komunal	Paket	2	4	6	8	10	30	10	20	30	40	50	150						150
5	SPALD TERPUSAT (SPALD-T)																			
5-1-1	IPAL Komunal - berbasis Masyarakat																			
5-1-1-1	Pemicuan	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18				18		0
5-1-1-2	Pembangunan IPAL komunal (termasuk TFL, Pembentukan KSM; perencanaan/bantuan teknis; pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan keuangan dsb)	Unit	7	7	7	7	7	35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500			17.500			0
5-1-1-3	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18						18
5-1-1-4	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18						18
5-1-2	IPAL Komunal - berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM)																			
5-1-2-1	Pemicuan	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7		7				0
5-1-2-2	Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7		7				0
5-1-2-3	Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan	unit	2	2	3	3	3	13	700	700	1.050	1.650	1.650	5.750		5.750				0
5-1-2-4	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7						7

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kebutuhan Penanganan menyeluruh					Total Volume	Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					
			Volume						2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	Kab.	Prov.	APBN	APBN - DAK	SWASTA/ CSR	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026													
6	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH																			
6-1	Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Paket	1					1	100	0	0	0	0	0	100	100				0
6-2	Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Paket		1				1	0	100	0	0	0	0	100		100			0
6-3	Penyusunan Perda dalam penyelenggaraan sistem air limbah rumah tangga	Paket	1					1	100	0	0	0	0	0	100	100				0
6-4	Penyusunan Perda Pengelolaan IPLT dan Kerjasama swasta	Paket		1				1	0	100	0	0	0	0	100	100				0
6-5	Pembentukan Lembaga Pengelolaan UPTD Air Limbah	Paket			1			1	0	0	100	0	0	0	100		100			0
6-6	Penyusunan Perda Pengelolaan SPALD-T.	Paket		1				1	0	100	0	0	0	0	100	100				0
6-7	Pembentukan Lembaga Pengelolaan SPALD-T.	Paket			1			1	0	0	100	0	0	0	100		100			0
7	PEMASARAN SANITASI																			
7-1	Penyusunan Perda tentang Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah	Paket		1				1	0	75	0	0	0	0	75	75				0
7-2	Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kabupaten	Paket	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	3	3				0
7-3	Koordinasi Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi di Kabupaten	Paket	1	1	1	1	1	5	2	2	2	2	2	2	10	10				0
7-4	Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi ditingkat Kabupaten	Paket	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	3	13	13				0
7-5	Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kabupaten	Paket	10	20	30	40	50	150	5	10	15	20	25	25	75	75				0
8	PEMANTAUAN																			
8-1	Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Air Sumur)	Paket	15	30	45	60	75	225	23	45	68	90	113	113	338	338				0
9	LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)																			
9-1	Pelaksanaan Program LLTT																			
9-1-1	Penyiapan database kepemilikan tangki septik yang layak sedot	Paket	1	1	1	1	1	5	35	35	35	35	35	35	175		175			0
9-1-2	Penyiapan database operator jasa kuras WC	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	25	125		125			0
9-1-3	Penyiapan perdatentang L2T2 Dan L2T3	Paket	1					1	200	0	0	0	0	0	200		200			0
9-1-4	Peningkatan Kapasitas dan ijin lingkungan untuk operator jasa kuras WC baik swasta maupun pemerintah	Paket	1	1	1	1	1	5	75	75	75	75	75	75	375		375			0
9-1-5	Pengadaan truk tinja (Bisa melalui kerjasama)	Paket	1		1			1	500	0	500	0	500	500	1.500		1.500			0
9-1-6	Pengembangan L2T2 Dan L2T3 bagi MBR dengan mekanisme kredit tanpa bunga melalui kerjasama dengan lembaga keuangan tingkat kelurahan	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250		250			0
9-1-7	Pengembangan L2T2 Dan L2T3 bagi MBR dengan mekanisme kredit tanpa bunga melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lingkup ASN	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250		250			0
9-1-8	Penyusunan strategi pemasaran agar masyarakat berminat terhadap program	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250		250			0
9-1-9	Proposi dan pemasaran L2T2 Dan L2T3	Paket	1	1	1	1	1	5	65	65	65	65	65	65	325		325			0
9-1-10	Penerimaan Pendaftaran dan database	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250		250			0
9-2	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																			
9-2-1	Pengadaan Truk Tinja	Unit				1	1	2	0	0	0	500	500	1.000	500				500	0
9-3	Optimalisasi IPLT																			
9-3-1	Optimalisasi IPLT	Paket		1				1	0	500	0	0	0	500	1.000	1.000				0
10	PEMANFAATAN DANA DESA, CSR DAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN SANITASI																			
10-1	Sosialisasi dan Workshop CSR																			
	Sosialisasi dan Workshop CSR	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250				250	0
10-2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan CSR																			
10-2-1	Mou Komitmen CSR oleh pihak swasta dalam pendanaan sanitasi	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250				250	0
10-2-2	Pelaksanaan kegiatan CSR untuk sanitasi (Kegiatan, alokasi dana dan lokasi)	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	50	250				250	0
10-3	Jamban Sehat																			
10-3-1	Sosialisasi kegiatan jamban	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	10	50				50	0
10-3-2	Surve lokasi dan pengukuran	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	10	50				50	0
10-3-3	Mou pihak pelaksana kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	10	50				50	0
10-3-4	Pelaksanaan kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	150	150	150	150	150	150	750				750	0
10-3-5	Monev	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	10	50				50	0
10-4	Tangki Septik Sehat																			
10-4-1	Sosialisasi kegiatan jamban	Paket	100	100	100	100	100	500	15	15	15	15	15	15	75				75	0
10-4-2	Surve lokasi dan pengukuran	Paket	100	100	100	100	100	500	25	25	25	25	25	25	125				125	0
10-4-3	Mou pihak pelaksana kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	10	50				50	0
10-4-4	Pelaksanaan kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	500	500	500	500	500	500	2.500				2.500	0
10-4-5	Monev	Paket	100	100	100	100	100	500	25	25	25	25	25	25	125				125	0
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								17.164	19.260	21.551	24.065	27.330	109.369	27.213	8.622	14.530	19.393	5.075	34.537
B.	PERSAMPAHAN																			
1	PERENCANAAN UMUM																			
1-1	Penyusunan Masterplan Persampahan - (untuk Kota Metropolitan dan Besar)	Paket			1			1	0	0	75	0	0	0	75	75				0
1-2	Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten	Paket			1			1	0	0	75	0	0	0	75	75				0
1-3	Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan	Paket			1			1	0	0	75	0	0	0	75	75				0

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						
		SATUAN	Volume					Total Volume	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	Kab.	Prov.	APBN	APBN - DAK	SWASTA/ CSR	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026													
2	PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA																			
2-1	PENYIAPAN MASYARAKAT (KERANJANG SAMPAH INDIVIDU, 3R SKALA RUMAH TANGGA)																			
2-1-1	Pelatihan Wirusaha Sanitasi	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-2	Pemicuan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-3	Pembentukan KSM	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	15				0	
2-1-4	Pelatihan dan pemilihan Opsi Teknologi	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	15				0	
2-1-5	Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-6	Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-7	Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi	Unit	2	4	6	8	10	30	50	100	150	200	250	750	750				0	
2-1-8	Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-9	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-1-10	Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15					15	
2-2	KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH																			
2-2-1	Pengadaan Gerobak Sampah	unit	10	15	20	25	30	100	35	53	70	88	105	350					350	
2-2-2	Pengadaan Gerobak Sampah bermotor	unit	5	10	15	20	25	75	125	250	375	500	625	1.875					1.875	
2-2-3	Pengadaan Mobil Pick Up Sampah	unit	2	4	6	8	10	30	330	660	990	1.320	1.650	4.950					4.950	
2-2-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah	Paket	10	10	10	10	10	50	5	5	5	5	5	25					25	
2-2-5	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor	Paket	5	5	5	5	5	25	10	10	10	10	10	50					50	
2-2-6	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Mobil Pick Up Sampah	Paket	5	5	5	5	5	25	50	50	50	50	50	250					250	
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA																			
2-3-1	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM)																			
2-3-1-1	Pemicuan	Paket	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	10				0	
2-3-1-2	Pembangunan TPS 3R (termasuk Pembentukan KSM TPS 3R; Persiapan kontribusi masyarakat; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R)	Unit	2	2	2	2	2	10	600	700	800	900	1.000	4.000	4.000				0	
2-3-1-3	Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500					500	
2-3-1-4	Pemantauan dan Evaluasi	Paket	2	2	2	2	2	10	5	5	5	5	5	25	25				0	
2-3-2	Pembangunan TPS Biasa - Berbasis Kelembagaan																			
2-3-2-1	Penyusunan DED	Paket	2	2	2	2	2	10	70	70	70	70	70	350			350		0	
2-3-2-2	Supervisi dan Pembangunan TPS	Unit	2	4	6	8	10	30	700	1.400	2.100	2.800	3.500	10.500			10.500		0	
2-3-2-3	Pemeliharaan TPS	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500					500	
2-3-2-4	Rehabilitasi TPS	Paket	2	2	2	2	2	10	500	500	500	500	500	2.500			2.500		0	
2-3-3	Pembangunan TPS (Transfer Depo) - Berbasis Kelembagaan																			
2-3-3-1	Perencanaan Teknis (DED)	Paket	2	2	2	2	2	10	70	70	70	70	70	350	350				0	
2-3-3-2	Supervisi dan Pembangunan (TPS Transfer Depo)	Unit	2	2	2	2	2	10	700	700	700	700	700	3.500	3.500				0	
2-3-3-3	Pemeliharaan TPS (Transfer Depo)	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500	500				0	
2-3-3-4	Rehabilitasi TPS (Transfer Depo)	Paket	2	2	2	2	2	10	500	500	500	500	500	2.500	2.500				0	
2-3-4	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)																			
2-3-4-1	Studi Lingkungan	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525			525		0	
2-3-4-2	Penyusunan DED TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525			525		0	
2-3-4-3	Pemicuan	Paket	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15			15		0	
2-3-4-4	Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15			15		0	
2-3-4-5	Supervisi dan Pembangunan TPS 3R	Unit	3	3	3	3	3	15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250			5.250		0	
2-3-4-6	Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525					525	
2-3-4-7	Pemantauan dan Evaluasi	Paket	3	3	3	3	3	15	9	9	9	9	9	45			45		0	
2-3-4-8	Rehabilitasi TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250			5.250		0	
2-3-5	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)																			
2-3-5-1	Studi Lingkungan	Paket		1				1	0	35	0	0	0	35			35		0	
2-3-5-2	Perencanaan Teknis (DED) SPA	Unit		1				1	0	65	0	0	0	65			65		0	
2-3-5-3	Pembangunan SPA	Paket			1			1	0	0	350	0	0	350			350		0	
2-3-5-4	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan SPA	Paket			1			1	0	0	65	0	0	65			65		0	
2-3-5-5	Pembentukan lembaga Pengelola SPA	Paket				1		1	0	0	0	50	0	50			50		0	
2-3-5-6	Pelatihan lembaga pengelola SPA	Paket				1		1	0	0	0	5	0	5			5		0	
2-3-5-7	Operasi dan Pemeliharaan SPA	Paket				1	1	2	0	0	0	35	35	70					70	
2-3-5-8	Rehabilitasi SPA	Paket					1	1	0	0	0	0	250	250			250		0	
2-3-6	Alat Angkut Stasiun antara dan TPA																			
2-3-6-1	Pengadaan Dump Truck	unit	1	1	1	1	1	5	400	400	400	400	400	2.000	2.000				0	
2-3-6-2	Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck	paket	1	1	1	1	1	5	40	40	40	40	40	200	200				0	
2-3-6-3	Pengadaan Compactor Truck	unit		1		1		2	0	1.500	0	1.500	0	3.000	3.000				0	
2-3-6-4	Operasi dan Pemeliharaan Compactor Truck	paket	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	750				0	
2-3-6-5	Pengadaan Amroll Truck	unit	1	1	1	1	1	5	420	420	420	420	420	2.100	2.100				0	
2-3-6-6	Operasi dan Pemeliharaan Amroll Truck	paket	1	1	1	1	1	5	42	42	42	42	42	210	210				0	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						
		SATUAN	Volume					Total Volume	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	Kab.	Prov.	APBN	APBN - DAK	SWASTA/ CSR	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026													
2-3-2	PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA																			
2-3-2-1	Penyusunan Studi Kelayakan TPST	Paket		1			1	0	50	0	0	0	0	50					0	
2-3-2-2	Penyusunan Studi Lingkungan	Paket		1			1	0	50	0	0	0	0	50	50				0	
2-3-2-3	Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPST kepada masyarakat sekitarnya	Paket		1	1		2	0	3	3	0	0	0	5	5				0	
2-3-2-4	Perencanaan Teknis (DED) TPST	Paket		1			1	0	50	0	0	0	0	50			50		0	
2-3-2-5	Pembangunan TPST	Unit			1	1	3	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500			4.500			0	
2-3-2-6	Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan TPST	Paket			1		1	0	0	150	0	0	0	150			150		0	
2-3-2-7	Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPST/Unit Kerja TPST	Paket			1	1	2	0	0	50	50	0	100			100			0	
2-3-2-8	Pelatihan Pengelolaan TPST	Paket			1	1	2	0	0	2	2	0	4			4			0	
2-3-2-9	Operasi dan Pemeliharaan TPST dan fasilitasnya	Paket				1	2	0	0	0	50	50	100	100					0	
2-3-2-10	Pengadaan Insenerator	Paket		1	1	1	3	0	50	50	50	0	150	150					0	
2-4	REHABILITASI / PENINGKATAN TPA																			
2-4-1	Rehabilitasi/Peningkatan TPA																			
2-4-1-1	Penyusunan Studi Lingkungan	Paket		1			1	0	75	0	0	0	75	75					0	
2-4-1-2	Sosialisasi "Rencana" Rehabilitasi/Peingkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya	Paket			1	1	2	0	0	1	1	0	2	2					0	
2-4-1-3	Perencanaan Teknis (DED)	Paket			1		1	0	0	150	0	0	150			150			0	
2-4-1-4	Rehabilitasi/Peningkatan TPA	Unit				1	2	0	0	0	5.000	5.000	10.000			10.000			0	
2-4-1-5	Pengawasan Teknis dan Rehabilitasi/Peningkatan TPA	Paket				1	1	0	0	0	0	250	250			250			0	
2-4-2	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat)																			
2-4-2-1	Pengadaan Bulldozer	Unit		1			1	0	2.500	0	0	0	2.500			2.500			0	
2-4-2-2	Pengadaan Excavator	Unit			1		1	0	0	2.500	0	0	2.500			2.500			0	
2-4-2-3	Pengadaan Land Compactor	Unit				1	1	0	0	0	2.500	0	2.500			2.500			0	
2-4-2-4	Pengadaan Loader	Unit					1	0	0	0	0	2.500	2.500			2.500			0	
2-4-3	Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya	Paket	1	1	1	1	5	900	250	250	250	250	1.900	1.900					0	
2-4-4	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	Paket	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	25					0	
2-4-5	Pelatihan Pengelolaan TPA	Paket	1	1	1	1	5	3	3	3	3	3	13	13					0	
2-4-6	Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	Paket	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	3	3					0	
2-4-9	Pemantauan dan Evaluasi TPA pada tahap Operasi	Paket	2	2	2	2	10	3	3	3	3	3	15	15					0	
2-5	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN																			
2-5-1	Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan	paket		1			1	0	75	0	0	0	75	75					0	
2-5-2	Pembentukan Lembaga Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota	paket			1		1	0	0	75	0	0	75	75					0	
2-5-3	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	paket		1			1	0	75	0	0	0	75	75					0	
2-5-4	Penyusunan Peraturan di Daerah tentang Pengelolaan TPA	paket					1	0	0	0	0	75	75	75					0	
2-5-5	Pembentukan Lembaga Pengelola TPA	paket					1	0	0	0	0	75	75	75					0	
2-5-6	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	paket	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	5					0	
2-5-7	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	paket	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	10					0	
2-5-8	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan	paket	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	25					0	
2-6	PEMANFAATAN DANA DESA, CSR DAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN SANITASI																			
	Sarana Pendukung TPS3R																			
2-6-1	Bantuan Dana Desa Pembangunan akses jalan masuk TPS3R	paket	5	10	15	20	75	250	500	750	1.000	1.250	3.750					3.750	0	
2-6-2	Bantuan Dana Desa pengadaan kendaraan roda 3	paket	5	10	15	20	75	125	250	375	500	625	1.875					1.875	0	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan							8.837	14.421	16.721	24.050	24.748	88.776	18.917	4.035	37.649	13.350	5.625	9.200	
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN							26.001	33.681	38.271	48.115	52.078	198.145	46.130	12.657	52.179	32.743	10.700	43.737	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD KABUPATEN**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kababupaten							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					OPD Penanggungjawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota							
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			Jumlah
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
1	PERENCANAAN UMUM															
1-1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	Paket	1	0	0	0	0	1	150	0	0	0	0	150	Disperakim	Disperakim
1-2	Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	Paket	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	150	150	Disperakim	Disperakim
2	PENYIAPAN MASYARAKAT (SPALD-S INDIVIDUAL) dengan pendekatan STBM															
2-1	Pelatihan Fasilitator	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Dinkes	Dinkes
2-2	Pemicuan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	100	100	100	100	100	500	Dinkes	Dinkes
2-3	Pembentukan KSM	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	250	250	250	250	250	1.250	Dinkes	Dinkes
2-4	Pelatihan dan pemilihan Opsi Teknologi	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	250	250	250	250	250	1.250	Dinkes	Dinkes
2-5	Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	200	200	200	200	200	1.000	Dinkes	Dinkes
2-7	Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Dinkes	Dinkes
2-11	Monev STBM															
2-11-1	Pelatihan Monev STBM	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	Dinkes	Dinkes
2-11-2	Verifikasi Desa/Kelurahan STBM	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	Dinkes	Dinkes
2-11-3	Pelaksanaan Monev STBM (input data oleh Sanitarian dan Masyarakat)	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125	Dinkes	Dinkes
2-12	Deklarasi STBM Kabupaten/Kota	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	Dinkes	Dinkes
6	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH															
6-1	Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Paket	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	100	Bappeda	Bappeda
6-3	Penyusunan Perda dalam penyelenggaraan sistem air limbah rumah tangga	Paket	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	100	Bappeda	Bappeda
6-4	Penyusunan Perda Pengelolaan IPLT dan Kerjasama swasta	Paket	0	1	0	0	0	1	0	100	0	0	0	100	Bappeda	Bappeda
6-6	Penyusunan Perda Pengelolaan SPALD-T.	Paket	0	1	0	0	0	1	0	100	0	0	0	100	Bappeda	Bappeda
7	PEMASARAN SANITASI															
7-1	Penyusunan Perda tentang Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah	Paket	0	1	0	0	0	1	0	75	0	0	0	75	Bappeda	Bappeda
7-2	Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kabupaten	Paket	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	3	Bappeda	Bappeda
7-3	Koordinasi Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi di Kabupaten	Paket	1	1	1	1	1	5	2	2	2	2	2	10	Bappeda	Bappeda
7-4	Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi ditingkat Kabupaten	Paket	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	13	Bappeda	Bappeda
7-5	Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kabupaten	Paket	10	20	30	40	50	150	5	10	15	20	25	75	Bappeda	Bappeda
8	PEMANTAUAN															
8-1	Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Air Sumur)	Paket	15	30	45	60	75	225	23	45	68	90	113	338	Dinkes	Dinkes
9	LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)															
9-2	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik															
9-2-1	Pengadaan Truk Tinja	Unit	0	0	0	1	0	1	0	0	0	500	0	500	DLH	DLH
9-3	Optimalisasi IPLT															
9-3-1	Optimalisasi IPLT	Paket	0	1	0	0	1	2	0	500	0	0	500	1.000	DLH	DLH
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								5.283	5.735	4.988	5.515	5.693	27.213		

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kabupaten							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					OPD Penanggungjawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota							Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B.	PERSAMPAHAN															
1	PERENCANAAN UMUM															
1-1	Penyusunan Masterplan Persampahan - (untuk Kota Metropolitan dan Besar)	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	75	0	0	75	Bappeda	Bappeda
1-2	Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	75	0	0	75	Bappeda	Bappeda
1-3	Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	75	0	0	75	Bappeda	Bappeda
2	PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA															
2-1	PENYIAPAN MASYARAKAT (KERANJANG SAMPAH INDIVIDU, 3R SKALA RUMAH TANGGA)															
2-1-3	Pembentukan KSM	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	DLH	DLH
2-1-4	Pelatihan dan pemilihan Opsi Teknologi	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	DLH	DLH
2-1-7	Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi	Unit	2	4	6	8	10	30	50	100	150	200	250	750	DLH	DLH
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA															
2-3-3	Pembangunan TPS (Transfer Depo) - Berbasis Kelembagaan															
2-3-3-1	Perencanaan Teknis (DED)	Paket	2	2	2	2	2	10	70	70	70	70	70	350	DLH	DLH
2-3-3-2	Supervisi dan Pembangunan (TPS Transfer Depo)	Unit	2	2	2	2	2	10	700	700	700	700	700	3.500	DLH	DLH
2-3-3-3	Pemeliharaan TPS (Transfer Depo)	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500	DLH	DLH
2-3-3-4	Rehabilitasi TPS (Transfer Depo)	Paket	2	2	2	2	2	10	500	500	500	500	500	2.500	DLH	DLH
2-3-6	Alat Angkut Stasiun antara dan TPA															
2-3-6-1	Pengadaan Dump Truck	unit	1	1	1	1	1	5	400	400	400	400	400	2.000	DLH	DLH
2-3-6-2	Operasi dan Pemeliharaan Dump Truck	paket	1	1	1	1	1	5	40	40	40	40	40	200	DLH	DLH
2-3-6-3	Pengadaan Compactor Truck	unit	0	1	0	1	0	2	0	1.500	0	1.500	0	3.000	DLH	DLH
2-3-6-4	Operasi dan Pemeliharaan Compactor Truck	paket	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750	DLH	DLH
2-3-6-5	Pengadaan Amroll Truck	unit	1	1	1	1	1	5	420	420	420	420	420	2.100	DLH	DLH
2-3-6-6	Operasi dan Pemeliharaan Amroll Truck	paket	1	1	1	1	1	5	42	42	42	42	42	210	DLH	DLH
2-3-2	PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA															
2-3-2-1	Penyusunan Studi Kelayakan TPST	Paket	0	1	0	0	0	1	0	50	0	0	0	50	DLH	DLH
2-3-2-2	Penyusunan Studi Lingkungan	Paket	0	1	0	0	0	1	0	50	0	0	0	50	DLH	DLH
2-3-2-3	Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPST kepada masyarakat sekitarnya	Paket	0	1	1	0	0	2	0	3	3	0	0	5	DLH	DLH
2-3-2-9	Operasi dan Pemeliharaan TPST dan fasilitasnya	Paket	0	0	0	1	1	2	0	0	0	50	50	100	DLH	DLH
2-3-2-10	Pengadaan Insenerator	Paket	0	1	1	1	0	3	0	50	50	50	0	150	DLH	DLH
2-4	REHABILITASI / PENINGKATAN TPA															
2-4-1	Rehabilitasi/Peningkatan TPA															
2-4-1-1	Penyusunan Studi Lingkungan	Paket	0	1	0	0	0	1	0	75	0	0	0	75	DLH	DLH
2-4-1-2	Sosialisasi "Rencana" Rehabilitasi/Peingkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya	Paket	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	2	DLH	DLH
2-4-2	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat)															
2-4-3	Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya	Paket	1	1	1	1	1	5	900	250	250	250	250	1.900	DLH	DLH
2-4-4	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	Paket	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	DLH	DLH
2-4-5	Pelatihan Pengelolaan TPA	Paket	1	1	1	1	1	5	3	3	3	3	3	13	DLH	DLH
2-4-6	Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	Paket	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	3	DLH	DLH
2-4-9	Pemantauan dan Evaluasi TPA pada tahap Operasi	Paket	2	2	2	2	2	10	3	3	3	3	3	15	DLH	DLH
2-5	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN															
2-5-1	Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan	paket	0	1	0	0	0	1	0	75	0	0	0	75	DLH	DLH
2-5-2	Pembentukan Lembaga Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota	paket	0	0	1	0	0	1	0	0	75	0	0	75	DLH	DLH
2-5-3	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	paket	0	1	0	0	0	1	0	75	0	0	0	75	DLH	DLH
2-5-4	Penyusunan Peraturan di Daerah tentang Pengelolaan TPA	paket	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	75	75	DLH	DLH
2-5-5	Pembentukan Lembaga Pengelola TPA	paket	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	75	75	DLH	DLH
2-5-6	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	paket	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	DLH	DLH
2-5-7	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	paket	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	DLH	DLH
2-5-8	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan	paket	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	DLH	DLH
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								3.393	4.673	3.201	4.500	3.151	18.917		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN								8.676	10.408	8.188	10.015	8.844	46.130		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					OPD Penanggungjawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi							
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			Jumlah
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
3-3	MCK (Komunal) - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM															
3-3-1	Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	1	2	2	2	2	9	1	1	1	1	1	5		
3-3-2	Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK	Paket	1	2	2	2	2	9	1	1	1	1	1	5		
3-3-3	Pembangunan MCK	Unit	1	2	2	2	2	9	250	500	600	700	800	2.850		
5-1-2	IPAL Komunal - berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM)															
5-1-2-1	Pemicuan	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7		
5-1-2-2	Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7		
5-1-2-3	Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan	unit	2	2	3	3	3	13	700	700	1.050	1.650	1.650	5.750		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								953	1.204	1.655	2.355	2.455	8.622		
B.	PERSAMPAHAN															
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA															
2-3-1	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM)															
2-3-1-1	Pemicuan	Paket	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10		
2-3-1-2	Pembangunan TPS 3R (termasuk Pembentukan KSM TPS 3R; Persiapan kontribusi masyarakat; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R)	Unit	2	2	2	2	2	10	600	700	800	900	1.000	4.000		
2-3-1-4	Pemantauan dan Evaluasi	Paket	2	2	2	2	2	10	5	5	5	5	5	25		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								607	707	807	907	1.007	4.035		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI								1.560	1.911	2.462	3.262	3.462	12.657		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBN**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
3-4	Pembangunan Tangki Septik Komunal - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM															
3-4-1	Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan)	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	BPPW Jateng	
3-4-2	Perencanaan Detail Septiktank Komunal & Jaringan perpipaan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15	BPPW Jateng	
3-4-3	Pembangunan Tangki Septik Komunal & Jaringan Perpipaan	Unit	2	4	6	8	10	30	700	1.400	2.100	2.800	3.500	10.500	BPPW Jateng	
6	PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH															
5-1	Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Paket	1					1								
6-2	Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Paket	0	1	0	0	0	1	0	100	0	0	0	100	BPPW Jateng	
6-5	Pembentukan Lembaga Pengelolaan UPTD Air Limbah	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	100	0	0	100	BPPW Jateng	
6-7	Pembentukan Lembaga Pengelolaan SPALD-T.	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	100	0	0	100	BPPW Jateng	
9	LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)															
9-1	Pelaksanaan Program LLTT															
9-1-1	Penyiapan database kepemilikan tangki septik yang layak sedot	Paket	1	1	1	1	1	5	35	35	35	35	35	175	BPPW Jateng	
9-1-2	Penyiapan database operator jasa kuras WC	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	BPPW Jateng	
9-1-3	Penyiapan perdatentang L2T2 Dan L2T3	Paket	1	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	200	BPPW Jateng	
9-1-4	Peningkatan Kapasitas dan ijin lingkungan untuk operator jasa kuras WC baik swasta maupun pemerintah	Paket	1	1	1	1	1	5	75	75	75	75	75	375	BPPW Jateng	
9-1-5	Pengadaan truk tinja (Bisa melalui kerjasama)	Paket	1	0	1	0	1	3	500	0	500	0	500	1.500	BPPW Jateng	
9-1-6	Pengembangan L2T2 Dan L2T3bagi MBR dengan mekanisme kredit tanpa bunga melalui kerjasama dengan lembaga keuangan tingkat kelurahan	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	BPPW Jateng	
9-1-7	Pengembangan L2T2 Dan L2T3bagi MBR dengan mekanisme kredit tanpa bunga melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lingkup ASN	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	BPPW Jateng	
9-1-8	Penyusunan strategi pemasaran agar masyarakat berminat terhadap program	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	BPPW Jateng	
9-1-9	Proposi dan pemasaran L2T2 Dan L2T3	Paket	1	1	1	1	1	5	65	65	65	65	65	325	BPPW Jateng	
9-1-10	Penerimaan Pendaftaran dan database	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	BPPW Jateng	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								1.802	1.904	3.206	3.208	4.410	14.530		
B.	PERSAMPAHAN															
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA															
2-3-4	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)															
2-3-4-1	Studi Lingkungan	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525	BPPW Jateng	
2-3-4-2	Penyusunan DED TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525	BPPW Jateng	
2-3-4-3	Pemicuan	Paket	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	BPPW Jateng	
2-3-4-4	Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	BPPW Jateng	
2-3-4-5	Supervisi dan Pembangunan TPS 3R	Unit	3	3	3	3	3	15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250	BPPW Jateng	
2-3-4-7	Pemantauan dan Evaluasi	Paket	3	3	3	3	3	15	9	9	9	9	9	45	BPPW Jateng	
2-3-4-8	Rehabilitasi TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250	BPPW Jateng	
2-3-5	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)															
2-3-5-1	Studi Lingkungan	Paket	0	1	0	0	0	1	0	35	0	0	0	35	BPPW Jateng	
2-3-5-2	Perencanaan Teknis (DED) SPA	Unit	0	1	0	0	0	1	0	65	0	0	0	65	BPPW Jateng	
2-3-5-3	Pembangunan SPA	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	350	0	0	350	BPPW Jateng	
2-3-5-4	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan SPA	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	65	0	0	65	BPPW Jateng	
2-3-5-5	Pembentukan lembaga Pengelola SPA	Paket	0	0	0	1	0	1	0	0	0	50	0	50	BPPW Jateng	
2-3-5-6	Pelatihan lembaga pengelola SPA	Paket	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	5	BPPW Jateng	
2-3-5-8	Rehabilitasi SPA	Paket	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	250	250	BPPW Jateng	

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2-3-2	PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA															
2-3-2-4	Perencanaan Teknis (DED) TPST	Paket	0	1	0	0	0	1	0	50	0	0	0	50	BPPW Jateng	
2-3-2-5	Pembangunan TPST	Unit	0	0	1	1	1	3	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500	BPPW Jateng	
2-3-2-6	Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan TPST	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	150	0	0	150	BPPW Jateng	
2-3-2-7	Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPST/Unit Kerja TPST	Paket	0	0	1	1	0	2	0	0	50	50	0	100	BPPW Jateng	
2-3-2-8	Pelatihan Pengelolaan TPST	Paket	0	0	1	1	0	2	0	0	2	2	0	4	BPPW Jateng	
2-4	REHABILITASI / PENINGKATAN TPA															
2-4-1	Rehabilitasi/Peningkatan TPA															
2-4-1-3	Perencanaan Teknis (DED)	Paket	0	0	1	0	0	1	0	0	150	0	0	150	BPPW Jateng	
2-4-1-4	Rehabilitasi/Peningkatan TPA	Unit	0	0	0	1	1	2	0	0	0	5.000	5.000	10.000	BPPW Jateng	
2-4-1-5	Pengawasan Teknis dan Rehabilitasi/Peningkatan TPA	Paket	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	250	250	BPPW Jateng	
2-4-2	Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat)															
2-4-2-1	Pengadaan Bulldozer	Unit	0	1	0	0	0	1	0	2.500	0	0	0	2.500	BPPW Jateng	
2-4-2-2	Pengadaan Excavator	Unit	0	0	1	0	0	1	0	0	2.500	0	0	2.500	BPPW Jateng	
2-4-2-3	Pengadaan Land Compactor	Unit	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2.500	0	2.500	BPPW Jateng	
2-4-2-4	Pengadaan Loader	Unit	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2.500	2.500	BPPW Jateng	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								2.325	4.975	7.092	11.432	11.825	37.649		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN								4.127	6.879	10.298	14.640	16.235	52.179		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBN - DAK**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN - DAK							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	APBN - DAK							
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			Jumlah
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
3	SPALD SETEMPAT (ON-SITE SISTEM)															
3-1	BERBASIS MASYARAKAT															
3-1-1	Pemicuan	Paket	10	10	10	10	10	50	25	25	25	25	25	125		
3-1-2	Pembangunan MCK, Tangki septik komunal (termasuk Pengadaan TFL; Pembentukan KSM; perencanaan/bantuan teknis; pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan keuangan)	Unit	500	750	1.000	1.250	1.500	5.000	2.500	3.750	5.000	6.250	7.500	25.000		
5	SPALD TERPUSAT (SPALD-T)															
5-1-1	IPAL Komunal - berbasis Masyarakat															
5-1-1-1	Pemicuan	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18		
5-1-1-2	Pembangunan IPAL komunal (termasuk TFL, Pembentukan KSM; perencanaan/bantuan teknis; pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan keuangan dsb)	Unit	7	7	7	7	7	35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								6.029	7.279	8.529	9.779	11.029	42.643		
B.	PERSAMPAHAN															
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA															
2-3-2	Pembangunan TPS Biasa - Berbasis Kelembagaan															
2-3-2-1	Penyusunan DED	Paket	2	2	2	2	2	10	70	70	70	70	70	350		
2-3-2-2	Supervisi dan Pembangunan TPS	Unit	2	4	6	8	10	30	700	1.400	2.100	2.800	3.500	10.500		
2-3-2-4	Rehabilitasi TPS	Paket	2	2	2	2	2	10	500	500	500	500	500	2.500		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								1.270	1.970	2.670	3.370	4.070	13.350		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN - DAK								7.299	9.249	11.199	13.149	15.099	55.993		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN CSR**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai CSR							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Nama CSR / Swasta	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	CSR							Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
8-2	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik															
8-2-1	Pengadaan Truk Tinja	Unit	0	0	0	0	1	1	0	0	0		500	500		
10	PEMANFAATAN DANA DESA, CSR DAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN SANITASI															
10-1	Sosialisasi dan Workshop CSR															
	Sosialisasi dan Workshop CSR	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250		
10-2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan CSR															
10-2-1	Mou Komitmen CSR oleh pihak swasta dalam pendanaan sanitasi	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250		
10-2-2	Pelaksanaan kegiatan CSR untuk sanitasi (Kegiatan, alokasi dana dan lokasi)	Paket	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250		
10-3	Jamban Sehat															
10-3-1	Sosialisasi kegiatan jamban	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	50		
10-3-2	Surve lokasi dan pengukuran	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	50		
10-3-3	Mou pihak pelaksana kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	50		
10-3-4	Pelaksanaan kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	150	150	150	150	150	750		
10-3-5	Monev	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	50		
10-4	Tangki Septik Sehat															
10-4-1	Sosialisasi kegiatan jamban	Paket	100	100	100	100	100	500	15	15	15	15	15	75		
10-4-2	Surve lokasi dan pengukuran	Paket	100	100	100	100	100	500	25	25	25	25	25	125		
10-4-3	Mou pihak pelaksana kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	10	10	10	10	10	50		
10-4-4	Pelaksanaan kegiatan	Paket	100	100	100	100	100	500	500	500	500	500	500	2.500		
10-4-5	Monev	Paket	100	100	100	100	100	500	25	25	25	25	25	125		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								915	915	915	915	1.415	5.075		
B.	PERSAMPAHAN															
2-6	PEMANFAATAN DANA DESA, CSR DAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN SANITASI															
	Sarana Pendukung TPS3R															
2-6-1	Bantuan Dana Desa Pembangunan akses jalan masuk TPS3R	paket	5	10	15	20	25	75	250	500	750	1.000	1.250	3.750		
2-6-2	Bantuan Dana Desa pengadaan kendaraan roda 3	paket	5	10	15	20	25	75	125	250	375	500	625	1.875		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								375	750	1.125	1.500	1.875	5.625		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber CSR								1.290	1.665	2.040	2.415	3.290	10.700		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN MASYARAKAT**

Kab. : Gobogan
Prov. : Jawa Tengah
Tahun : 2022 - 2026

Halamandari.....

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Nama Masyarakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
		SATUAN	Volume					Total Volume	Masyarakat							Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH															
2	PENYIAPAN MASYARAKAT (SPALD-S INDIVIDUAL) dengan pendekatan STBM															
2-6	Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	100	100	100	100	100	500		
2-8	Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	500	500	500	500	500	2.500		
2-9	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	500	500	500	500	500	2.500		
2-10	Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		
3	SPALD SETEMPAT (ON-SITE SISTEM)															
3-1	BERBASIS MASYARAKAT															
3-1-3	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50		
3-1-4	Operasi dan Pemeliharaan	Paket	50	75	100	125	150	500	50	75	100	125	150	500		
3-3	MCK (Komunal) - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM															
3-3-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK	Paket	1	2	2	2	2	9	5	10	10	10	10	45		
3-4	Pembangunan Tangki Septik Komunal - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM															
3-4-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septik Komunal	Paket	2	4	6	8	10	30	10	20	30	40	50	150		
5	SPALD TERPUSAT (SPALD-T)															
5-1-1	IPAL Komunal - berbasis Masyarakat															
5-1-1-3	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18		
5-1-1-4	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal	Paket	7	7	7	7	7	35	4	4	4	4	4	18		
5-1-2	IPAL Komunal - berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM)															
5-1-2-4	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal	Paket	2	2	3	3	3	13	1	1	2	2	2	7		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah								2.183	2.223	2.259	2.294	2.329	11.287		
B.	PERSAMPAHAN															
2	PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA															
2-1	PENYIAPAN MASYARAKAT (KERANJANG SAMPAH INDIVIDU, 3R SKALA RUMAH TANGGA)															
2-1-1	Pelatihan Wirausaha Sanitasi	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-2	Pemicuan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-3	Pembentukan KSM	Paket	2	4	6	8	10	30								
2-1-4	Pelatihan dan pemilihan Opsi Teknologi	Paket	2	4	6	8	10	30								
2-1-5	Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-6	Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash)	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-7	Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi	Unit	2	4	6	8	10	30								
2-1-8	Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-9	Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-1-10	Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana	Paket	2	4	6	8	10	30	1	2	3	4	5	15		
2-2	KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH															
2-2-1	Pengadaan Gerobak Sampah	unit	10	15	20	25	30	100	35	53	70	88	105	350		
2-2-2	Pengadaan Gerobak Sampah bermotor	unit	5	10	15	20	25	75	125	250	375	500	625	1.875		
2-2-3	Pengadaan Mobil Pick Up Sampah	unit	2	4	6	8	10	30	330	660	990	1.320	1.650	4.950		
2-2-4	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah	Paket	10	10	10	10	10	50	5	5	5	5	5	25		
2-2-5	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor	Paket	5	5	5	5	5	25	10	10	10	10	10	50		
2-2-6	Biaya Operasi dan Pemeliharaan Mobil Pick Up Sampah	Paket	5	5	5	5	5	25	50	50	50	50	50	250		

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Nama Masyarakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
		SATUAN	Volume					Total Volume	Masyarakat					Jumlah		
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2-3	PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA															
2-3-1	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM)															
2-3-1-3	Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500		
2-3-2	Pembangunan TPS Biasa - Berbasis Kelembagaan															
2-3-2-3	Pemeliharaan TPS	Unit	2	2	2	2	2	10	100	100	100	100	100	500		
2-3-3	Pembangunan TPS (Transfer Depo) - Berbasis Kelembagaan															
2-3-4	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)															
2-3-4-6	Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	Paket	3	3	3	3	3	15	105	105	105	105	105	525		
2-3-5	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)															
2-3-5-8	Rehabilitasi SPA	Paket	0	0	0	0	1	1								
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan								867	1.347	1.826	2.341	2.820	9.200		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber Masyarakat								3.050	3.570	4.085	4.634	5.149	20.487		



**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN (SSK) TAHUN 2022-2026
KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN ANGGARAN 2021